

LAPORAN PENELITIAN LANJUT
BIDANG KBA



EVALUASI FORMATIF BAHAN AJAR
ADMINISTRASI KEUANGAN (ADPU 4333)

Oleh:

Enceng

Liestyodono B Irianto

Yuli Tirtariandi El Anshori

JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2012



**Lembar Pengesahan
Penelitian Lanjut Bidang KBA
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Terbuka**

1. a. Judul Penelitian : Evaluasi Formatif Bahan Ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333)
- b. Bidang Penelitian : KBA
- c. Klasifikasi Penelitian : Lanjut
2. Ketua Peneliti
a. Nama Lengkap & Gelar : Drs. Enceng, M.Si
- b. NIP : 19600716 199303 1 001
- c. Golongan Kepangkatan : IV/b
- d. Jabatan Akademik, Fakultas, dan Unit Kerja : Lektor Kepala, FISIP, Jurusan Ilmu Administrasi
- e. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
3. Anggota Peneliti :
a. Jumlah Anggota : 3 (tiga) orang
- b. Nama Anggota dan Unit Kerja : Liestyodono B Irianto dan Yuli Tirtariandi EA, FISIP-UT
- c. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
4. a. Periode Penelitian : 2012
- b. Lama Penelitian : 8 (delapan) Bulan
5. Biaya Penelitian : Rp.30.000.000 (tiga puluh Juta Rupiah)
6. Sumber Biaya : Universitas Terbuka
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : Perbaikan Bahan Ajar



Drs. Enceng, M.Si
NIP. 19600716 199303 1 001

Pondok Cabe, Nopember 2012
Ketua Peneliti,

Enceng
NIP 19600716 199303 1 001



Menyetujui,
Ketua LPPM

Dra. Dewi A Padmo, PhD
NIP. 196107241987102001

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Dra. Endang Nugraheni, M.Ed, M.Si
NIP. 19570422 198605 2 001

REKOMENDASI HASIL PENELITIAN

1. Judul Penelitian : Evaluasi Formatif Bahan Ajar Administrasi Keuangan (ADPU4333)
2. Rekomendasi Pemanfaatan Hasil Penelitian Untuk Bahan Ajar :
Mata Kuliah : Administrasi Keuangan
SKS : 3 sks
Kode Matakuliah : ADPU4333
Rekomendasi yang diberikan adalah sebagai berikut :

Substansi matakuliah harus disesuaikan dengan perkembangan pengetahuan dan landasan yuridis formal yang berlaku. Kompetensi dalam GBPP dan bahan ajar harus selaras baik kompetensi maupun kedalaman uraian materinya; Komponen-komponen modul terstruktur dan lengkap sesuai dengan ketentuan; Gaya penulisan tidak sekedar seperti uraian konsep tapi berisi ajakan agar mahasiswa terlibat dalam aktivitas belajar; Perlihatkan contoh-contoh riil dalam mendeskripsikan konsep; Gunakan ilustrasi visual dalam menjelaskan konsep sulit agar modul tidak terlihat kering; Butir tes formatif 100 % harus mengukur kemampuan materi yang diuraikan dalam modul dan juga tingkat kompetensinya.

KATA PENGANTAR

Penelitian tentang ” *Evaluasi Formatif Bahan Ajar Administrasi Keuangan (ADPU4333)* ” ini dilakukan untuk mengkaji substansi dan desain instruksional Buku Materi Pokok (BMP) Administrasi Keuangan (ADPU4333). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan materi, kebahasaan dan penyajian bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU4333).

Berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini, peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil sehingga penelitian ini dapat terlaksana.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan bahan ajar Universitas Terbuka pada masa yang akan datang.

Tangerang Selatan, November 2012

Peneliti

Ketua

Enceng

NIP 196007161993031001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Rekomendasi Hasil Penelitian	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vi
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	2
1.3. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Bahan Ajar	3
Bab II Tinjauan Pustaka	4
Bab III Metode Penelitian	10
3.1. Disain Penelitian	10
3.2. Objek Penelitian	10
3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	10
3.4. Jadwal Penelitian	12
Bab IV Hasil dan Pembahasan	13
4.1. Profil Matakuliah	13
4.2. Komponen Bahan Ajar Administrasi Keuangan	14
4.3. Kondisi Materi yang Disajikan Dalam Bahan Ajar	15
4.4. Kualitas Fisik Bahan Ajar	15
4.5. Kualitas Materi Bahan Ajar	16
4.6. Prototipe Modul Administrasi Keuangan	20
Bab V Kesimpulan dan Saran	21
5.1. Kesimpulan	21
5.2. Saran	21
Daftar Pustaka	22
Lampiran	23
Lampiran 1	23
Lampiran 2	34
Lampiran 3	56

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah model bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333) yang ideal. Penelitian ini bertujuan menghasilkan bahan ajar matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) yang ideal.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis, dan diuji keabsahannya dengan melakukan *check*, *recheck* dan *cross check* terhadap data yang diperoleh.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi materi Administrasi Keuangan belum sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan landasan yuridis formal yang berlaku, kompetensi dalam GBPP dan bahan ajar belum selaras baik kompetensi maupun kedalaman uraian materinya; gaya penulisan belum berisi ajakan agar mahasiswa terlibat dalam aktivitas belajar; masih kurang memperlihatkan contoh-contoh riil dalam mendeskripsikan konsep; belum menggunakan ilustrasi visual dalam menjelaskan konsep sulit; butir tes formatif belum mengukur kemampuan materi yang diuraikan dalam modul dan juga tingkat kompetensinya

Kata kunci : *bahan ajar, administrasi keuangan.*

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), seperti yang dilaksanakan oleh Universitas Terbuka (UT), proses pembelajaran dilakukan secara mandiri. Dalam kaitan ini, bahan ajar baik cetak maupun noncetak menempati posisi yang strategis.

Media cetak pembelajaran pebelajar di UT adalah Buku Materi Pokok (BMP) atau modul. BMP atau modul sebagai bahan ajar utama sejatinya memiliki kualitas yang tinggi, memberikan manfaat yang besar kepada pebelajar, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. BMP atau modul harus memiliki kelengkapan konsep dan informasi keilmuan serta kemudahan dalam memahami konsep tersebut melalui penggunaan kata yang tepat, komunikatif serta dilengkapi dengan ilustrasi dan contoh-contoh yang menarik. BMP atau modul harus didesain sedemikian rupa, memiliki kesesuaian isi materi dengan kompetensi yang ingin dicapai (Atwi, 2011)

Buku Materi Pokok (BMP) mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran mahasiswa di pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ) seperti Universitas Terbuka (UT). BMP adalah media utama yang paling mudah diakses dalam pembelajaran terbuka dan jarak jauh serta mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan buku teks pada umumnya. Karakteristik BMP UT adalah *self-contained* (utuh-lengkap) artinya seluruh substansi mata kuliah yang diperlukan mahasiswa tersedia, *self-instruction* (membelajarkan mahasiswa), artinya menyajikan berbagai kegiatan/pengalaman belajar yang dilengkapi contoh dan ilustrasi sehingga mendorong dan membantu mahasiswa untuk berinteraksi dan belajar secara mandiri.

Pengembangan BMP bukan pekerjaan mudah sebagaimana mengembangkan buku teks umumnya, yaitu membutuhkan kepakaran substansi di bidangnya, kepakaran desain instruksional serta proses penulisan yang cukup waktu sesuai jadwal penawaran mata kuliahnya. Oleh karena itu pengembangan BMP yang berkualitas dengan waktu penyelesaian yang memenuhi jadwal bahkan lebih cepat sangat diperlukan. Dalam pengembangan BMP, penulis BMP merupakan komponen sangat penting dari tim pengembang. Oleh karena itu kepakaran dan komitmen penulis sangat diperlukan.

BMP atau modul harus pula memiliki keandalan konsep ilmu atau informasi yang terkandung di dalamnya baik dilihat dari pakar (ahli) yang mengemukakan konsep tersebut, sumber referensi (buku acuan) maupun aktualitas informasi (sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi). Agar informasi yang disajikan di dalam BMP tidak kedaluarsa (*out of date*) dan senantiasa dapat mengikuti perkembangan keilmuan yang terjadi, BMP atau modul perlu direvisi (Atwi, 2011). Berkaitan dengan hal tersebut dan untuk mengendalikan mutu pendidikan jarak jauh, khususnya mutu bahan

ajar jarak jauh, maka evaluasi bahan ajar jarak jauh perlu dilakukan. Evaluasi bahan ajar jarak jauh dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain dengan cara *self evaluation* oleh pengampu matakuliah. *Self evaluation* jika dilakukan dengan benar sangat bermanfaat dalam memperoleh informasi tentang kekuranglengkapan bahan ajar. Informasi ini selanjutnya dapat dimanfaatkan sebagai dasar untuk revisi bahan ajar tersebut (Limbong, 2002). Salah satu bahan ajar jarak jauh yang perlu dievaluasi adalah Buku Materi Pokok (BMP) Administrasi Keuangan (ADPU 4333). BMP ini ditulis pada tahun 2007 dan dicetak tahun 2009, sehingga usianya sudah mencapai 5 (lima) tahun. Di samping itu, beberapa materi yang ada di dalam BMP perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, maka permasalahannya adalah bagaimanakah kondisi bahan ajar matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333). Permasalahan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimanakah profil matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333).
2. Bagaimanakah kelengkapan komponen bahan ajar matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333).
3. Bagaimanakah kondisi materi yang disajikan dalam bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333).
4. Bagaimanakah model bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333) yang ideal.

1.3. Tujuan dan Manfaat Evaluasi Bahan Ajar

Evaluasi bahan ajar matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) bertujuan untuk

1. memperoleh informasi profil mata kuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333).
2. memperoleh informasi tentang kelengkapan komponen bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333).
3. mengetahui kondisi materi yang disajikan dalam BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333).
4. menghasilkan bahan ajar matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) yang ideal.

Sedangkan manfaat dari evaluasi bahan ajar mata kuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) sebagai berikut.

- a. Manfaat akademik : memberikan kontribusi dalam pengembangan materi BA dan desain instruksional.
- b. Manfaat praktis : memberikan masukan dalam penulisan/ revisi BA.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Evaluasi (penilaian) merupakan pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu sehingga akan terjawab bagaimana dan seberapa jauh sesuatu proses atau sesuatu hasil yang diperoleh seseorang atau suatu program (Nasoetion,1997). Sedangkan Suparman (1991) menyatakan bahwa evaluasi terhadap bahan ajar perlu dilakukan karena bertujuan untuk menentukan apa yang harus ditingkatkan atau direvisi agar produk tersebut lebih efektif sehingga kualitas menjadi lebih baik. Stufflebeam (2007, 326) mendefinisikan evaluasi sebagai berikut : *Evaluation is a systematic investigation of some object's value.* Secara operasional, *Evaluation is the process of delineating, obtaining, reporting, and applying descriptive and judgmental information about some object's merit, worth, significance, and probity in order to guide decision making, support accountability, disseminate effective practices, and increase understanding of the involved phenomena.*

Evaluasi bahan ajar jarak jauh dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan cara *self-evaluation* oleh pengampu matakuliah. Evaluasi dengan cara tersebut akan bermanfaat untuk mengetahui kekuranglengkapan bahan ajar yang pada akhirnya dapat dijadikan dasar untuk merevisi bahan ajar. Sedangkan evaluasi formatif menurut Dick dan Carey (1985) adalah proses menyediakan dan menggunakan informasi untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka meningkatkan kualitas produk atau program instruksional. Evaluasi formatif merupakan bagian dari langkah-langkah desain pembelajaran. Menurut Limbong, dkk (2002), hal-hal yang dievaluasi dalam bahan ajar jarak jauh meliputi 3 (tiga) komponen pokok, yakni: kelengkapan Rancangan Matakuliah (RMK), yang terdiri dari Peta Kompetensi (PK) dan Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP), serta Buku Materi Pokok (BMP). Ketiga komponen bahan ajar jarak jauh tersebut perlu tersedia pada saat melakukan evaluasi, agar terlihat kelengkapan dan konsistensinya satu sama lain.

Dengan demikian, hal-hal yang perlu dievaluasi terhadap bahan ajar jarak jauh adalah:

- a. Kelengkapan Rancangan Matakuliah (RMK) yang terdiri dari Peta Kompetensi (PK) dan Garis Besar Program Pembelajaran (GBPP).
- b. Kelengkapan dan Cara Penulisan Buku Materi Pokok (BMP), yang terdiri dari :
 1. Kelengkapan Format BMP:
 - Tinjauan matakuliah
 - Bab/Unit (Isi):
 - Pendahuluan
 - Penyajian
 - Penutup
 - Daftar Pustaka

- Glosarium
2. Kesesuaian Cara Penulisan BMP:
 - a. Tinjauan matakuliah
 - b. Bab/Unit (Isi) (Pendahuluan, Penyajian, Penutup)
 - c. Daftar Pustaka
 - d. Glosarium
 3. Konsistensi Peta Kompetensi (PK), GBPP, dan BMP, yang terdiri dari:
 - a. Konsistensi PK dan GBPP
 - b. Konsistensi GBPP dan BMP
 - c. Konsistensi antar komponen bahan ajar.

Lebih lanjut, Limbong, dkk (2002), mengemukakan bahwa analisis komponen isi matakuliah merupakan salah satu mata rantai dari evaluasi mata kuliah. Jika bagian ini dilakukan dengan baik dan benar, maka hasil analisis akan dapat memberikan informasi yang sangat berarti bagi pengambilan keputusan di dalam menentukan apakah matakuliah tersebut masih laik untuk dipakai sebagai salah satu pembelajaran pendidikan jarak jauh ataukah perlu direvisi.

Menurut Dick, Carey, & Carey (2009), strategi dalam melakukan evaluasi formatif bahan ajar cetak atau BMP adalah

1. *Expert Review* (mohon cek bahan pelatihan): orang ahli konten (3), ahli desain instruksional
2. *One-To One Evaluation (about three students)*, meliputi : *Clarity of instruction, Impact on learner dan Feasibility*
3. *Small-Group Evaluation (8-20 Students)*, meliputi : *Instructional effectiveness (pretest and posttest), Attitudes about instruction (questionnaire & interview), Feasibility of the instruction (time required for learners, cost, and attitudes of the implementers)*
4. *Field Trial (about 30 students)*, meliputi : *Instructional effectiveness, Attitudes about instruction, Feasibility of the instruction, More sophisticated materials, learners, procedures, and setting compare to One – to One and small group, Personally play a minimal role in the field trials.*

Atwi (2011: 56-60) menyatakan bahwa evaluasi dalam sistem pengembangan instruksional meliputi tiga langkah, yaitu :

- a. Uji coba prototipe instruksional, biasanya mengambil bentuk-bentuk berikut.
 - 1). Uji coba pengembangan untuk melihat komponen yang perlu direvisi
 - 2). Uji coba validasi untuk melihat seberapa jauh mahasiswa mencapai tujuan instruksional
 - 3). Uji coba lapangan untuk menentukan apakah pengajar dan mahasiswa lain dapat menggunakan bahan-bahan tersebut

- b. Analisis Hasil, melibatkan tiga kegiatan, yaitu: *pertama*, tabulasi dan memproses data evaluasi. *Kedua*, menentukan hubungan antara metode yang digunakan, hasil yang dicapai, dan tujuan yang ingin dicapai. *Ketiga*, menafsirkan data. Kualitas revisi yang akan dibuat tergantung kepada interpretasi data.
- c. Implementasi/uji coba ulang
Berdasarkan interpretasi data hasil uji coba revisi dilakukan dari revisi kecil sampai revisi total.

Pada sisi lain, kualitas bahan ajar (BMP atau modul) dapat dilihat dari dimensi kualitas sebagai berikut.

- a. *Performance* (Kinerja); Foster (2001:5) menyatakan bahwa *performance refers to the efficiency with which a product achieves its intended purpose*. Pada dimensi ini, penekanan kualitas produk terletak pada derajat efisiensi penggunaannya, artinya bahwa suatu produk dikatakan berkualitas apabila efisien ketika digunakan sebagaimana fungsi dari produk tersebut. Dengan demikian, kinerja sebuah produk mencerminkan manfaat yang tinggi dari produk tersebut. Dalam konteks produk berupa BMP atau modul, suatu BMP dikatakan berkualitas atau memiliki *performance* yang tinggi apabila memberikan manfaat yang besar kepada pembacanya (mahasiswa UT) berupa konsep keilmuan dan informasi menyangkut keadaan dan perkembangan lingkungan yang terjadi. Oleh sebab itu, kualitas BMP dalam dimensi ini dapat dilihat dari kelengkapan konsep dan informasi yang dibahas serta kemudahan dalam memahami konsep tersebut. Dengan demikian, dalam uraian konsep keilmuan diperlukan kata yang tepat, kalimat yang jelas serta dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi dan contoh-contoh yang dapat memperjelas pemahaman suatu konsep keilmuan.
- b. *Reliability* (Keandalan); secara harfiah, *reliability* dapat diartikan sebagai dapat dipercaya atau diandalkan. Foster (2001 : 5) mengatakan bahwa *reliability refers to the propensity for a product to perform consistently over its useful design life*. Dalam dimensi ini, kualitas produk terletak pada konsistensi kinerjanya selama disain umur kegunaannya. Dalam konteks BMP, reliabilitas merupakan keandalan konsep ilmu atau informasi yang terkandung di dalamnya, baik dilihat dari pakar (ahli) yang mengemukakan konsep tersebut, sumber referensi (buku acuan) maupun aktualitas informasi sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Berkaitan dengan aktualitas informasi, maka kualitas BMP dapat dilihat dari segi umur (usia) BMP seperti edisi (tahun penerbitan) ataupun edisi revisinya. Pada umumnya, usia sebuah buku atau BMP adalah lima tahun, artinya setelah berusia lima tahun sejak tahun penerbitannya, maka buku atau BMP harus diperbaiki/direvisi. Hal ini dimaksudkan agar informasi yang disajikan di dalam BMP tidak kedaluwarsa (*out of date*) dan senantiasa dapat mengikuti perkembangan lingkungan yang terjadi. Jika usia BMP lebih dari lima tahun dan tidak direvisi, maka BMP tersebut dapat dikatakan tidak berkualitas karena informasi yang terkandung di dalamnya tidak dapat diandalkan (*reliabel*) lagi oleh

pembacanya. Apalagi modul-modul ilmu sosial di mana perubahan lingkungan terjadi demikian cepat.

- c. *Conformance to Specifications* (Kesesuaian dengan Spesifikasi), yaitu sejauhmana karakteristik disain dan operasi memenuhi spesifikasi yang telah dijanjikan sebelumnya. Suatu produk dikatakan berkualitas jika memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan. Pemenuhan terhadap spesifikasi ini tidak harus 100 %, melainkan ada toleransinya. Dengan demikian, jika suatu produk menunjukkan kinerja dalam batas-batas toleransi spesifikasi yang ada, maka produk tersebut dikatakan *conforms*. Kualitas modul dalam dimensi ini dilihat dari kesesuaian isi materi modul dengan kompetensi umum dan kompetensi khusus dalam batas-batas toleransi tertentu. Jika uraian materi yang terdapat dalam modul tidak sesuai dengan kompetensi umum dan khusus, maka modul tersebut dapat dikatakan tidak berkualitas.
- d. *Durability* (Daya Tahan), yaitu daya tahan produk ketika digunakan. *Durability is the degree to which a product tolerates stress or trauma without failing* (Foster, 2001 :6). Suatu produk dikatakan memiliki daya tahan yang tinggi, jika ia tidak mudah rusak atau mengalami gangguan/kegagalan selama digunakan walaupun ketika digunakan secara terus menerus. Daya tahan suatu produk dapat dilihat dari sisi teknis maupun waktu. Dalam konteks BMP, secara teknis BMP tidak mudah rusak dan umur kegunaannya relatif lama. Namun demikian, hal ini tergantung dari kualitas kertas, pencetakan, dan penjilidannya. Jika kualitas kertas yang digunakan kurang baik (kertas buram) dan pencetakan serta penjilidannya juga kurang baik sehingga menyebabkan BMP mudah rusak (terkoyak) atau sobek, dapat dikatakan kualitas BMP tersebut kurang/tidak baik.
- e. *Aesthetics* (Estetika); Foster (2001 : 6) menyatakan bahwa *aesthetics are subjective sensory characteristics such as taste, feel, sound, look, and smell*. Dengan demikian, estetika merupakan dimensi produk yang berkaitan dengan sensor panca indera manusia seperti indera pengecap, peraba, pendengaran, penglihatan dan penciuman. Sensitivitas indera setiap orang relatif berbeda sehingga melahirkan persepsi yang berbeda pula terhadap tampilan fisik suatu produk. Namun demikian, tidak berarti bahwa tidak banyak orang yang memiliki persepsi yang sama atas tampilan fisik suatu produk. Dalam kaitan dengan BMP, kualitas BMP dapat dilihat dari disain gambar (ilustrasi) dan warna cover, kualitas kertas, pencetakan dan penjilidan maupun desain ilustrasi yang mendukung uraian materi di dalamnya. Dengan demikian, dalam dimensi ini, suatu modul dikatakan berkualitas jika warna covernya menarik, disainnya bagus, kualitas kertas, pencetakan dan penjilidannya bagus serta desain gambar, bagan, atau ilustrasi yang mendukung uraian materi di dalamnya juga bagus.

Bahan ajar utama yang digunakan oleh UT adalah bahan ajar cetak yang disebut Buku Materi Pokok (BMP). Menurut Atwi Suparman (dalam Yunus, 2004), bahan ajar yang berkualitas harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- isinya benar dan mutakhir
- ditulis oleh pakar yang berkualifikasi tinggi di bidangnya
- dirancang dengan menerapkan konsep desain instruksional yang sistematis dan sesuai dengan konsep pembelajaran jarak jauh, yaitu utuh-lengkap dan membelajarkan sendiri mahasiswa
- desain fisik berstandar internasional
- berbentuk paket multimedia yang tepat guna

Menurut Lockwood (1998), bahan ajar PTJJ yang berkarakter membelajarkan diri pembelajar, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Belajar individual
- Belajar tanpa terikat oleh waktu atau tempat tertentu
- Materi ajar terstandar
- Pengajaran yang terstruktur
- Belajar aktif
- Memiliki balikan
- Memiliki tujuan pembelajaran yang jelas
- Penggunaan bahasa bersifat interaktif dan personal

BAB III

METODOLOGI

3.1. Disain Penelitian

Studi ini menggunakan metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah evaluasi yang memfokuskan pada *self evaluation*, yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi mengenai kelayakan bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333). Menurut Neuman (2003), studi evaluasi termasuk dalam kategori penelitian terapan. Metode evaluasi dapat digunakan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan sebuah program, yang dalam hal ini bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333).

3.2. Objek Penelitian

Objek studi adalah Buku Materi Pokok (BMP) Administrasi Keuangan (ADPU 4333). Studi ini memfokuskan analisisnya pada desain instruksional, substansi dan kualitas BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333).

3.3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung di lapangan. Data primer ini dikumpulkan melalui wawancara, yaitu suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2001: 113). Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan tentang kualitas BMP dari segi materi dan desain instruksional.

- b. Data sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data-data yang sudah ada, atau kajian Administrasi Keuangan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dokumen ini digunakan untuk melengkapi data yang didapat dari observasi maupun wawancara.

A. Narasumber/informan

Dalam penelitian ini, narasumber adalah sumber informasi yang merupakan pakar bidang ilmu administrasi keuangan dan pakar bidang desain instruksional. Informan merupakan sumber informasi yang berasal dari mahasiswa yang belum menempuh matakuliah administrasi keuangan. Dengan demikian, narasumber/informan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pakar bidang ilmu administrasi keuangan;
- b. Pakar disain instruksional
- c. Mahasiswa yang belum menempuh matakuliah administrasi keuangan.

B. Pengumpulan data

Data diperoleh melalui studi pustaka, dan wawancara. Strategi yang akan dilakukan adalah *one to one* dengan ahli, *one to one* dengan mahasiswa, *small group evaluation* untuk mendapatkan data. Fokus utamanya adalah mengetahui profil modul Administrasi Keuangan (ADPU433) pada PS Ilmu Administrasi Negara, kualitasnya dan model modul tersebut yang ideal.

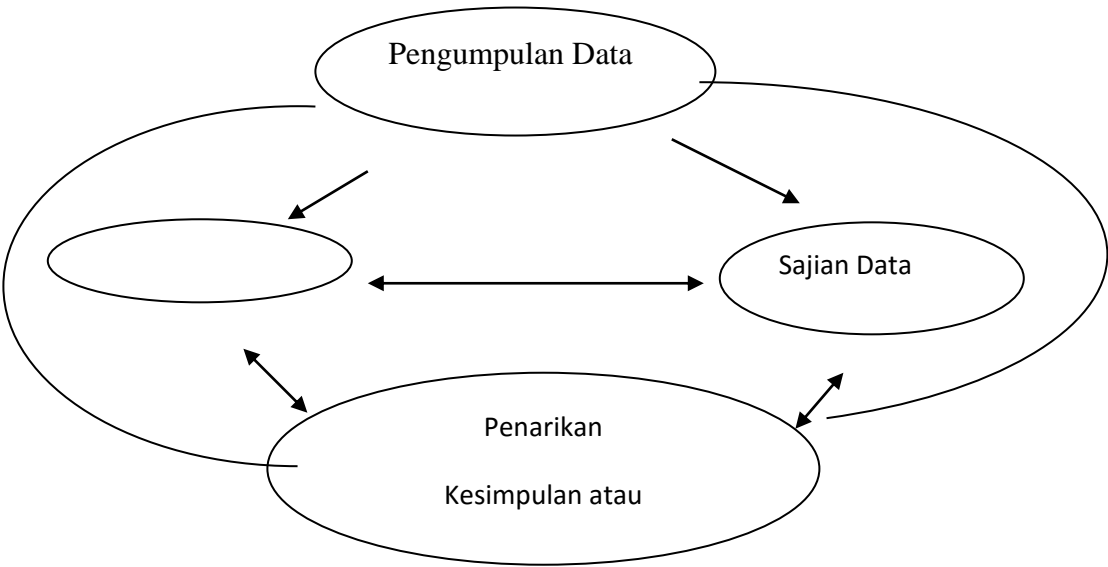
C. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian diperiksa keabsahannya dengan menggunakan metode triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Ada empat macam teknik triangulasi berdasarkan landasan yang digunakan untuk pemeriksaan, yaitu berdasarkan sumber, metode, penyidik dan teori (Moleong, 2000: 45).

Penelitian ini menggunakan metode triangulasi (Moleong, 2000: 46), dengan sumber, yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan:

- a. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
- b. membandingkan apa yang dikatakan pakar ilmu administrasi keuangan dengan apa yang dikatakan oleh mahasiswa;
- c. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Dengan membandingkan indikator kualitas BMP dengan hasil yang didapat, maka peneliti dapat mengetahui segala informasi data berkaitan dengan indikator kualitas BMP; standar isi, dan standar disain instruksional.



Gambar 1

Alur Analisis Data

Hasil dari analisis data penelitian ini digunakan sebagai masukan dalam rangka revisi modul Administrasi Keuangan (ADPU4333)

3.4. Jadwal Penelitian

Tabel 1. Jadwal Rencana Kegiatan

[illegible]

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan *self evaluation* terhadap bahan ajar jarak jauh, peneliti terlebih dahulu melihat komponen bahan ajar, keterkaitan antar komponen yang ada serta memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas setiap komponen. Untuk dapat melakukan hal tersebut, peneliti menelusuri proses lahirnya matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) antara lain melalui perkembangan kurikulum dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara, dari hanya berupa nama matakuliah dalam kurikulum sampai menjadi bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, dan akhirnya matakuliah tersebut diujikan kepada mahasiswa dalam bentuk ujian akhir semester (UAS).

Kualitas bahan ajar terkait erat dengan komponen-komponen yang ada. Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang tidak tepat sasaran akan mengakibatkan bahan ajar cetak maupun media pembelajaran lainnya menjadi kurang berkualitas. Hal ini tentu mempengaruhi proses pembelajaran yang terjadi dan akan berdampak pada kualitas bahan ajar. Konsistensi antara Peta Kompetensi (PK) dan GBPP, GBPP dan Buku Materi Pokok (BMP), serta konsistensi antar komponen dalam BMP, perlu pula diperhatikan.

4.1. Profil Matakuliah

Matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) ditulis pada tahun 2002, kemudian direvisi tahun 2007 sehingga matakuliah ini pada tahun 2012 sudah berusia 5 (lima) tahun. Penulis utama BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333) adalah Drs Rachman Mulyawan, M.Si, staf pengajar pada Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung.

Matakuliah ini merupakan matakuliah kompetensi utama pada program studi Ilmu Administrasi Negara. Selama tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, proses pembelajaran matakuliah tersebut belum dilengkapi dengan bahan ajar noncetak, tetapi mahasiswa yang mengambil matakuliah tersebut memperoleh bantuan belajar melalui tutorial online. Ketersediaan soal di Bank Soal telah dipenuhi oleh matakuliah tersebut sejumlah 10 set, yang dikembangkan pada tahun 2008.

Untuk lebih memperoleh gambaran yang lengkap tentang profil matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333), dapat dilihat dalam lampiran 1.

4.2. Komponen Bahan Ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333).

Berdasarkan analisis yang dilakukan, komponen bahan ajar matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) dapat didiskripsikan sebagai berikut:

4.2.1 Kelengkapan RMK.

Matakuliah Administrasi Keuangan (ADPU 4333) dikembangkan dengan mengacu kepada Rancangan Matakuliah (RMK), yang terdiri dari Peta Kompetensi (PK) dan GBPP. Antara PK dan GBPP juga sudah terlihat konsisten.

4.2.2 Kelengkapan dan Cara Penulisan BMP

Pada umumnya, komponen kelengkapan BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333) seperti tinjauan matakuliah, komponen bab/modul yang terdiri dari pendahuluan, uraian, penutup dan daftar pustaka sudah ada. Namun demikian, komponen kelengkapan BMP tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar yang ditentukan UT seperti :

- a. Pada tinjauan matakuliah belum menguraikan kegunaan matakuliah, belum memberi penjelasan tentang bahan/alat/media yang dapat digunakan oleh mahasiswa selain membaca bahan ajar cetak, dan belum memberi penjelasan tentang cara mempelajari bahan ajar serta kaitan materi.
- b. Pada pendahuluan modul, umumnya tidak menguraikan manfaat dan relevansi bab. Pada bagian penyajian umumnya kurang komunikatif, masih kurang contoh dan ilustrasi.

4.2.3 Konsistensi antar Komponen

Uraian yang disajikan dalam bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333) dapat dikatakan terdapat konsistensi dalam penulisan antar komponen, baik antara PK dan GBPP, GBPP dan BMP serta antar modul dalam BMP. Demikian pula halnya dalam penulisan kisi-kisi dan soal ujian, terdapat konsistensi.

Untuk lebih jelasnya mengenai kelengkapan BMP dapat dilihat pada lampiran 1.

4.3. Kondisi Materi yang Disajikan Dalam Bahan Ajar

Materi yang disajikan dalam BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333), sebagian sudah tidak sesuai dengan perkembangan keilmuan. Hal ini terlihat pada modul 3, 4, 5, 6,7,8 dan 9. Di samping itu, ada pula yang isinya kurang relevan sebagai materi matakuliah tersebut dan tumpang tindih, seperti modul 1, dan 2. Hal ini antara lain disebabkan oleh perubahan paradigma dari administrasi negara ke administrasi publik dan perubahan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, materi dalam BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333) perlu direvisi.

4.4. Kualitas Fisik Bahan Ajar

Jika kualitas bahan ajar Administrasi Keuangan (ADPU 4333) dianalisis berdasarkan dimensi kualitas produk sebagaimana dikembangkan oleh Garvin (dalam Foster,2001) diperoleh gambaran sebagai berikut :

4.4.1. Performance (Kinerja)

Dalam konteks BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333), konsep dan informasi yang dibahas dalam BMP tersebut cukup lengkap, namun masih diperlukan

penyempurnaan dalam penggunaan kata yang tepat, kalimat yang jelas dan komunikatif serta dilengkapi dengan ilustrasi dan contoh-contoh yang relevan dan aktual.

4.4.2 Reliability

Dalam konteks BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333), konsep keilmuan atau informasi yang terkandung di dalamnya bersumber dari pakar (ahli) terpercaya, namun karena terdapat perkembangan keilmuan dan perubahan praktik penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia dan ada beberapa modul yang tumpang tindih, maka perlu penyempurnaan berdasarkan landasan teori dan/atau kebijakan negara. Dari segi usia, BMP tersebut sudah berusia lima tahun. Artinya BMP tersebut harus diperbaiki/direvisi isi materinya agar informasi yang disajikan dalam BMP tidak kedaluarsa dan senantiasa dapat mengikuti perkembangan lingkungan yang terjadi.

4.4.3 Conformance to Specifications

Dalam konteks BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333), terdapat kesesuaian antara materi modul dengan kompetensi baik kompetensi umum maupun kompetensi khusus. Begitu pula uraian materi yang terdapat dalam modul relatif sinkron dengan kompetensi umum dan khusus.

4.4.4 Durability

Dalam konteks BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333) cetakan kedua, kualitas kertas yang dipergunakan cukup baik dan pencetakan serta penjilidannya juga cukup baik sehingga BMP tersebut relatif tidak mudah rusak atau sobek.

4.4.5 Aesthetics

Dalam kaitan dengan BMP Administrasi Keuangan (ADPU 4333), warna *cover*, disain *cover* cukup menarik. Tetapi, ilustrasi yang mendukung uraian materi kurang menarik.

4.5. Kualitas Materi Bahan Ajar

4.5.1. Evaluasi Pakar Administrasi Keuangan :

A. Dr Ira Irawati,Dra,M.Si, Dosen FISIP-UNPAD

Secara umum, proporsi materi tentang teori administrasi, administrasi negara , dan kebijakan publik tidak seimbang dengan teori administrasi keuangan. Di samping itu, belum dilengkapi dengan contoh kasus yang aktual, belum ada konsep / teori/paradigma baru dalam administrasi negara, belum ada konsep/teori tentang *government accounting*, belum ada materi tentang Ilmu Politik yang mempengaruhi kebijakan penganggaran. Konsep-konsep esensial yang perlu ditambahkan pada BMP Administrasi Keuangan (ADPU4333) adalah *new public management* dan *government accounting*; sedangkan konsep yang perlu dihilangkan dari BMP ini adalah *Planning Programming Budgeting System* (PPBS), diganti dengan *Performance Budgeting*.

Secara rinci, materi yang perlu ditambahkan atau dihilangkan pada tiap-tiap modul adalah sebagai berikut.

Modul 1 : perlu ditambahkan paradigma baru dalam Administrasi Negara yaitu konsep *New Public Management, fundamental values in governing public affairs such as fairness, justice, representation and participation to improve efficiency* (baca konsep deLeon and Denhardt 2000; Frederickson 1997).

Modul 2 : perlu ditambahkan materi *Accounting Principles*, terutama *Governmental Accounting*, dan konsep *Accrual-Based Budgeting*.

Modul 3 : prinsip anggaran berimbang dan dinamis sebaiknya dihilangkan saja, karena sistem ini sudah tidak dipakai lagi. Pada modul ini perlu ditambahkan sistem Defisit dan Surplus Anggaran, materi Penerimaan Negara dari BUMN/D terutama mengenai masalah penyertaan modal pemerintah.

Modul 4 : perlu diberikan materi aktual tentang *content* APBN 2011 atau 2010 dan materi tentang *Public Policy and Public Finance*.

Modul 5 : perlu ditambahkan materi tentang UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara , UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Perpres No. 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Modul 6 : PPBS dihilangkan karena sudah tidak digunakan lagi di Indonesia. Pada modul ini sebaiknya dibahas tentang teori *Performance-Based Budgeting* dan konsep *Performance Budgeting System*.

Modul 7 : perlu ditambahkan pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Para Publik, dan konsep *Shadow Government*.

Modul 8 : perlu ditambahkan penjelasan tentang peran lembaga-lembaga pengawas dan atau pemeriksa keuangan Negara/Daerah, seperti BPK,BPKP,KIPP,Inspektorat di Tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi, Kota/Kab) serta ditambahkan konsep *Discretionary Power* dalam konteks Hukum Administrasi Negara.

Modul 9 : pada modul ini perlu ditambahkan materi tentang Permendagri No.13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah dan materi *Revenue Sharing between State and Local Government*.

Namun demikian, deskripsi materi Administrasi Keuangan (ADPU4333) menurut penilaiannya disajikan dengan jelas, teknik penyajian cukup sistematis, dan gaya bahasa tepat untuk Strata Sarjana.

Untuk lebih jelasnya mengenai evaluasi materi BMP oleh pakar administrasi keuangan tersebut dapat dilihat pada lampiran 2.

B. Dr Endang Larasati,MS, Dosen FISIP-UNDIP

Pakar Keuangan publik ini menyarankan agar Administrasi Keuangan membahas tentang

1. Keuangan negara dan ruang lingkupnya, di dalamnya termasuk membahas paradigma baru keuangan negara;

2. Pengeluaran negara, termasuk di dalamnya membahas tentang fungsi negara dan prinsip-prinsip pengeluaran negara, dampak atau pengaruh pengeluaran negara, urgensi sektor publik;
3. Dasar dan struktur penerimaan negara, termasuk di dalamnya membahas tentang sumber penerimaan keuangan daerah dan pajak serta pengaruh pajak terhadap perekonomian;
4. Anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk di dalamnya membahas tentang pengertian anggaran negara, APBN dan Permasalahannya, dan sistem penyusunan APBN;
5. Kebijakan keuangan negara membahas tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan keuangan internasional;
6. *Akuntabilitas, termasuk di dalamnya membahas prinsip-prinsip akuntabilitas Governmental accounting dan Shadow Government;*
7. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah dan desa, termasuk di dalamnya membahas tentang *Revenue Sharing between State and Local Government*

4.5.2. Ahli Desain Instruksional, Dr Benny A Pribadi :

Masukan ahli desain instruksional terhadap GBPP dan modul sampel meliputi hal-hal berikut.

1. Kompetensi dalam GBPP dan bahan ajar harus selaras baik kompetensi maupun kedalaman uraian materinya;
2. Komponen-komponen modul terstruktur dan lengkap sesuai dengan ketentuan;
3. Gaya penulisan tidak sekedar seperti uraian konsep tapi berisi ajakan agar mahasiswa terlibat dalam aktivitas belajar;
4. Perhatikan contoh-contoh riil dalam mendeskripsikan konsep;
5. Gunakan ilustrasi visual dalam menjelaskan konsep sulit agar modul tidak terlihat kering;
6. Butir tes formatif 100 % harus mengukur kemampuan materi yang diuraikan dalam modul dan juga tingkat kompetensinya.

4.5.3. Evaluasi Mahasiswa :

4.5.3.1. Strategi *one to one* :

Strategi ini dilakukan dengan mewawancarai dua mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara yang belum menempuh matakuliah Administrasi Keuangan yang dilakukan secara purposive. Menurut Suryati Saruwaba NIM 014420858, modul Administrasi Keuangan mudah dipahami, hanya kurang menarik. Sarannya adalah agar modul tersebut bisa menarik pembaca, maka harus banyak memberikan contoh-contoh, dilengkapi tabel-tabel dan gambar-gambar yang relevan dengan uraian materi terutama materi yang sulit dipahami. Di samping itu, soal-soal tes formatif lebih variatif tidak hanya pilihan ganda.

Sementara itu, Neni Aprilianti NIM 018940335 berpendapat bahwa modul 1 dan 2 Administrasi Keuangan kurang menarik karena monoton, tidak disertai dengan ilustrasi, contoh-contoh. Modul 3 judulnya penerimaan dan pengeluaran negara, tetapi pada kegiatan belajar 1 dibahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Modul 4 membahas tentang kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan keuangan internasional, tetapi pendahuluannya tidak berkaitan dengan isi kegiatan belajarnya. Di samping itu, kurang contoh-contoh dan kurang ilustrasi. Modul 5 tidak menarik karena tidak ada contoh-contoh yang dapat memperjelas uraian. Modul 6 sangat tidak menarik karena tidak ada contoh yang sesuai dengan pekerjaannya. Modul 7 kurang menarik karena tidak disertai ilustrasi. Modul 8 agar lebih banyak memberikan contoh, sedangkan modul 9 uraiannya terlalu panjang, mohon dilengkapi bagan dan contoh-contoh.

4.5.3.2.Strategi *Small Group Evaluation* :

Strategi ini dilakukan dengan mewawancarai 18 (delapan belas) mahasiswa program studi Ilmu Administrasi Negara yang belum menempuh matakuliah Administrasi Keuangan yang dilakukan secara purposive.

Pada umumnya, responden (94,5 %) menilai bahwa modul matakuliah Administrasi Keuangan sulit dipahami dan dimengerti, kurang menarik minat untuk dibaca karena tidak disertai dengan contoh-contoh konkret dan ilustrasi-ilustrasi. Sedangkan seorang responden menilai bahwa modul Administrasi Keuangan mudah dipahami dan dimengerti karena cukup banyak uraiannya, uraiannya tidak monoton dan dilengkapi dengan contoh-contoh dan ilustrasi materi yang dibahas.

Responden menyarankan agar modul Administrasi Keuangan diperbanyak latihan, tes formatifnya variatif, disertai contoh-contoh konkret, ilustrasi yang sesuai dengan lingkungannya, dan bahasa yang digunakan lebih disederhanakan (tidak terlalu banyak menggunakan istilah-istilah asing).

4.6. Prototipe Modul Administrasi Keuangan

Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, baik mahasiswa maupun pakar Administrasi Keuangan dan ahli desain instruksional serta analisis terhadap kelengkapan dan kualitas BMP, maka prototipe modul Administrasi Keuangan sebagaimana terlampir (lampiran 3).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

1. Bahan ajar ADPU 4333 Administrasi Keuangan belum dilengkapi dengan Bahan ajar noncetak (BANC).
2. Kelengkapan komponen bahan ajar belum sesuai format penulisan bahan ajar UT; manfaat yang akan dicapai setiap modul, penggunaan media, dan keterkaitan antar modul.
3. Kondisi materi masih tumpang tindih , masih menggunakan paradigma lama, dan belum disesuaikan dengan kebijakan baru.
4. Kualitas bahan ajar masih belum memadai dari aspek *performance, reliability, conformance to specification, durability dan aesthetic*.

5.2.Saran

1. Bahan ajar perlu dilengkapi dengan BANC.
2. Perlu reformat kelengkapan komponen bahan ajar; manfaat yang akan dicapai setiap modul, penggunaan media, dan keterkaitan antar modul.
3. Kondisi materi perlu ditata lagi sehingga tidak tumpang tindih , perlu penggunaan paradigma baru, dan perlu disesuaikan dengan kebijakan baru.
4. Kualitas bahan ajar perlu ditingkatkan lagi dari aspek *performance, reliability, conformance to specification, durability dan aesthetic*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dick,W., & Carey,L. (2009). *The Systematic Design of Instruction*. Glenview,Illinois : Scott,Foresman and Company
- Limbong, A, dkk. 2002. *Langkah Praktis Evaluasi Bahan Ajar Jarak Jauh*. Jakarta: PAU- PPAI Universitas Terbuka.
- Nasution, N..1997. *Program Pengembangan Ketrampilan Teknik Instruksional (PEKERTI) untuk Dosen Musa, Penilaian Hasil Belajar*, Jakarta:PAU-PPAI Universitas Terbuka.
- Neuman, W. Laurence.2003. *Social Research Methods Qualitative and Quantitative Approaches*, Boston: Pearson Education.
- Suparman, Atwi.1991. *Desain Instruksional*, Jakarta, PAU-PPAI Universitas Terbuka.
- Suparman, Atwi, Benny A Pribadi, Tian Belawati.2011. *Program Pembelajaran dalam Bidang Desain Pembelajaran untuk Dosen Universitas Terbuka*, Tangerang, Universitas Terbuka.

FORMAT EVALUASI BAHAN AJAR CETAK JARAK JAUH

Judul BMP : Administrasi Keuangan (ADPU 4333)

Penulis : Rahman Mulyawan

No .	Obyek Telaahan	Ada	Tidak	Kalau ada, Bagaimana cara penulisannya?
A	Komponen RMK			
	Kelengkapan Rancangan MK dan cara perumusannya	√		
	1. Peta Kompetensi (PK)	√		Sesuai dengan ketentuan UT
	2. GBPP	√		
	○ Nama MK	√		
	○ Kode & SKS	√		
	○ Diskripsi MK	√		
	○ TIU	√		
	○ TIK	√		
	○ Pokok Bahasan	√		
	○ Sub Pokok Bahasan	√		
	○ Media	√		
	○ No. Modul	√		
	○ Persentase Teori & Praktek		√	
	○ Daftar Pustaka	√		
	3. Konsistensi dan relevansi antara PK dan GBPP	Konsisten		
B. .	Komponen BMP			
1	Tinjauan Mata kuliah	√		
	- Deskripsi singkat MK	√		
	- Manfaat/Relevansi		√	Perlu ditambahkan
	- TIU		√	Perlu

				ditambahkan
	- Bahan Pendukung lain		√	
2	<i>Bab/Unit/Modul: 1</i>			
2a.	<i>Pendahuluan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Singkat Modul • Manfaat dan Relevansi Modul • Tujuan Instruksional Khusus Modul 	√ √ √	√	Perlu ditambahkan
2b.	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	√		
	a. Topik & sub topik konsisten dengan pok. bahasan & sub pok bahasan di GBPP?	Ya		
	b. Mengakomodasi pencapaian TIK?		√	
	c. Isi: <ul style="list-style-type: none"> - Benar? - Dari sumber yang relevan & benar 	Ya Ya		Perlu direvisi sesuai perkembangan terbaru
	d. Penyajian: <ul style="list-style-type: none"> - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr,peta,diagram,tabel dll 	Kombinasi	√	
	e. Bahasa:			Kurang komunikatif
	<i>2. Contoh</i>			
	- sesuai materi	Ya		
	<i>3. Latihan</i>	√		
	-relevan dengan TIK & materi?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan	Ya		
2c	<i>Penutup</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rangkuman</i> -memuat hal pokok/prinsip • <i>Tes Formatif</i> -konsisten dengan TIK? -mewakili seluruh bahasan materi? -kriteria penulisan sudah benar • <i>Umpan Balik</i> 	√ Ya √ Ya	√	

	-memuat petunjuk penilaian penguasaan mahasiswa • <i>Tindak Lanjut</i> menginformasikan langkah selanjutnya	Ya ✓ Ya ✓ Ya		
2d	<i>Daftar Pustaka</i>	✓		Perlu ditambahkan Referensi terbaru
	-penulisan sudah benar?	Ya		
	-judul buku sesuai dengan pk.bahasan?	Ya		
2e	<i>Kunci Jawaban Tes Formatif</i>	✓		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?	Ya		
2f	<i>Glosarium</i>		✓	
	-Penulisan sudah benar?	-		
3	<i>Bab/Unit/Modul:2</i>			
3a.	<i>Pendahuluan</i> • Deskripsi Singkat Modul • Manfaat dan Relevansi Modul • Tujuan Instruksional Khusus Modul	✓ ✓	✓	Perlu ditambahkan
3b	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	✓		
	a. Topik & sub topik konsisten dengan pok. bahasan & sub pok bahasan di GBPP?	Ya		
	b. Mengakomodasi pencapaian TIK?	Ya		
	c. Isi: - Benar? - Dari sumber yang relevan& benar	Ya Ya		
	d. Penyajian: - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr,peta,diagram,tabel dll	Kombina si	✓	

	e. Bahasa:			monoton
	2. Contoh	√		
	Sesuai materi?	Ya		
	3. Latihan	√		
	<ul style="list-style-type: none"> - Relevan dengan TIK & materi? - Dilengkapi dengan petunjuk menjawab latihan 	Ya Ya		
3c	Penutup <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rangkuman</i> -memuat hal pokok/prinsip • <i>Tes Formatif</i> -konsisten dengan TIK? -mewakili seluruh bahasan materi? -kriteria penulisan sudah benar • <i>Umpan Balik</i> -memuat petunjuk penilaian penguasaan mahasiswa • <i>Tindak Lanjut</i> -menginformasikan langkah selanjutnya 	√ Ya √ Ya Ya Ya Ada Ya	√	
3d	Daftar Pustaka	√		Perlu ditambah dengan referensi terbaru
	-penulisan sudah benar?	Ya		
	-judul buku sesuai dengan pk.bahasan?	Ya		
3e	Kunci Jawaban Tes Formatif	√		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?	Ya		
3f	Glosarium		√	
	Penulisan sudah benar?			
4	Bab/Unit/Modul: 3			
4a	Pendahuluan <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Singkat Modul 	√		

	<ul style="list-style-type: none"> Manfaat dan Relevansi Modul Tujuan Instruksional Khusus Modul 	√ √	√	Perlu ditambahkan
4b	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	√		
	a. Topik & sub topik konsisten dengan pok. bahasan & sub pok bahasan di GBPP?	Ya		
	b. Mengakomodasi pencapaian TIK	Ya		
	c. Isi: - Benar? - Dari sumber yang relevan& benar	Ya		Perlu direvisi sesuai dengan perkembangan
	d. Penyajian: - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr,peta,diagram,tabel dll	Kombinasi √		
	e. Bahasa:			monoton
	<i>2. Contoh</i>	√		
	Sesuai materi?	Ya		
	<i>3. Latihan</i>	√		
	- Relevan dengan TIK & materi? - Dilengkapi dengan petunjuk menjawab latihan	Ya Ya		
4c	<i>Penutup</i>			
	<ul style="list-style-type: none"> <i>Rangkuman</i> -memuat hal pokok/prinsip <i>Tes Formatif</i> -konsisten dengan TIK? -mewakili seluruh bahasan materi? -kriteria penulisan sudah benar <i>Umpan Balik</i> -memuat petunjuk penilaian penguasaan mahasiswa <i>Tindak Lanjut</i> - menginformasikan langkah selanjutnya 	√ Ya √ Ya Ya √ Ya √ Ya	√	

4d	<i>Daftar Pustaka</i>	√		Perlu ditambah dengan referensi terbaru
4e	<i>Kunci Jawaban Tes Formatif</i>	√		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?	Ya		
4f	<i>Glosarium</i>		√	
	Penulisan sudah benar?			
5	<i>Bab/Unit/Modul: 4</i>			
5a	<i>Pendahuluan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Singkat Modul • Manfaat dan Relevansi Modul • Tujuan Instruksional Khusus Modul 	√ √ √	√	Perlu ditambahkan
5b	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	√		
	<i>a. Topik & sub topik konsisten dengan pok. bahasan & sub pok bahasan di GBPP?</i>	Ya		
	<i>b. Mengakomodasi pencapaian TIK</i>	Ya		
	<i>c. Isi:</i> - Benar? - Dari sumber yang relevan& benar	Ya Ya		Perlu direvisi sesuai dengan perkembangan
	<i>d. Penyajian:</i> - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr,peta,diagram,tabel dll	Kombinasi √		
	<i>e. Bahasa</i>			monoton
	<i>2. Contoh</i>	√		Perlu disesuaikan dengan perkembangan
	Sesuai materi?	Ya		

	<i>3. Latihan</i>	√		
	- Relevan dengan TIK & materi? - Dilengkapi dengan petunjuk menjawab latihan	Ya Ya		
5c	<i>Penutup</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Rangkuman</i> -memuat hal pokok/prinsip <i>Tes Formatif</i> -konsisten dengan TIK? -mewakili seluruh bahasan materi? -kriteria penulisan sudah benar <i>Umpan Balik</i> -memuat petunjuk penilaian penguasaan mahasiswa <i>Tindak Lanjut</i> -menginformasikan langkah selanjutnya 	√ √ Ya √ Ya Ya Ya √ Ya √ Ya		
5d	<i>Daftar Pustaka</i>	√		Perlu ditambahkan referensi terbaru
	Penulisan sudah benar?			
5e	<i>Kunci Jawaban Tes Formatif</i>	√		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?		√	
5f	<i>Glosarium</i>		√	
	Penulisan sudah benar?			
6	Bab/Unit/Modul: 5			
6a	<i>Pendahuluan</i> <ul style="list-style-type: none"> Deskripsi Singkat Modul Manfaat dan Relevansi Modul Tujuan Instruksional Khusus Modul 	√ √ √	√	Perlu ditambahkan

6b	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	√		
	a. Topik & sub topik konsisten dengan pok bahasan & sub pok bahasan di GBPP?	Ya		
	b. Mengakomodasi pencapaian TIK	Ya		
	c. Isi: - Benar? - Dari sumber yang relevan & benar	Ya Ya		Perlu disesuaikan dengan perkembangan
	d. Penyajian: - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr, peta, diagram, tabel dll	Kombinasi	√	
	e. Bahasa			monoton
	<i>2. Contoh</i>	√		Contoh perlu diperbanyak
	Sesuai materi?	Ya		
	<i>3. Latihan</i>	√		
	- Relevan dengan TIK & materi? - Dilengkapi dengan petunjuk menjawab latihan	Ya Ya		
6c	<i>Penutup</i>			
	• <i>Rangkuman</i> - memuat hal pokok/prinsip	√ Ya		
	• <i>Tes Formatif</i> - konsisten dengan TIK?	√		
	- mewakili seluruh bahasan materi?	Ya		
	- kriteria penulisan sudah benar	Ya		
	• <i>Umpan Balik</i> - memuat petunjuk penilaian penguasaan mahasiswa	Ya √		
	• <i>Tindak Lanjut</i> - menginformasikan langkah selanjutnya	Ya √ Ya		

6d	<i>Daftar Pustaka</i>	√		Perlu ditambahkan referensi terbaru
	Penulisan sudah benar?	Ya		
6e	<i>Kunci Jawaban Tes Formatif</i>	√		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?		√	
6f	<i>Glosarium</i>		√	
	Penulisan sudah benar?			
7	Bab/Unit/Modul:6			
7a	<i>Pendahuluan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Singkat Modul • Manfaat dan Relevansi Modul • Tujuan Instruksional Khusus Modul 	√ √ √	√	Perlu ditambahkan
7b	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	√		
	a. Topik & sub topik konsisten dengan pok bahasan & sub pok bahasan di GBPP?	Ya		
	b. Mengakomodasi pencapaian TIK	Ya		
	c. Isi: - Benar? - Dari sumber yang relevan& benar	Ya Ya		Perlu direvisi/diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan praktik penyelenggara an negara dan keilmuan
	d. Penyajian: - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr,peta,diagram,tabel dll	Kombina si	√	

	e. Bahasa			tidak komunikatif
	2. <i>Contoh</i>	√		
	Sesuai materi?	Ya		
	3. <i>Latihan</i>	√		
	- Relevan dengan TIK & materi? - Dilengkapi dengan petunjuk menjawab latihan	Ya Ya		
7c	<i>Penutup</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Rangkuman</i> -memuat hal pokok/prinsip <i>Tes Formatif</i> -konsisten dengan TIK? -mewakili seluruh bahasan materi? -kriteria penulisan sudah benar <i>Umpan Balik</i> -memuat petunjuk penilaian penguasaan mahasiswa <i>Tindak Lanjut</i> -menginformasikan langkah selanjutnya 	√ Ya √ Ya Ya Ya √ Ya √ Ya		
7d	<i>Daftar Pustaka</i>	√		Tambahkan referensi terbaru
	Penulisan sudah benar?	Ya		
7e	<i>Kunci Jawaban Tes Formatif</i>	√		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?	Ya		
7f	<i>Glosarium</i>		√	
	Penulisan sudah benar?			

8	Bab/Unit/Modul:7			
8a	<i>Pendahuluan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Singkat Modul • Manfaat dan Relevansi Modul • Tujuan Instruksional Khusus Modul 	√ √ √	√	Perlu ditambahkan
8b	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	√		
	a. Topik & sub topik konsisten dengan pok bahasan & sub pok bahasan di GBPP?	Ya		
	b. Mengakomodasi pencapaian TIK	Ya		
	c. Isi: - Benar? - Dari sumber yang relevan & benar	Ya Ya		
	d. Penyajian: - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr,peta,diagram,tabel dll	Kombinasi	√	
	e. Bahasa			Kurang Komunikatif
	<i>2. Contoh</i>	√		Perlu disesuaikan
	Sesuai materi?	Ya		
	<i>3. Latihan</i>	√		
	- Relevan dengan TIK & materi? - Dilengkapi dengan petunjuk menjawab latihan	Ya Ya		
8c	<i>Penutup</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rangkuman</i> -memuat hal pokok/prinsip • <i>Tes Formatif</i> -konsisten dengan TIK? -mewakili seluruh bahasan materi? -kriteria penulisan sudah benar • <i>Umpan Balik</i> -memuat petunjuk penilaian penguasaan 	√ Ya √ Ya Ya Ya		

	mahasiswa <ul style="list-style-type: none"> <i>Tindak Lanjut</i> -menginformasikan langkah selanjutnya 	√ Ya √ Ya		
8d	<i>Daftar Pustaka</i>	√		Tambahkan referensi terbaru
	Penulisan sudah benar?	Ya		
8e	<i>Kunci Jawaban Tes Formatif</i>	√		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?	Ya		
8f	<i>Glosarium</i>		√	
	Penulisan sudah benar?			
9	Bab/Unit/Modul: 8			
9a	<i>Pendahuluan</i> <ul style="list-style-type: none"> Deskripsi Singkat Modul Manfaat dan Relevansi Modul Tujuan Instruksional Khusus Modul 	√ √ √	√	Perlu ditambahkan
9b	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	√		
	a. Topik & sub topik konsisten dengan pok bahasan & sub pok bahasan di GBPP?	Ya		
	b. Mengakomodasi pencapaian TIK	Ya		
	c. Isi: <ul style="list-style-type: none"> - Benar? - Dari sumber yang relevan & benar 	Ya Ya		
	d. Penyajian: <ul style="list-style-type: none"> - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr,peta,diagram,tabel dll 	Kombinasi	√	

	e. Bahasa			monoton
	2. <i>Contoh</i>	Kurang		Perlu diperbanyak
	Sesuai materi?	Ya		
	3. <i>Latihan</i>	√		
	- Relevan dengan TIK & materi? - Dilengkapi dengan petunjuk menjawab latihan	Ya Ya		
9c	<i>Penutup</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rangkuman</i> -memuat hal pokok/prinsip • <i>Tes Formatif</i> -konsisten dengan TIK? -mewakili seluruh bahasan materi? -kriteria penulisan sudah benar • <i>Umpan Balik</i> -memuat petunjuk penilaian penguasaan mahasiswa • <i>Tindak Lanjut</i> -menginformasikan langkah selanjutnya 	√ Ya √ Ya Ya Ya √ Ya √ Ya		
9d	<i>Daftar Pustaka</i>	√		
	Penulisan sudah benar?	Ya		
9e	<i>Kunci Jawaban Tes Formatif</i>	√		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?		√	
9f	<i>Glosarium</i>		√	
	Penulisan sudah benar?			
10	Bab/Unit/Modul:9			
10 a	<i>Pendahuluan</i> <ul style="list-style-type: none"> • Deskripsi Singkat Modul • Manfaat dan Relevansi Modul • Tujuan Instruksional Khusus Modul 	√ √ √	√	Perlu ditambahkan

10 b	<i>Penyajian</i>			
	<i>1. Uraian</i>	√		
	a. Topik & sub topik konsisten dengan pok bahasan & sub pok bahasan di GBPP?	Ya		
	b. Mengakomodasi pencapaian TIK	Ya		
	c. Isi: - Benar? - Dari sumber yang relevan & benar	Ya Ya		
	d. Penyajian: - Deduktif/induktif/kombinasi - Gbr,peta,diagram,tabel dll	Kombina si	√	
	e. Bahasa			kurang komunikatif
	<i>2. Contoh</i>	√		Perlu ditambah
	Sesuai materi?			
	<i>3. Latihan</i>	√		
	- Relevan dengan TIK & materi? - Dilengkapi dengan petunjuk menjawab latihan	Ya Ya		
10 c	<i>Penutup</i> • <i>Rangkuman</i> -memuat hal pokok/prinsip • <i>Tes Formatif</i> -konsisten dengan TIK? -mewakili seluruh bahasan materi? -kriteria penulisan sudah benar • <i>Umpan Balik</i> -memuat petunjuk penilaian penguasaan mahasiswa • <i>Tindak Lanjut</i> -menginformasikan langkah selanjutnya	√ Ya √ Ya Ya Ya √ Ya √ Ya		
10 d	<i>Daftar Pustaka</i>	√		
	Penulisan sudah sesuai?	Ya		

10e	<i>Kunci Jawaban Tes Formatif</i>	√		
	-sesuai tes?	Ya		
	-dilengkapi petunjuk menjawab latihan?	Ya		
10f	<i>Glosarium</i>		√	
	Penulisan sudah benar?			

Instrumen Penelaahan Kualitas Buku Materi Pokok UT

I. Petunjuk Pengisian Instrumen Penelaahan

Instrumen ini digunakan oleh Penelaah Modul UT untuk menelaah kualitas Buku Materi Pokok UT (BMP-UT) yang telah ditulis.

- 1. Baca dengan cermat BMP yang menjadi tanggung jawab Anda modul per modul (satu per satu), sampai selesai seluruhnya, lalu gunakan Instrumen Penelaahan ini untuk merekam hasil telaah Anda.
- 2. Identitas BMP yang Anda telaah:
Kode>Nama Matakuliah : ADPU 43333/ADMINISTRASI KEUANGAN

Nama Penelaah/Instansi : DR. IRA IRAWATI.,DRA.,MSI/UNPAD
- 3. Mulailah kegiatan penelaahan dari Tinjauan Matakuliah kemudian lanjutkan ke Modul 1, Modul 2, dan seterusnya sampai selesai seluruh modul dalam BMP yang Anda telaah.

I. Tinjauan Matakuliah

Berikut ini berbagai kriteria Tinjauan Matakuliah, dari setiap BMP. Cermati setiap kriteria, kemudian berikan tanda (✓) di bawah kolom Tingkat Pemenuhan Kriteria. Tuliskan juga komentar/penjelasan yang terkait dengan pemenuhan kriteria dan bagian yang perlu direvisi

N o	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Kesesuaian materi BMP dengan Rancangan Matakuliah (RMK)				✓	
2.	Kelengkapan dan kejelasan Tinjauan Matakuliah dalam BMP ditinjau dari aspek:					
	a. Deskripsi matakuliah				✓	
	b. Relevansi Matakuliah			✓		Proporsi materi tentang teori Administrasi, Administrasi Negara , dan Kebijakan Publik tidak seimbang dengan teori Administrasi Keuangannya
	c. Tujuan Umum Matakuliah				✓	
	d. Peta Kompetensi				✓	
	e. Daftar Judul Modul dan Judul Sub Modul				✓	
	f. Petunjuk Cara Mempelajari BMP				✓	

Keterangan:

1 = tidak terpenuhi

2 = sebagian kecil terpenuhi

3 = sebagian besar terpenuhi

4 = seluruhnya terpenuhi

II. Penelaahan Setiap Modul

Berikut ini berbagai kriteria modul dalam BMP dari matakuliah ini. Cermati setiap kriteria, kemudian berikan tanda(✓) di bawah kolom Tingkat Pemenuhan Kriteria. Isikan juga komentar/penjelasan yang terkait dengan pemenuhan kriteria dan bagian yang perlu direvisi

Judul Modul : Ruang Lingkup Administrasi Keuangan

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				✓	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				✓	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				✓	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				✓	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			✓		Perlu ditambahkan paradigma baru dalam Administrasi Negara yaitu konsep New Public Management
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan tinggi tatap muka yang berkualitas baik)			✓		Perlu ditambahkan konsep fundamental values in governing publiuc affairs such as fairness, justice, representation and participation to improve efficiency (baca konsep deLeon and Denhardt 2000; Frederickson 1997)
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				✓	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				✓	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				✓	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				✓	

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
11	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	
12	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					
	a. Membantu pemahaman konsep				√	
	b. Relevan dengan materi				√	
	c. Jelas				√	
	d. Menarik				√	
13	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	
14	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	a. relevan dengan substansi modul			√		
	b. mutakhir			√		

Keterangan:

- 1 = tidak terpenuhi
- 2 = sebagian kecil terpenuhi
- 3 = sebagian besar terpenuhi
- 4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Modul
2 (dua)

Judul Modul : Sistem Administrasi Keuangan

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				√	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				√	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			√		Perlu ditambahkan materi Accounting Principles, terutama Governmental Accounting
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan tinggi tatap muka yang berkualitas baik)			√		Perlu ditambahkan konsep Accrual-Based Budgeting
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				√	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				√	
11.	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	
12.	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					
	e. Membantu pemahaman konsep				√	
	f. Relevan dengan materi				√	
	g. Jelas				√	
	h. Menarik				√	
13.	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	
14.	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15.	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	c. relevan dengan substansi modul			√		
	d. mutakhir			√		

Keterangan:

- 1 = tidak terpenuhi
- 2 = sebagian kecil terpenuhi
- 3 = sebagian besar terpenuhi
- 4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Modul 3 (tiga)

Judul Modul : Penerimaan dan Pengeluaran Negara

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				√	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				√	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			√		Prinsip anggaran berimbang dan dinamis sebaiknya dihilangkan saja, karena system ini sudah tidak dipakai lagi. (Perlu ditambahkan system Defisit dan Surplus Anggaran)
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan tinggi tatap muka yang berkualitas baik)			√		Perlu ditambahkan materi Penerimaan Negara dari BUMN/D , terutama mengenai masalah penyertaan modal pemerintah
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				√	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				√	
11.	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	
12.	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					
	i. Membantu pemahaman konsep				√	
	j. Relevan dengan materi					

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
					√	
	k. Jelas				√	
	l. Menarik				√	
13.	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	
14.	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15.	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	e. relevan dengan substansi modul			√		
	f. mutakhir			√		

Keterangan:

- 1 = tidak terpenuhi
- 2 = sebagian kecil terpenuhi
- 3 = sebagian besar terpenuhi
- 4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Modul 4 (empat)

Judul Modul : Kebijakan Keuangan Negara

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				√	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				√	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			√		Perlu diberikan materi aktual tentang content APBN 2011 atau 2010
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan tinggi tatap muka yang berkualitas baik)			√		Perlu ditambahkan Public Policy and Public Finance
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				√	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				√	
11.	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	
12.	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					
	a. Membantu pemahaman konsep				√	
	b. Relevan dengan materi				√	
	c. Jelas				√	
	d. Menarik				√	
13.	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
14.	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15.	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	a. relevan dengan substansi modul			√		
	b. mutakhir			√		

Keterangan:

1 = tidak terpenuhi

2 = sebagian kecil terpenuhi

3 = sebagian besar terpenuhi

4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Modul 5 (lima)

Judul Modul : Tinjauan terhadap UU 17/2003 tentang Keuangan Negara

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				√	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				√	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			√		Perlu ditambahkan materi tentang UU No.1 th 2004 tentang Perbendaharaan Negara , UU No,15 th 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Perpres No,54 th 2011 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan tinggi tatap muka yang berkualitas baik)			√		Perlu ditambah teori Performance-Based Budgeting
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				√	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				√	
11.	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelas an bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
12.	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					
	e. Membantu pemahaman konsep				√	
	f. Relevan dengan materi				√	
	g. Jelas				√	
	h. Menarik				√	
13.	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	
14.	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15.	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	c. relevan dengan substansi modul			√		
	d. mutakhir			√		

Keterangan:

- 1 = tidak terpenuhi
- 2 = sebagian kecil terpenuhi
- 3 = sebagian besar terpenuhi
- 4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Modul 6 (enam)

Judul Modul : PPBS

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				√	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				√	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			√		PPBS dihilangkan karena sudah tidak digunakan lagi di Indonesia
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan tinggi tatap muka yang berkualitas baik)			√		Perlu ditambahkan konsep Performance Budgeting System
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				√	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				√	
11.	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	
12.	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					
	i. Membantu pemahaman konsep				√	
	j. Relevan dengan materi				√	
	k. Jelas				√	
	l. Menarik				√	
13.	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
14.	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15.	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	e. relevan dengan substansi modul			√		
	f. mutakhir			√		

Keterangan:

- 1 = tidak terpenuhi
- 2 = sebagian kecil terpenuhi
- 3 = sebagian besar terpenuhi
- 4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Modul 7 (tujuh) Pengawasan Keuangan Negara

Judul Modul : Pengawasan Keuangan Negara

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penj elasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				√	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				√	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			√		Perlu ditambahkan pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Para Publik
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan			√		Perlu ditambahkan konsep Shadow Government

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
	tinggi tatap muka yang berkualitas baik)					
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				√	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				√	
11.	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	
12.	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					
	m. Membantu pemahaman konsep				√	
	n. Relevan dengan materi				√	
	o. Jelas				√	
	p. Menarik				√	
13.	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	
14.	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15.	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	g. relevan dengan substansi modul			√		
	h. mutakhir			√		

Keterangan:

- 1 = tidak terpenuhi
- 2 = sebagian kecil terpenuhi
- 3 = sebagian besar terpenuhi
- 4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Modul 8 (delapan)

Judul Modul : Pemeriksaan Keuangan Negara

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				√	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				√	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			√		Perlu ditambahkan penjelasan tentang peran lembaga-lembaga pengawas dan atau pemeriksa keuangan Negara/Daerah, seperti BPK,BPKP,KIP P,Inspektorat di Tingkat Pusat dan Daerah (Provinsi, Kota/Kab)
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan tinggi tatap muka yang berkualitas baik)			√		Perlu ditambahkan konsep Discretionary Power dalam konteks Hukum Administrasi Negara
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				√	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				√	

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
11.	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	
12.	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					
	i. Membantu pemahaman konsep				√	
	j. Relevan dengan materi				√	
	k. Jelas				√	
	l. Menarik				√	
13.	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	
14.	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15.	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	m. relevan dengan substansi modul			√		
	n. mutakhir			√		

Keterangan:

- 1 = tidak terpenuhi
- 2 = sebagian kecil terpenuhi
- 3 = sebagian besar terpenuhi
- 4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Modul 9 (Sembilan)

Judul Modul : Keuangan Daerah dan Desa

Nama Penelaah/Instansi : Dr. Ira Irawati.,Dra.,MSi

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
1.	Materi yang disajikan dalam modul ini valid				√	
2.	Materi yang disajikan dalam modul ini tidak ada yang salah konsep				√	
3.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
4.	Kedalaman materi modul ini sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai mahasiswa				√	
5.	Materi modul ini mutakhir, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi			√		Perlu ditambahkan Permendagri No.13/2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , UU No.25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah
6.	Materi modul ini sesuai dengan konsep dan teori yang “standar” untuk matakuliah tersebut (seperti yang diberikan dalam perguruan tinggi tatap muka yang berkualitas baik)			√		Perlu ditambahkan materi Revenue Sharing between State and Local Government
7.	Materi modul ini selaras dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia				√	
8.	Keluasan materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
9.	Kedalaman materi dalam modul ini sesuai untuk program studi yang menggunakannya				√	
10.	Konsep dan teori yang diuraikan dalam modul ini utuh, sesuai dengan bidang ilmu				√	
11.	Penyajian materi modul ini runtut, sistematis dan logis sehingga memudahkan untuk dipahami,				√	
12.	Ilustrasi, contoh dan non contoh yang digunakan dalam Modul ini:					

No	Kriteria	Tingkat Pemenuhan Kriteria				Komentar/penjelasan bagian yang perlu direvisi untuk kriteria ini
		1	2	3	4	
	o. Membantu pemahaman konsep				√	
	p. Relevan dengan materi				√	
	q. Jelas				√	
	r. Menarik				√	
13.	Tes formatif sesuai untuk mengukur ketercapaian kompetensi yang ada dalam tujuan instruksional modul ini				√	
14.	Ketepatan kunci jawaban tes formatif				√	
15.	Daftar Pustaka yang dicantumkan pada Modul ini:					
	s. relevan dengan substansi modul			√		
	t. mutakhir			√		

Keterangan:

- 1 = tidak terpenuhi
- 2 = sebagian kecil terpenuhi
- 3 = sebagian besar terpenuhi
- 4 = seluruhnya terpenuhi

Komentar tentang kelemahan dan saran perbaikan per modul (gunakan kertas lain bila perlu)

Formulir Isian

Identitas BMP yang anda telaah

Kode>Nama Matakuliah :ADPU4333/Administrasi Keuangan Negara

Nama Penelaah/Instansi :Dr. Ira Irawati./Unpad

I. Berikut ini berbagai aspek dalam BMP matakuliah ini. Cermati setiap aspek, kemudian berikan tanda (✓) di bawah kolom keunggulan jika Anda anggap aspek ini merupakan keunggulan, atau di bawah kolom kelemahan, jika Anda anggap aspek tersebut sebagai kelemahan.

No	Aspek BMP	Beri Tanda centang (✓)	
		Keunggulan	Kelemahan
1.	Kebenaran subtansi/materi/isinya	✓	
2.	Sistematika (keruntutan) penyajiannya	✓	
3.	Kekomunikatifan bahasanya	✓	
4.	Keindahan dan kepraktisan formatnya	✓	
5.	Desain grafisnya	✓	
6.	Kualitas fisik kertas dan penjilidannya	✓	
7.	Manfaat bagi penggunaanya (mahasiswa, tutor, dll)	✓	
8.	Lain-lain (tuliskan)		✓ Perlu ditambahkan contoh kasus yang nyata dalam Implementasi aturan mengenai Administrasi Keuangan

II. Bila Anda diharapkan memberi nilai secara umum, berapakah nilai BMP matakuliah ini?

Nilai BMP Matakuliah (Sekarang)		Tanda Centang (✓)	Alasan yang mendukung penilaian Anda*
≥ 80	Baik	✓	Sebagian besar materi disajikan dengan cukup jelas dan sistematis
65-79	Sedang		
50-64	Kurang		
≤ 49	Buruk		

* Uraikan/beri komentar sesuai tanda centang yang telah Anda berikan

- A. Keunggulan BMP ini adalah:

 - Deskripsi materi disajikan dengan Jelas
 - Teknik penyajian cukup sistematis
 - Gaya Bahasa tepat untuk Strata Sarjana
- B. Kelemahan BMP ini adalah:

 - Belum dilengkap contoh kasus yang aktual terjadi saat ini
 - Belum ada konsep / teori/paradigma baru dalam Administrasi Negara
 - Belum ada konsep/teori tentang Government Accounting
 - Proporsi materi Ilmu Administrasi , Administrasi Negara dan Kebijakan Publik kurang seimbang dibandingkan dengan materi Administrasi Keuangannya sendiri
 - Belum ada materi tentang Ilmu Politik yang mempengaruhi Kebijakan Penganggaran

Konsep-konsep esensial yang Anda pandang perlu ditambahkan pada BMP ini adalah:

No	Tambahan Konsep Esensial
1	New Public Management
2	Government Accounting

III. Konsep-konsep esensial yang Anda pandang perlu dihilangkan pada BMP ini adalah:

No	Konsep Esensial yang Perlu Dihilangkan
1	PPBS diganti dengan Performance Budgeting
2	

IV. Dengan kualitas seperti tersebut di atas, apakah Anda bersedia menggunakan Buku Materi Pokok ini sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa dalam matakuliah yang Anda ajar di universitas Anda?

Bersedia

Lampiran 3



Keuangan Negara dan Ruang Lingkupnya



*T*ransisi reformasi yang mengubah secara fundamental bidang sosial-kultural dan politik di Indonesia berdampak



adanya pergeseran paradigma pengelolaan keuangan negara yang lebih desentralistik. Paradigma tersebut diharapkan lebih mendekatkan pengelolaan keuangan negara kepada kepentingan pemenuhan tuntutan-tuntutan dan kebutuhan-kebutuhan bangsa yang sangat mendesak disegala tingkatan pemerintahan. Nuansa desentralisasi dalam pengelolaan keuangan negara

dimaksudkan untuk mendekatkan pemecahan permasalahan-permasalahan di seluruh wilayah dan daerah di negeri ini dapat diitopang dengan pendanaan yang tepat oleh masing-masing daerah dan pelayanan masyarakat serta keadilan sosial dapat diwujudkan dalam waktu yang relatif singkat. Dalam kerangka tersebut pembahasan keuangan negara pada sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari transisi tersebut yang diawali adanya krisis

multidimensi yang melanda negeri ini sampai saat modul ini ditulis. Bermula dari nilai eksternal rupiah (kurs rupiah) yang merosot tajam yang mencapai 80% pada tahun 1997 yang berlanjut terus sampai tahun 2000-an.

Pertumbuhan ekonomi mencapai minus 15% dan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Seiring dengan kemelut di bidang ekonomi, di bidang politik dan keuangan pun demikian. Mei 1998 pemerintahan Orde Baru tumbang dan Orde Reformasi dimulai. Periode pemerintahan silih berganti, dimulai dari pemerintahan transisi, sampai pemerintahan Megawati dan sekarang pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono. Pertumbuhan ekonomi turun naik berkisar pada angka 5% - 6,5%. Pertumbuhan ekonomi 6,5% dipertahankan dengan berbagai kebijakan oleh pemerintah sampai tahun 2013.

Berbagai kebijakan ditempuh oleh pemerintah sebagai upaya untuk ke luar dari krisis dan mempertahankan tingkat pertumbuhan dalam rangka menyelamatkan dari krisis global 2013. Dalam rangka memperbaiki efisiensi pemerintahan pasca reformasi, kebijakan bidang keuangan negara memunculkan paradigma baru bidang keuangan negara dengan mengukur urgensi keuangan negara di semua tingkatan pemerintahan. Urgensi keuangan negara diselaraskan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa negara Republik Indonesia diselenggarakan untuk menciptakan masyarakat sejahtera yang berkeadilan. Dalam kerangka ini pertama-tama yang akan dibahas dalam modul ini adalah pengertian kinerja publik, paradigma baru pengelolaan keuangan negara dan ruang lingkup keuangan negara. Pemahaman terhadap kedua pengertian di atas akan mengantarkan mahasiswa dalam memahami pengertian pengeluaran negara. Modul kedua tentang pengeluaran negara akan membahas urgensi pengeluaran negara yang sangat erat kaitannya dengan peran dan fungsi pemerintah pada zamannya. Kecenderungan pengeluaran Negara global, dan dilanjutkan dengan pembahasan prinsip-prinsip pengeluaran keuangan negara agar kecenderungan peningkatan pengeluaran keuangan negara dapat dikendalikan dalam berbagai tingkatan pemerintahan.

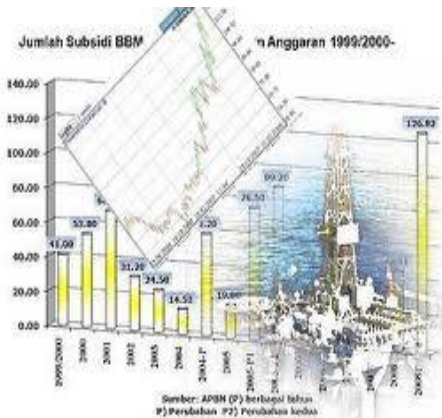
Pengaturan kembali hubungan keuangan pusat dan daerah (*Inter Governmental Fiscal Relation*) memerlukan pemahaman yang mutlak. Hal ini disebabkan karena perimbangan keuangan pusat dan daerah mengandung cakupan pengertian yang sangat luas, yaitu dalam pelaksanaan otonomi daerah ingin diwujudkan suatu bentuk keadilan horizontal maupun vertikal dan berusaha mewujudkan tatanan penyelenggaraan pengelolaan keuangan yang lebih baik dalam menjaga integritas bangsa menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat bangsa yang berkeadilan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kepentingan pelayanan publik (*public oriented*). Untuk itu, dilakukan penataan kembali perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah di daerah. Tuntutan ini dimaksudkan untuk merealisasi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang lebih memberikan keleluasaan pengaturan dan penyelenggaraan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal secara langsung berpengaruh terhadap penataan sumber-sumber keuangan baik di pusat dan di daerah. Pengelolaan sumber-sumber keuangan lebih banyak didesentralisasikan kepada daerah sehingga menuntut pemahaman yang lebih luas dalam memahami pola pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara bergeser dari pola yang sentralistik menjadi lebih desentralistik. Daerah mendapat kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan keuangan baik untuk pengelolaan sumber-sumber keuangannya maupun untuk belanja daerah sebagai dampak penyelenggaraan otonomi daerah. Orientasi pengelolaan keuangan negara lebih besar pada pengelolaan keuangan negara di daerah dibanding dengan pengelolaan keuangan negara sentral (pusat), kondisi yang demikian mengubah pola ruang lingkup keuangan negara yang di masa sebelum Undang-undang Nomor 32 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 lebih berorientasi ke pusat, untuk saat ini bergeser lebih dominan pada pengelolaan

keuangan di daerah sehingga ruang lingkup keuangan negara meliputi berikut ini.

1. Pengeluaran negara.
2. Penerimaan negara.
3. Dampak dari penerimaan dan pengeluaran negara terhadap kehidupan masyarakat.



Untuk sisi pengeluaran dan penerimaan negara, pembahasannya diorientasikan pada pengelolaan pengeluaran dan penerimaan negara di daerah, di mana di masa sebelumnya daerah hanyalah mengikuti kebijakan pengelolaan keuangan di tingkat pusat (*top down*). Oleh karena itu, dengan mempelajari modul ini Anda

akan mendapatkan pengertian tentang keuangan negara dalam paradigma baru desentralisasi /otonomi daerah dan ruang lingkungnya. Di samping itu, Anda akan lebih dapat memahami urgensi keuangan negara dan pergeseran-pergeseran yang terjadi menyangkut pengelolaan keuangan negara. Modul ini mempunyai relevansi terhadap pembahasan modul berikutnya tentang pengeluaran negara dan penerimaan negara. Sesungguhnya modul pertama merupakan pengetahuan dasar untuk memahami modul-modul selanjutnya, baik pengeluaran negara dan penerimaan negara, dampak pengeluaran negara, sumber-sumber keuangan pusat dan daerah.

Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan :

1. pergeseran keuangan negara;
2. paradigma baru pengelolaan keuangan negara;
3. ruang lingkup keuangan negara.

Modul 1 harus dikuasai dengan baik, terutama tentang keuangan negara dan paradigma baru yang menyebabkan pergeseran pengelolaan keuangan negara. Penguasaan materi ini akan memudahkan pemahaman tentang ruang lingkup keuangan negara yang tingkat gradasinya sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan undang-undang yang mendasarinya. Penguasaan pengertian dan paradigma keuangan negara dapat dijadikan landasan awal dalam rangka memperkaya pemahaman tentang pengelolaan keuangan negara di semua tingkatan pemerintahan.

Berdasarkan tujuan tersebut, modul ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu:

- a. Kegiatan belajar 1 membahas tentang Paradigma Baru Keuangan Negara
- b. Kegiatan belajar 2 membahas tentang ruang lingkup Ilmu Keuangan Negara

Selamat belajar!

Kegiatan Belajar 1

Paradigma Baru Keuangan Negara

*N*egara merupakan bentuk perserikatan terbesar dan sampai kini merupakan bentuk terakhir yang dikenal



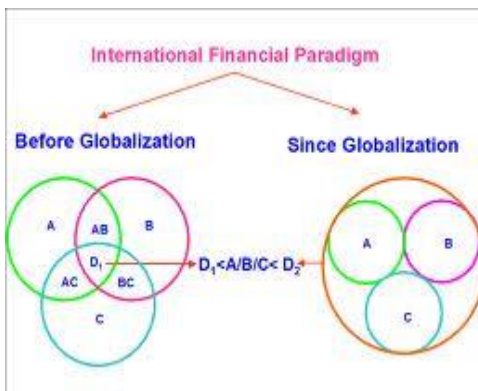
manusia. Oleh karena itu, semakin banyak orang-orang yang tergabung dalam suatu bangsa yang bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya membentuk suatu negara, maka untuk mengatur tata kehidupan agar tata bermasyarakat dan tata kehidupan itu berlangsung seharmonis mungkin, maka dengan kesepakatan bersama timbullah suatu pemerintahan bagi negara dan bangsa bersangkutan.

Suatu pemerintahan bagi bangsa dan negara mutlak diperlukan, seiring pertumbuhan penduduk yang terus melaju, maka semakin banyak dan berkembang juga kebutuhan dan kepentingan-kepentingan dari warga masyarakat yang seringkali kepentingan-kepentingan itu bertentangan satu sama lain. Tidak jarang terjadi bahwa kepentingan-kepentingan individu, antarindividu, antargolongan, dan antarsuku dalam masyarakat suatu bangsa yang mendiami suatu wilayah negara saling bertentangan dan tidak sejalan.

Untuk mencegah dan/ atau mengurangi timbulnya konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, diperlukan adanya suatu pemerintahan yang mengatur tata peri kehidupannya. Meskipun kita semua tahu bahwa membahas perkembangan yang telah dialami manusia dari keluarga sampai terciptanya suatu bangsa dan

masyarakat suatu negara bukan merupakan fokus perhatian atau bukan merupakan pembahasan utama dalam bagian dari modul ini, tetapi tulisan dalam modul ini ingin menggambarkan betapa kompleksnya usaha-usaha pemerintah dalam membuat rakyat dan warga masyarakat hidup berkesejahteraan. Sejalan dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya disebutkan bahwa tujuan didirikan negara Republik Indonesia ialah untuk mencapai atau mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka bersatu dan berkedaulatan rakyat serta dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis serta di dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Pergeseran peradaban yang kian mengglobal, usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang membahagiakan seluruh bangsa Indonesia mutlak perlu dilaksanakan pembangunan di segala bidang, tentu saja hal ini bukan pekerjaan yang mudah. Perkembangan dan dinamika masyarakat yang tinggi, berdampak terhadap usaha pemenuhan kebutuhan oleh pemerintah demi terwujudnya perikehidupan yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis, merupakan tantangan yang kompleks.



Proses perubahan yang berangkat dari kondisi nasional menuju kondisi nasional lain yang lebih baik dan lebih berharkat dilakukan oleh pemerintah (*government*). Perubahan yang direncanakan dituangkan dalam program-program pembangunan nasional (Propenas). Pemerintahan yang baik

(*good governance*). Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, mampu menghindari salah alokasi dan investasi serta mampu mencegah korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.



Pengertian *governance* sendiri dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik seiring dengan perubahan zaman, dan pergeseran kepentingan publik sesuai kebutuhan masyarakat. Tinjauan publik berkembang sesuai kebutuhan masyarakat, dan urusan-urusan atau kebutuhan-kebutuhan publik tersebut tidak semuanya dapat

diselenggarakan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan tuntutan-tuntutan kebutuhan masyarakat, sedangkan sumber-sumber keuangan publik terbatas.

Karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah sebagai berikut.

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.

5. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

7. *Efficiency and Effectiveness*, pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

9. *Strategic vision*, penyelenggara pemerintahan dan masyarakat luas memiliki visi jauh ke depan.

Seiring dengan bergantinya paradigma pemerintahan dari Orde Baru kepada Orde Reformasi, pengelolaan kepentingan-kepentingan publik mengalami pergeseran. Pergeseran-pergeseran yang terjadi menyangkut pembiayaan penyelenggaraan keuangan negara. Pengaturan keuangan negara didasarkan pada Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. *Pertama*, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespons tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power, distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. *Kedua*, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas.

Sebelum Anda lanjutkan, cobalah Anda berikan pengertian *governance*!

.....

Di samping itu, secara internal bangsa Indonesia tengah dilanda multikrisis, ancaman disintegrasi bangsa, dan kepanikan publik yang diakibatkan oleh lemahnya keamanan dan ketertiban umum serta ketidakpastian hukum. Agar bangsa ini bisa secepatnya ke luar dari belenggu krisis multidimensional dan tidak mengalami ancaman disintegrasi yang semakin parah, maka pemberian otonomi daerah merupakan langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah secara bersungguh-sungguh. Pemberian otonomi daerah hendaknya jangan sekadar jargon politik semata sebagaimana pada masa-masa sebelumnya. Jika pemerintah pusat kali ini tidak serius dalam memberikan otonomi daerah, maka ongkos (*cost*) yang ditimbulkan akan lebih besar lagi.

Pemberian otonomi daerah tidak berarti permasalahan bangsa akan selesai dengan sendirinya. Otonomi daerah tersebut harus diikuti dengan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekadar perubahan formal lembaga, tetapi mencakup pembaruan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga cita-cita reformasi, yaitu menciptakan *good governance* benar-benar tercapai.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan (*institutional reform*) dan reformasi manajemen publik (*public management reform*). Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastruktur. Kunci reformasi kelembagaan tersebut adalah pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum sebagai *stakeholder*, pemerintah daerah sebagai eksekutif, dan DPRD sebagai *shareholder*.

Reformasi manajemen sektor publik terkait dengan perlunya digunakan model manajemen pemerintahan baru yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman karena perubahan tidaklah sekadar perubahan paradigma, namun juga perubahan *mindset* penyelenggara manajemen publik. Model manajemen yang cukup populer, misalnya *New Public Management* yang mulai dikenal tahun 1980-an dan populer tahun 1990-an yang mengalami beberapa

konsep, yaitu munculnya konsep *managerialism*, *market-based public administration*, *post-bureaucratic paradigm*, dan *entrepreneurial government*. *New public management* berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi pada kebijakan. Penggunaan paradigma *New public management* tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah, di antaranya adalah perubahan pendekatan dalam penganggaran dari penganggaran tradisional (*traditional budget*) menjadi penganggaran berbasis kinerja (*performance budget*), tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (*cost cutting*), dan kompetisi tender (*compulsory competitive tendering contract*). Seiring perkembangan dan tuntutan masyarakat suatu bangsa paradigma yang diatas diperbaharui lagi menyesuaikan dengan perikehidupan masyarakat bangsa yang *more democratic*, maka manajemen pengelolaan keuangan negara tidak hanya berorientasi pada kinerja saja, tetapi juga difokuskan pada kepentingan-kepentingan masyarakat (*people oriented*). Pelayanan publik sangat kental dalam manajemen pengelolaan keuangan negara dalam paradigma *New Public Service Paradigm* ini.

Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber pembiayaan pemerintah daerah yang meliputi perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah tersebut adalah berikut ini.

1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan.
2. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran.
3. Perubahan prinsip penggunaan dan pinjaman dan *defisit spending*.
4. Perubahan strategi pembiayaan.

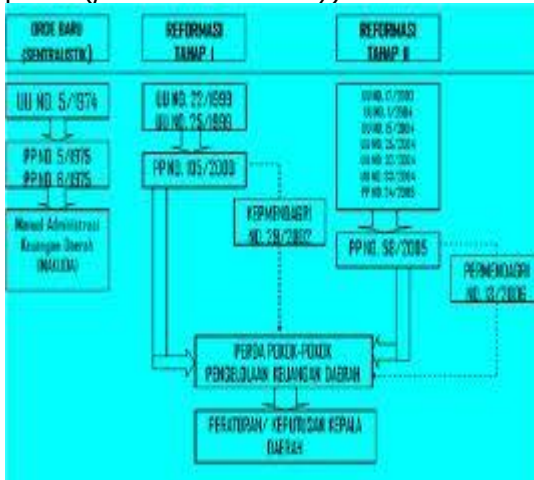
Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan (*diskresi*) untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah tersebut agar tidak mengalami defisit fiskal.

Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu berikut ini.

- 1.Reformasi sistem pembiayaan (*financing reform*).
- 2.Reformasi sistem penganggaran (*budgeting reform*).
- 3.Reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*).
- 4.Reformasi sistem pemeriksaan (*audit reform*).
- 5.Reformasi sistem manajemen keuangan daerah (*financial management reform*).

Untuk menambah wawasan Anda tentang Paradigma Baru Keuangan Negara, Anda dapat akses ke alamat berikut.
<http://massofa.wordpress.com/2008/05/01/paradigma-baru-keuangan-publik-dan-ruang-lingkupnya-bag-1/>

Tuntutan pembaruan sistem keuangan tersebut agar pengelolaan uang rakyat (*public money*) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep *value for money* sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*).



Reformasi keuangan daerah secara langsung juga akan berdampak pada perlunya dilakukan reformasi anggaran daerah (APBD). Reformasi anggaran (*budgeting reform*) meliputi proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran.

Berbeda dengan UU No. 5 Tahun 1974, proses penyusunan, mekanisme pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran daerah menurut UU No. 32 Tahun 2004 adalah tidak diperlukan lagi pengesahan dari Menteri Dalam Negeri untuk APBD Provinsi dan pengesahan Gubernur untuk APBD kabupaten/kota, melainkan diperlukan pengesahan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui Peraturan Daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001 dalam perjalanannya ternyata masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini terjadi karena persoalan otonomi daerah cukup rumit dan kompleks serta banyak sekali keterkaitannya dan melibatkan variabel lainnya.

Sesuai dengan amanat UU Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 telah terjadi perubahan yang sangat mendasar mengenai pengaturan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan *intergovernmental fiscal relation*. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengandung cakupan pengertian yang cukup luas, yaitu dalam pelaksanaan otonomi daerah ini ingin diwujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintah (dari sisi keuangan) yang lebih baik menuju terwujudnya *clean government* dan *good governance*.

Cobalah Anda cermati Undang-Undang Nomor 32 dan Nomor 33 Tahun 2004!

Sementara itu, instrumen utama dalam perimbangan keuangan tersebut dilakukan melalui desentralisasi fiskal, dengan pengertian bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, kepada daerah diberikan (1) kewenangan untuk mendayagunakan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan (2) perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Untuk itu, kepada daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*), pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*), serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan. Selain itu, daerah juga diberi

kewenangan untuk melakukan pinjaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Masalah perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang erat kaitannya dengan asas penyelenggaraan pemerintah di daerah, di mana dalam penyelenggaraannya didasarkan atas asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ketiga asas tersebut juga sangat mewarnai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, di mana sumber-sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah meliputi APBD untuk membiayai kegiatan dalam rangka desentralisasi, dan beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan untuk membiayai kegiatan dalam rangka tugas pembantuan.

Pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya berarti memberi kewenangan dan keleluasaan (*diskresi*) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara optimal. Pergeseran inilah yang membedakan pengelolaan keuangan sektor publik pada masa sebelum reformasi dan sejak digelarnya otonomi daerah 1 Januari 2001, di mana pada saat Orde Baru pengelolaan keuangan sektor publik lebih terpusat (*sentralistik*), sedangkan sejak pemberlakuan UU No. 32 dan UU No. 33 Tahun 2004 terjadi pergeseran, banyak urusan-urusan pusat yang diserahkan kepada daerah termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan sektor publik dengan berbagai model. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka pemberian wewenang dan keleluasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Penguatan fungsi pengawasan dapat dilakukan melalui optimalisasi peran DPRD sebagai kekuatan penyeimbang (*balance of power*) bagi eksekutif daerah dan partisipasi masyarakat secara langsung maupun tidak langsung melalui LSM dan organisasi sosial kemasyarakatan daerah (*social control*).

Perubahan-perubahan dalam pengelolaan kepentingan publik dan pengelolaan keuangan, yaitu dari pola yang sentralistik menjadi desentralisasi. Kewenangan dan tanggung jawab daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri semakin besar. Sistem sentralistik semakin menyusut, dan pada sistem desentralisasi, kekuasaan untuk pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan rumah tangga daerah

dan urusan-urusan publik menjadi urusan-urusan daerah. Daerah-daerah semakin otonom dan independen dalam sebagian besar aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan. Daerah, terutama kabupaten dan kota meningkat fungsinya bukan saja sebagai pelaksana pembangunan yang lebih luas, melainkan juga sebagai perencana dan juga evaluator kegiatan pembangunan itu sendiri.

Konsekuensi pelimpahan otonomi dan perluasan kewenangan itu berdampak dan berkaitan dengan pembiayaan pembangunan yang lebih banyak tergantung pada kemampuan daerah untuk mengoptimalkan pendapatannya sehingga bisa membiayai pengeluaran dalam rangka mendukung berbagai program yang sudah digariskan. Daerah tidak bisa lagi tergantung pada bantuan dan subsidi dari pusat seperti sebelumnya, di mana sebagian besar biaya di transfer dari pusat ke daerah. Sekarang ini, transfer pusat ke daerah untuk belanja pegawai (pusat dan daerah) dan khususnya untuk sumbangan, sebagian besar adalah dalam bentuk subsidi daerah otonom sebagai dana perimbangan antara pusat dan daerah.

Memang, bantuan pusat untuk daerah tidak semua dihapuskan seperti amanat Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah masih akan menerima dana perimbangan (Pasal 10) yang terdiri dari bagian daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan sumber daya alam, Dana Alokasi Khusus (DAK). Di samping itu, daerah diperbolehkan menambah dana yang berasal dari pinjaman daerah bagi daerah yang relatif miskin sumber daya alamnya. Bantuan pusat ke daerah yang sifatnya rutin hanya bisa diharapkan dari Dana Alokasi Umum.

Dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah khususnya dalam Pasal 5 diatur tentang sumber-sumber penerimaan daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan asli daerah.
2. Dana perimbangan.
3. Pinjaman daerah.
4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Pasal 6) terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah.



Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Diskusikanlah dengan kelompok Anda, mengapa terjadi pergeseran pergeseran dalam pengelolaan keuangan negara!
2. Diskusikanlah dengan kelompok Anda dampak dari pergeseran pengelolaan keuangan negara!
3. Diskusikan pula dengan kelompok Anda tuntutan dalam pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah!
4. Jelaskan latar belakang perubahan pengelolaan keuangan!
5. Mengapa paradigma baru keuangan negara lebih banyak berorientasi pada pengelolaan keuangan daerah?

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Untuk menjawab permasalahan mengapa terjadi pergeseran dalam pengelolaan keuangan negara, Anda harus mengembangkan pemahaman Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 sebagai landasan penyelenggaraan otonomi daerah.
2. Untuk menjawab dampak pergeseran pengelolaan keuangan negara, Anda harus membandingkan pola pengelolaan keuangan

negara sebelum dan sesudah diundangkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.

3. Untuk menjawab tuntutan dalam pengelolaan keuangan negara, Anda dapat mempelajari pelaksanaan jiwa Undang-undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
4. Untuk menjawab latar belakang perubahan pengelolaan keuangan negara, Anda dapat mengidentifikasi kembali kejadian-kejadian sebelum diundangkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
5. Untuk menjawab orientasi keuangan negara dalam paradigma sekarang, Anda dapat mengaitkan pelaksanaan otonomi daerah dan konsekuensinya.



Seiring dengan diterapkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi pergeseran dalam pengelolaan keuangan negara di Indonesia. Pergeseran terjadi berkaitan dengan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih desentralistik. Pengelolaan sumber-sumber keuangan juga mengalami pergeseran, banyak sumber-sumber keuangan negara yang didesentralisasikan kepada daerah kabupaten dan kota, demi terselenggaranya rumah tangga daerah otonom. Optimalisasi pengelolaan keuangan di daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah sebagai penyelenggara otonomi tidak mengalami defisit fiskal. Oleh karena itu, dilaksanakan reformasi disegala bidang meliputi reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

negara demi untuk mendukung terciptanya *good governance*. Reformasi lanjutan dilaksanakan terutama dikaitkan dengan hal-hal berikut ini.

1. Reformasi sistem pembiayaan (*financing reform*).
2. Reformasi sistem penganggaran (*budgeting reform*).
3. Reformasi sistem akuntansi (*accounting reform*).
4. Reformasi sistem pemeriksaan (*audit reform*).
5. Reformasi sistem manajemen keuangan daerah (*financial management reform*).

Tuntutan pembaruan sistem keuangan negara dimaksudkan agar pengelolaan uang rakyat dilakukan secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah. Dimensi reformasi keuangan daerah adalah berikut ini.

1. Perubahan kewenangan daerah dalam pemanfaatan dana perimbangan keuangan.
2. Perubahan prinsip pengelolaan anggaran.
3. Perubahan prinsip penggunaan dana pinjaman dan *defisit spending*.
4. Perubahan strategi pembiayaan.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Paradigma baru pengelolaan keuangan negara, lahir sebagai akibat
 - A. tuntutan masyarakat
 - B. bergantinya landasan sistem pemerintahan
 - C. dioperasionalisasikannya Undang-undang Otonomi Daerah
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 2) Pelaksanaan otonomi daerah adalah strategi untuk
 - A. merespons tuntutan masyarakat
 - B. memberdayakan sumber daya daerah

- C. mengoptimalkan sumber-sumber keuangan daerah
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 3) Pemberian otonomi daerah dapat diartikan sebagai....
- A. permasalahan bangsa selesai
 - B. pemberian kemerdekaan kepala daerah
 - C. tanggung jawab pemerintah daerah bertambah luas
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 4) Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan
- A. perubahan kewenangan dan kemerdekaan daerah
 - B. perubahan anggaran
 - C. perubahan sumber-sumber penerimaan keuangan daerah
 - D. daerah wajib melakukan pinjaman daerah
- 5) Perubahan fundamental pengelolaan keuangan negara era sebelum dan sesudah reformasi adalah
- A. perubahan pola pengelolaan keuangan negara yang sentralistik dan desentralistik
 - B. pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam pembelanjaan keuangan daerah
 - C. pemerintah daerah lebih leluasa dalam mengoptimalkan sumber-sumber daerah
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 6) Konsekuensi perluasan kewenangan pemerintah daerah sangat berkaitan dengan pembiayaan
- A. rumah tangga daerah
 - B. rumah tangga masyarakat
 - C. lembaga-lembaga daerah
 - D. pengawasan di daerah
- 7) Penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara dimaksudkan untuk mewujudkan
- A. *good governance*
 - B. cita-cita bangsa
 - C. cita-cita reformasi
 - D. tugas-tugas fungsi pemerintah

- 8) Reformasi sistem manajemen keuangan daerah tercermin dari
- A. UU No. 32 Tahun 2004
 - B. UU No. 33 Tahun 2004
 - C. UU No. 18 Tahun 2000
 - D. UU No. 34 Tahun 2000

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Ruang Lingkup Ilmu Keuangan Negara

*I*lmunya tentang keuangan negara mengikuti perkembangan kegiatan pemerintahan dan erat kaitannya dengan filsafat



ekonomi. Sejalan dengan perkembangan waktu, definisi tentang keuangan negara juga berkembang lebih luas. Awalnya, peranan pemerintah adalah sangat sedikit, terbatas hanya kepada kegiatan-kegiatan yang tidak dapat diusahakan oleh sektor swasta, misalnya dalam hal menciptakan dan mempertahankan *social overhead*. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan pemerintah

hanya meliputi segi tugas umum pemerintahan saja.

Ilmu tentang keuangan negara menyangkut masalah pembiayaan kegiatan pemerintah dan cara mendapatkan dana untuk membiayai kegiatan pemerintah tersebut. Secara tegas, keuangan negara dapat didefinisikan sebagai studi yang mempelajari tentang pengeluaran pemerintah, penerimaan pemerintah, pendapatan dan belanja negara (APBN/APBD) dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Kegiatan dan peran pemerintah, pada awalnya hanya sebatas pada penyediaan barang-barang strategis (*strategic goods*) dan barang-barang social (*social goods*). Peranan pemerintah tidaklah ikut campur tangan di dalam kegiatan pasar, tetapi membatasi kegiatannya kepada hal-hal berikut ini.

1. Melindungi masyarakat dari segala kesukaran-kesukaran dan melaksanakan hukum yang efektif dan membuat situasi tenang. Pemerintah menjaga dan menciptakan hukum dan keamanan.

2. Melindungi masyarakat dari ancaman dan serangan yang datang dari dalam bangsa sendiri maupun serangan yang datangnya dari bangsa asing.
3. Bilamana sektor swasta terbukti tidak dapat menciptakan dan menjalankan fasilitas ekonomi secara komersial tidak menguntungkan, tetapi hal tersebut terasa penting untuk kelancaran di bidang ekonomi dan berguna bagi masyarakat luas, maka pemerintah mengambil langkah dan pemikiran untuk ikut bertanggung jawab di dalam menciptakan dan mempertahankan sarana-sarana sosial tersebut. Sarana-sarana sosial atau fasilitas-fasilitas sosial tersebut, dinamakan *social overhead*.

Contoh:

- a. Jalan-jalan.
- b. Jembatan-jembatan.
- c. Penerangan.
- d. Taman Kota.

Alasan campur tangan pemerintah tidaklah berarti bahwa sektor pemerintah mempunyai sifat yang lebih baik dari pada sektor swasta. Alasan terpenting adalah bahwa tanpa sektor pemerintah atau tanpa campur tangan pemerintah, maka fasilitas ekonomi dan fasilitas sosial yang penting sangat sukar atau bahkan tidak akan terpenuhi.

Social overhead capital, seperti jalan, jembatan semuanya adalah milik negara. Dalam hal ini yang terjadi adalah bahwa batas keuntungan sosial biasanya jauh lebih besar dari pada pembiayaan. Sebagai akibatnya, sektor swasta tidak siap untuk mengembangkan dan mengusahakannya. Itulah sebabnya, perlu bagi masyarakat untuk diberi sarana-sarana sosial atau *social overhead* tersebut. Batas keuntungan swasta jauh lebih sedikit dibandingkan biayanya, dan akibat lebih lanjut adalah sektor swasta tidak dapat mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini sektor swasta tidak mampu mengadakan *social overhead capital* dan tugas ini diambil alih pemerintah.

Social overhead capital sebagaimana tersebut di atas tidak disediakan melalui jual beli di pasar atau tidak dijualbelikan kepada masyarakat. Namun demikian, semua barang-barang dan jasa-jasa

sebagai sarana sosial tersebut membutuhkan biaya perawatan dan biaya-biaya lainnya. Oleh karena itu, kepada masyarakat sebagai pemakainya dikenakan pembayaran berupa pajak, retribusi dan sebagainya demi kelangsungan hidup sarana-sarana sosial tersebut.

Selain barang-barang sebagai sarana sosial, ada jenis barang-barang dan jasa-jasa sebagai sarana sosial dikarenakan sifat barang-barang dan jasa-jasa ini tidak dapat mengeluarkan pemakainya dari ikatan pembayaran. Barang-barang dan jasa-jasa ini secara sederhana tidak dapat disediakan melalui jual-beli di pasar, dan disebut dengan barang-barang kolektif (*collective goods*). Barang-barang dan jasa-jasa ini harus disediakan bagi seluruh masyarakat dan bukan orang-orang sebagai individu. Penyediaannya tidak dapat dibatasi, campur tangan pemerintah untuk mengarahkan konsumsi para individu kepada konsumsi yang penting dan untuk kepentingan orang banyak. Kebutuhan-kebutuhan semacam itu disebut dengan *merit wants*. Sedangkan barang-barang yang bersifat sebagai *collective goods*, pemanfaatannya tidak dapat mengeluarkan seseorang yang tidak bersedia membayarnya tadi, digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang disebut dengan *social wants*.

Selain barang-barang atau jasa-jasa yang telah digolongkan dalam kategori di atas, ada barang-barang dan atau jasa-jasa yang karena sifatnya memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, barang-barang dan/atau jasa-jasa ini mungkin pula karena sifatnya menguasai kehidupan rakyat banyak. Barang-barang atau jasa-jasa tersebut apabila tidak dikuasai oleh pemerintah, maka akan bisa membahayakan kehidupan bermasyarakat pada suatu negara. Oleh karena itu, terhadap barang-barang dan/atau jasa-jasa ini pemerintah mengambil alih dan mengendalikannya lewat perusahaan-perusahaan negara. Barang-barang dan/atau jasa-jasa ini disebut sebagai barang-barang monopoli pemerintah. Barang-barang monopoli pemerintah adalah barang-barang yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan negara dalam kedudukan sebagai *single seller* (berkedudukan sebagai penjual atau sebagai produsen tunggal).

Muncul suatu pertanyaan, mengapa ada barang-barang monopoli pemerintah atau alasan-alasan apakah sehingga ada atau tercipta

barang-barang monopoli pemerintah tersebut? Terhadap barang-barang tersebut pemerintah berkedudukan sebagai monopoli, terutama karena alasan-alasan sebagai berikut.

1. Alasan keamanan, misalnya pemerintah sebagai produsen senjata dan amunisi.
2. Alasan strategis, misalnya pemerintah sebagai produsen tambang uranium dan tambang minyak.
3. Alasan karena *output*-nya menguasai hajat hidup rakyat banyak.

Dalam kaitan ini, barang-barang tersebut disebut sebagai barang-barang kegunaan umum (*publik utilities*), misalnya perusahaan listrik, perusahaan gas, perusahaan angkutan kota, perusahaan pos, telegraf dan telepon, perusahaan air minum.

Selain barang-barang dan/atau jasa-jasa yang berkedudukan sebagai barang-barang monopoli, tentu saja ada barang-barang dan/atau jasa-jasa yang bisa dengan bebas diproduksi oleh perusahaan-perusahaan swasta, baik swasta nasional maupun oleh perusahaan-perusahaan patungan. Barang-barang dan jasa-jasa ini kita sebut sebagai barang-barang swasta. Produsen atau penjual barang-barang swasta ini harus bersaing di pasaran. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini dituntut memiliki suatu manajemen pemasaran dan segi-segi lainnya yang dinamis, tidak ketinggalan zaman, dan selalu peka terhadap apa yang menjadi tuntutan masyarakat pada saat itu. Barang-barang ini misalnya berikut ini.

1. Tekstil.
2. Macam-macam perusahaan makanan dan minuman.
3. Perusahaan-perusahaan konveksi.
4. Perusahaan-perusahaan mebel dan perkakas rumah tangga.

Sekarang, marilah kita cermati ilmu keuangan negara. Ilmu tentang keuangan negara, perkembangannya mengikuti perkembangan kegiatan negara. Artinya semakin luas kegiatan atau aktivitas suatu negara, maka akan semakin luas pula lingkup dari ilmu keuangan negara tersebut. Corak dan warna dari keuangan negara ini

juga berbeda tergantung kepada filsafat pemerintah yang dianut oleh suatu negara.

Pada negara kerajaan, ruang lingkup keuangan negara adalah semua bentuk pengeluaran, baik untuk kegiatan pelayanan masyarakatnya maupun pengeluaran untuk keluarga kerajaan dan bagaimana cara mendapatkan sumber-sumber penerimaan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut.

Di Indonesia, ruang lingkup keuangan negara menyesuaikan dengan filsafat pemerintahan yang dianut. Pada masa Orde Baru keuangan negara sangat didominasi oleh pembiayaan kegiatan dan peran pemerintah yang sentralistik dan pola penerimaan sumber-sumber yang disentralkan di pusat. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara di daerah provinsi, kabupaten, dan kota menyesuaikan dengan pola yang telah ditetapkan oleh pusat. Sekarang, setelah diberlakukan otonomi daerah, pengelolaan keuangan negara mengalami pergeseran, pengelolaan dan penyelenggaraan keuangan lebih banyak diserahkan kepada daerah kabupaten dan kota, baik untuk pengeluaran sebagai konsekuensi dari pembiayaan kegiatan-kegiatan/fungsi-fungsi pemerintahan daerah maupun pengelolaan sumber-sumber oleh daerah untuk membiayai kegiatan, peran, dan fungsi pemerintah daerah.

Ruang lingkup keuangan negara meliputi pengelolaan pengeluaran dan penerimaan pemerintah baik oleh pusat atau daerah dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Sejalan dengan latar belakang filosofi di atas, definisi tentang keuangan negara pun berbeda-beda tergantung luas atau sempitnya kegiatan atau peran pemerintah. Untuk lebih jelasnya, berikut ini dikutip beberapa definisi dari berbagai ahli sesuai dengan urutan perkembangannya.

Carl C. Plehm, mengatakan bahwa ilmu keuangan negara adalah ilmu yang mempelajari tentang penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk memenuhi pembiayaan kegiatan pemerintah. Dalam definisi ini ilmu tentang keuangan negara hanya mempelajari pengalokasian atau penggunaan dana-dana oleh pemerintah untuk pembiayaan kegiatan pemerintah, tetapi akhir-akhir ini sektor pemerintah sangat berperan penting, baik di dalam teori maupun

praktik serta di dalam kehidupan perekonomian. Sejalan dengan perkembangan waktu, ide-ide dan pikiran-pikiran untuk menyejahterakan rakyat dalam kehidupan bernegara ingin pula dicapai. Hal ini berarti bahwa ruang lingkup ilmu keuangan negara mulai melebar, tidak terbatas pada segi alokasi dana yang tepat, tetapi bagaimana cara menghimpun dana dengan tidak mengorbankan perekonomian masyarakat serta pengarahannya secara tepat. Pada kenyataannya, banyak pemerintah daerah yang dalam rencana dan pengembangannya menggunakan dan memanfaatkan bantuan-bantuan dari pemerintah pusat.

Berkaitan dengan uraian di atas sampailah pada definisi yang lebih luas lagi, yaitu definisi oleh Musgrave. Musgrave mengatakan bahwa secara tradisional ilmu tentang keuangan negara mempelajari tentang masalah-masalah yang luas dan kompleks yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran pemerintah, mempelajari tentang kegiatan rumah tangga pemerintah termasuk penerimaan dan pengeluarannya. Masalah pokok bukanlah pengeluaran, tetapi juga tentang aspek-aspek kebijaksanaan ekonomi yang timbul pada saat pelaksanaan anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

Buchanan berpendapat bahwa pemerintah itu dianggap suatu unit yang juga sebagai suatu subjek dalam studi keuangan negara. Secara lebih spesifik lagi, keuangan negara mempelajari tentang aktivitas-aktivitas ekonomi pemerintah sebagai suatu unit. Permasalahan pokok tentang keuangan negara tidak hanya berkaitan dengan cara dan bagaimana penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan, tetapi juga tentang perbedaan-perbedaan kebijaksanaan yang ada dan mungkin dilaksanakan sebagai pilihan untuk melaksanakan kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah.

Sejalan dengan definisi Musgrave dan Buchanan di atas, ahli keuangan Indonesia Suparmoko mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kegiatan-kegiatan pemerintah dalam bidang ekonomi terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya beserta dengan pengaruh-pengaruh di dalam perekonomian tersebut. Keuangan negara merupakan studi tentang pengaruh-pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian.

Pengaruh-pengaruh tersebut terutama terhadap pencapaian tujuan-tujuan kegiatan ekonomi seperti berikut ini.

1. Pertumbuhan ekonomi.
2. Stabilitas harga-harga.
3. Distribusi penghasilan yang lebih merata.
4. Peningkatan efisiensi.
5. Penciptaan kesempatan kerja.



Jadi, keuangan negara merupakan studi tentang apa yang seharusnya. Misalnya, kita ingin mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti pertumbuhan ekonomi atau distribusi penghasilan yang lebih merata, maka kita harus menentukan kebijaksanaan seperti bagaimanakah yang harus kita jalankan

untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut atau dalam suatu keadaan depresi untuk memulihkan kestabilan ekonomi, maka langkah atau kebijaksanaan apakah yang harus kita tempuh agar perekonomian menjadi stabil kembali dan juga dalam keadaan yang sebaliknya.

Cobalah Anda rumuskan dengan menggunakan bahasa sendiri pengertian dari keuangan negara!

Dari berbagai definisi yang telah dipelajari di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok permasalahan atau ruang lingkup dari studi tentang keuangan negara meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. *Teori tentang pengeluaran negara*: melalui pengeluaran negara ini pemerintah mengembangkan jalannya keuangan dalam perekonomian dan sesuai dengan pola permintaan dan penawaran. Pengeluaran negara juga sebagai sarana utama bagi pemerintah untuk

mewujudkan kesejahteraan, pertumbuhan, stabilitas, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain.

2. Teori tentang penerimaan negara: teori ini membahas tentang beberapa sumber dari mana negara memperoleh pendapatan. Bagian ini membahas dan menganalisis tentang perbandingan keuntungan dan kerugian dari berbagai bentuk pemasukan dan membahas prinsip-prinsip yang harus dilakukan terhadap pilihan-pilihan itu, yaitu terhadap bermacam-macam sumber pemasukan negara, seperti pajak, utang negara dan penciptaan sumber penerimaan yang baru.

Dari uraian di atas dapatlah kita pahami hal-hal berikut ini.

a. Di dalam mempelajari perpajakan, dibahas bermacam-macam prinsip penarikan pajak, masalah-masalah pergeseran beban pajak, dan pengaruh-pengaruh perpajakan terhadap jalannya perekonomian.

b. Pelaksanaan atau penarikan pajak daerah oleh pemerintah mempunyai keuntungan-keuntungan serta risiko-risiko dan pembatasan-pembatasan serta perlu perhatian khusus.

c. Sejalan dengan itu, cukup menyenangkan untuk mempelajari masalah-masalah utang negara secara terpisah.

Sudah menjadi trend global pemerintah internasional untuk menempatkan utang negara menjadi sumber pemasukan atau sumber penerimaan negara yang sangat penting, tetapi tidak mutlak. Pelaksanaan utang negara diperlukan untuk menopang pendanaan pemerintah dalam anggaran negara. Keperluan utang negara sangat berkaitan dengan program-program yang harus didanai sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dalam tahun anggaran dan tercermin dalam prosentase tertinggi dalam pengeluaran negara. Lebih jauh lagi, utang negara dianggap mempunyai peranan yang penting di dalam kebijakan peningkatan dan pemulihan perekonomian masyarakat suatu negara.

d. Pengaruh pengeluaran negara dan penerimaan negara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat, di mana dalam bagian ini akan dibahas kebijakan-kebijakan ekonomi suatu pemerintah negara dalam suatu situasi tertentu, dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat suatu bangsa.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami keuangan negara, ada baiknya kita pahami perbedaan antara keuangan negara dengan keuangan privat sebagai berikut.

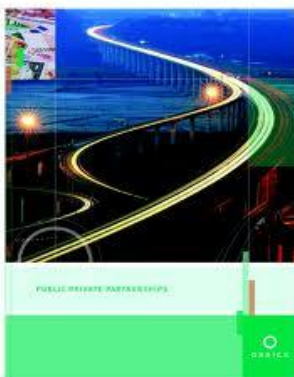
A. KESAMAAN ANTARA KEUANGAN PRIVAT DAN KEUANGAN NEGARA

Sistem ekonomi modern adalah *Moneytized*. Maksudnya, hampir semua proses ekonomi mempunyai timbal balik keuangan di mana penilaian-penilaian diutamakan. Awalnya, beberapa kegiatan-kegiatan mungkin tidak berorientasi pada uang, tetapi pada umumnya semua kegiatan akan melibatkan tuntutan penggunaan uang. Keduanya baik keuangan privat atau keuangan negara berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut tentang hal-hal berikut ini.

1. Pembelian.
2. Penjualan.
3. Transaksi-transaksi.

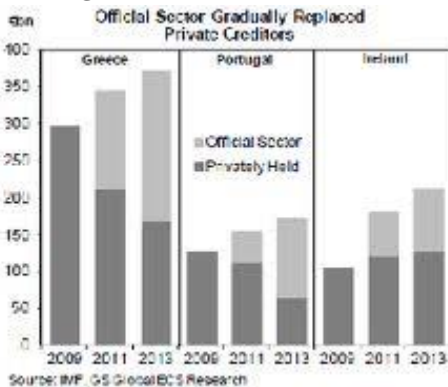
Sejalan dengan hal tersebut di atas, dalam hubungan produksi, pertukaran, tabungan, pengumpulan modal, penanaman modal, investasi, dan sebagainya agar dapat membiayai kegiatan ini maka pemerintah, misalnya mencoba membuat uang, menaikkan pinjaman, melakukan pembayaran. Suatu unit ekonomi, swasta atau keuangan privat juga memberi pinjaman, meminjam, menerima pembayaran,

melakukan pembayaran, dan sebagainya. Dalam hal ini, baik sektor pemerintah ataupun sektor swasta atau privat sama. Seseorang mungkin menunjuk bahwa kedua sektor tersebut, yaitu sektor privat dan sektor negara sama-sama ingin memuaskan keinginan masyarakat. Semua kegiatan-kegiatan ekonomi dikerjakan secara bersama-sama oleh kedua sektor tersebut, yaitu masalah-masalah yang dihadapi serta keputusan-keputusan yang diambil hampir sama. Kedua sektor ini sama-



sama mempunyai sumber yang terbatas dan mencoba memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas tersebut secara maksimal dengan melaksanakan keputusan-keputusan yang diambil, yaitu yang terpenting bisa memuaskan masyarakat terlebih dahulu.

B. PERBEDAAN ANTARA KEUANGAN PRIVAT DAN KEUANGAN NEGARA



Perbedaan pertama yang dapat dikemukakan di sini adalah bahwa sektor keuangan privat atau bisa juga disebut sektor ekonomi swasta harus hidup dengan sarana mereka sendiri. Mungkin bisa terjadi defisit, apabila pengeluaran lebih besar dibanding pendapatan,

tetapi hal ini berlangsung tidak untuk selamanya karena bisa melakukan pinjaman sebatas kekayaan yang dimiliki.

Pada sisi lain, apabila negara terjadi defisit, maka dapat mengambil kebijaksanaan untuk menetapkan *budget* defisit. Perbedaan selanjutnya, kenyataannya adalah bahwa tanpa pembayaran kembali pinjaman-pinjaman sebelumnya, suatu unit ekonomi swasta kehilangan kepercayaan kredit di dalam pasar, tetapi hal ini tidak terjadi pada negara. Negara dapat merencanakan peningkatan utangnya dalam setiap anggaran belanjanya, dan hal ini memang bisa dijalankan. Sejumlah negara mengerjakan hal ini secara berhasil. Akibatnya, utang negara di banyak negara merupakan proporsi yang besar dalam penerimaan negara.

Negara dapat meminjam baik dari dalam maupun luar negeri. Tetapi suatu unit ekonomi swasta, misalnya perusahaan tidak dapat meningkatkan pinjaman *intern*-nya (ke dalam). Semua pinjaman berasal dari luar perusahaan.

Lebih jauh lagi bunga pada pinjaman oleh negara jauh lebih rendah dari pada pinjaman oleh unit ekonomi swasta. Pada umumnya

negara mendapat bantuan dari Bank Sentral negara yang bersangkutan sebagai agen dan penanggung. Negara juga bisa mendapatkan fasilitas dari bank dan dari lembaga-lembaga lain secara lebih bebas. Semua hal di atas tidak terdapat pada unit ekonomi swasta dan walaupun ada, kemungkinan itu adalah lebih berat dibandingkan dengan sektor negara.

Beda lain yang penting antara keuangan privat dan keuangan negara ialah pemerintah atau sektor negara mempunyai kemampuan mencetak atau menciptakan uang, tetapi harus dibatasi. Kemampuan untuk menciptakan atau mencetak uang tidak dimiliki oleh unit ekonomi swasta. Walaupun penciptaan dan pencetakan uang ini bisa dilakukan oleh sektor ekonomi negara, tetapi hal ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hal-hal yang tidak diinginkan, seperti inflasi tidak terjadi.

Selanjutnya, sektor keuangan privat mengikuti *market principle* (prinsip pasar) dan prinsip ekonomi pada umumnya, sedang sektor keuangan negara mengikuti prinsip-prinsip anggaran.

Unit ekonomi privat merencanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan pemasukannya, kemudian pengeluarannya. Sedangkan sektor keuangan negara pada umumnya adalah sebaliknya, yaitu menetapkan pengeluarannya terlebih dahulu baru mencari atau menetapkan penerimaannya termasuk sumber-sumbernya.

Dengan demikian, dapat dicatat bahwa selain ada kesamaan-kesamaan antara keuangan privat dan keuangan negara, ada pula perbedaan-perbedaan dasar yang terdapat di antara keduanya.

Setelah dipahami pengertian keuangan negara dan keuangan privat, kiranya perlu dipahami pula peran pemerintah dalam perekonomian.

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah dapat ikut campur secara aktif maupun secara pasif.

Dalam sistem perekonomian yang menganut paham liberalisme atau kapitalisme dalam bentuknya yang murni, dikehendaki adanya kebebasan individu yang mutlak dan tidak membenarkan pengaturan

ekonomi oleh pemerintah, kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat diatur sendiri oleh para individu.

Menurut paham klasik terutama Adam Smith, pemerintah memiliki tiga fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi pemerintah dalam bidang pertahanan nasional.
2. Fungsi pemerintah dalam bidang keadilan sosial.
3. Fungsi pemerintah dalam bidang pekerjaan umum.

Kegiatan-kegiatan semacam ini tidak pernah menarik perhatian para individu, baik secara bersama-sama ataupun individual untuk mengusahakannya, sebab keuntungan yang timbul dari usaha tersebut bagi individu yang bersangkutan boleh dikatakan tidak ada dan bahkan sering kali pengeluarannya jauh lebih besar dari pada penerimaannya.

Di samping itu, kaum klasik mengatakan bahwa yang penting adalah pemerintah tidak mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak/belum pernah dikerjakan oleh sektor swasta baik secara perorangan maupun secara bersama-sama.

John Stuart Mill mengatakan bahwa kehidupan perusahaan lebih baik dijalankan oleh sektor swasta yang memang sudah tertarik untuk mengusahakannya dan membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa campur tangan pemerintah, tetapi ada beberapa pengecualiannya. Ia mempertahankan pendapat dengan mengajukan beberapa alasan sebagai berikut.

1. Campur tangan pemerintah membatasi adanya beberapa individu walaupun peranan pemerintah dalam memelihara perdamaian dan melindungi para individu, baik serangan dari luar ataupun dalam, tetap dibutuhkan.
2. Para individu adalah subjek yang paling tertarik atas masalah-masalahnya sendiri.
3. Pemerintah adalah interior dalam hal mengusahkan industri maupun perdagangan dibanding dengan kalau usaha-usaha itu dijalankan oleh swasta.
4. Orang akan dapat menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila orang tersebut mengerjakan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingannya sendiri.

Cobalah Anda rumuskan kesamaan dan perbedaan antara keuangan publik dan privat dalam tabel berikut!

Kesamaan		Perbedaan	
Kuangan Publik	Kuangan Privat	Kuangan Publik	Kuangan Privat
.....
.....

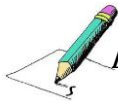
Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan kebebasan bertindak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri sesuai dengan apa yang diinginkannya, diharapkan mereka itu akan dapat mencapai kehidupannya yang harmonis. Apabila setiap orang sudah merasa makmur, semua kebutuhannya telah terpenuhi, maka semua orang dalam negara yang bersangkutan dengan sendirinya juga akan menjadi makmur.

Dengan melihat adanya kekurangan-kekurangan dan bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis, maka timbullah aliran atau paham lain yang disebut dengan sistem sosialis. Dikatakan bahwa sistem kapitalis membawa kehidupan manusia ke arah kehancuran karena kebebasan mutlak dari para individu akan menimbulkan banyak pertentangan kepentingan di antara para individu itu sendiri. Akibatnya, golongan ekonomi kuat akan terus-menerus mendesak golongan yang lemah sehingga sosialisme dalam bentuk yang murni menghendaki dihapuskannya kebebasan individu dan pengaturan kehidupan ekonomi harus dipegang oleh pemerintah sebagai organisasi yang mewakili individu-individu tadi. Pemerintah yang mengatur perencanaan dan penguasaan faktor-faktor produksi, melaksanakan kegiatan-kegiatan produksi dan mengatur distribusi barang-barang konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Kritik yang diberikan terhadap sistem sosialisme adalah bahwa dengan dihapuskan kebebasan individu akan mengurangi hak-hak asasi manusia dan juga mengurangi inisiatif-inisiatif individu. Mungkin pula kebijaksanaan pemerintah itu akan merupakan kebijaksanaan yang dihapuskan.

Dalam perkembangan ekonomi bangsa-bangsa pada pertengahan abad ke-21, ternyata tidak ada lagi sistem-sistem ekstrem yang murni. Negara-negara yang semula menganut sistem kapitalis murni

mulai memandang perlunya peranan pemerintah dalam perekonomian, sedangkan negara-negara yang semula menganut sistem sosialis murni mulai memandang dan menghargai kepentingan-kepentingan dan inisiatif-inisiatif individu. Dalam masyarakat yang menganut faham sosialis dikembangkan *socialist market*. Jadi, jelaslah bahwa sistem ekonomi yang berlaku di dunia pada abad sekarang ini sudah tidak ekstrem lagi, disebabkan karena telah dirasakannya kekurangan-kekurangan dari sistem-sistem ekstrem yang murni tersebut. Sering dikatakan bahwa sistem perekonomian yang ada sekarang ini merupakan sistem perekonomian yang bersifat campuran, sebagai dampak dari pergeseran peradaban masyarakat dan ekonomi dunia yang mengglobal. Mengenai sistem mana yang dapat dikatakan lebih bersifat sosialis atau kapitalis, tergantung pada derajat atau sampai seberapa jauh peranan pemerintah di dalam perekonomian negara yang bersangkutan dikembangkan.



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan, apakah lingkup ilmu tentang keuangan negara pada dua periode pemerintah yaitu orde baru dan orde reformasi, mengalami perkembangan ataukah penyempitan. Jelaskan mana yang lebih berkembang dan mana yang lebih sempit di antara keduanya!
2. Di antara definisi-definisi yang telah dikemukakan di atas, definisi dari siapakah yang paling sempit ruang lingkungannya? Berikan alasannya!
3. Dari definisi-definisi yang telah dikemukakan, tampak ada definisi yang senada atau sejalan. Definisi dari siapa sajakah itu? Luas atau sempitkah ruang lingkup dari keuangan negara yang tercermin dari dua definisi yang senada atau sejalan ini? Mengapa demikian? Jelaskan!

4. Diskusikanlah dengan kelompok Anda, mengapa unit ekonomi privat tidak dapat meningkatkan pinjaman internal!
5. Alasan-alasan yang mendasari pemikiran kaum klasik adalah tidak membenarkan campur tangan pemerintah dalam kehidupan perekonomian. Jelaskan!

Petunjuk Jawaban Latihan

1. Anda harus membandingkan kompleksitas masing-masing periode pemerintahan. Semakin kompleks berarti semakin luas ruang lingkup keuangan negara.
2. Anda harus mencermati kembali definisi-definisi yang sudah diuraikan dalam Kegiatan Belajar 2.
3. Anda harus menganalisis masing-masing definisi, kemudian dari definisi tersebut akan tercermin kompleksitas campur tangan pemerintah. Semakin kompleks semakin luas pula ruang lingkup keuangan negara.
4. Unit ekonomi privat (perusahaan misalnya) merupakan satu unit sehingga untuk mengadakan/ meningkatkan pinjaman internal adalah tidak mungkin. Apabila hal ini dilakukan, sama saja dengan mengadakan utang terhadap dirinya sendiri.
5. Campur tangan pemerintah hanya dibutuhkan untuk hal-hal yang memang tidak dapat diusahakan masyarakat atau swasta.



RANGKUMAN

Ilmu tentang keuangan negara berkembang menurut perkembangan peran atau aktivitas pemerintah dalam usaha penyelenggaraan pelayanan publik dan penciptaan kesejahteraan masyarakat bangsa.

Pada dasarnya ilmu tentang keuangan negara mempelajari tentang penerimaan dan pengeluaran negara beserta pengaruh-pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat suatu negara. Oleh

karena itu, ruang lingkup keuangan negara meliputi hal-hal berikut ini.

1. Pengeluaran atau belanja negara (baik pusat maupun daerah).
2. Penerimaan negara (baik pusat dan atau daerah).
3. Dampak pengeluaran negara atau belanja negara dan penerimaan negara terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat bangsa atau dampak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap kehidupan masyarakat suatu bangsa.

Kesamaan antara keuangan privat dengan keuangan negara.

1. Keuangan privat atau keuangan negara berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang menyangkut pembelian, penjualan dan transaksi-transaksi yang lain.
2. Untuk membiayai kegiatan-kegiatannya, maka baik sektor keuangan privat ataupun sektor keuangan negara bisa menaikkan pinjamannya, melakukan pembayaran dan lain-lain.
3. Sektor keuangan privat ataupun sektor keuangan negara sama-sama bertujuan ingin memuaskan keinginan masyarakat.
4. Baik sektor keuangan privat ataupun sektor keuangan negara mempunyai sumber yang terbatas.

Perbedaan antara Keuangan Privat dan Keuangan Negara

a. *Keuangan privat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.*

- 1) Sektor ini harus hidup dengan sarana yang dimiliki sendiri sehingga mungkin bisa terjadi defisit apabila pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan.
- 2) Tanpa pembayaran kembali pinjaman-pinjaman sebelumnya, maka sektor keuangan privat ini akan kehilangan kepercayaan kredit di dalam pasar.
- 3) Pinjaman hanya dapat dilakukan terhadap pihak luar.
- 4) Bunga pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 5) Tidak mempunyai kemampuan untuk menciptakan/ mencetak uang.
- 6) Mengikuti *market principles*.

- 7) Merencanakan kegiatannya dengan mempertimbangkan penerimaannya lebih dahulu, kemudian pengeluarannya.

b. Keuangan negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Hidup dengan sarana yang lebih kompleks. Apabila terjadi defisit, maka negara bisa menetapkan *budget* defisit untuk mengatasinya.
- 2) Pinjaman dapat dilakukan baik ke dalam maupun ke luar negeri.
- 3) Bunga pinjaman bisa lebih rendah dibanding dengan pinjaman yang dilakukan oleh sektor swasta/sektor keuangan privat.
- 4) Mempunyai kemampuan untuk menciptakan/mencetak uang.
- 5) Mengikuti prinsip anggaran (*budget principle*).
- 6) Dalam merencanakan kegiatannya, pengeluaran ditetapkan terlebih dahulu, kemudian penerimaannya.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Buchanan mengemukakan bahwa ilmu tentang keuangan negara mempelajari tentang
 - A. penerimaan negara
 - B. pengeluaran negara
 - C. pemilihan kebijaksanaan yang mesti ditempuh
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 2) Menurut Suparmoko, keuangan negara mempelajari tentang
 - A. penerimaan negara
 - B. pengeluaran negara
 - C. pengaruh penerimaan dan pengeluaran negara terhadap perekonomian
 - D. jawaban A, B, dan C betul

- 3) Kesamaan antara keuangan negara dan keuangan privat adalah kedua-duanya berhubungan dengan
 - A. produksi
 - B. pembentukan modal
 - C. pertukaran
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 4) Sistem ekonomi modern adalah *moneytized* artinya adalah
 - A. dalam transaksi jual beli harus dilakukan dengan uang
 - B. dalam setiap pembayaran harus menggunakan uang
 - C. hampir setiap proses ekonomi mempunyai timbal balik keuangan
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 5) Salah satu ciri yang dipunyai keuangan negara ialah
 - A. bisa melakukan pembayaran
 - B. bisa menetapkan *budget* defisit
 - C. bisa melakukan pinjaman
 - D. berusaha memuaskan masyarakat
- 6) Salah satu ciri yang dimiliki keuangan privat ialah
 - A. bisa mengadakan pinjaman ke dalam
 - B. rendahnya bunga pinjaman
 - C. berorientasi pada penerimaan
 - D. mengikuti prinsip anggaran
- 7) Utang di banyak negara merupakan proporsi yang besar dalam pendapatan nasional. Hal ini sebagai akibat
 - A. meningkatnya utang-utang negara
 - B. ciri keuangan negara yang selalu dapat meningkatkan pinjamannya baik ke dalam maupun ke luar dalam setiap anggaran belanja yang disusunnya
 - C. kepercayaan kredit yang dimiliki oleh negara
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 8) Unit ekonomi privat merencanakan kegiatannya dengan memper-
timbangkan pemasukannya, kemudian pengeluarannya, sebab
 - A. memang sudah ketentuan

- B. agar tidak terjadi defisit/kerugian
- C. ciri keuangan privat mengharuskan demikian
- D. jawaban A, B, dan C benar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. Paradigma baru pengelolaan keuangan negara lahir sebagai akibat dioperasikan Undang-undang Otonomi Daerah sebagai reaksi tuntutan masyarakat yang *more democratic* dengan ditandai pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di daerah.
- 2) D. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan strategi untuk merespons tuntutan masyarakat dan memberdayakan serta mengoptimalkan sumber-sumber di daerah.
- 3) B. Pemberian otonomi daerah berarti tumbuhnya tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan rumah tangganya.
- 4) C. Reformasi keuangan daerah berhubungan dengan perubahan sumber penerimaan keuangan daerah.
- 5) D. Perubahan fundamental pengelolaan keuangan negara sebelum dan sesudah reformasi menyangkut perubahan pola yang sentralistik ke pola yang lebih desentralistik, di mana pemerintah daerah Kabupaten dan Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur pembelajaan daerah dan mengoptimalkan sumber-sumber daerah.
- 6) A. Perluasan kewenangan pemerintah daerah mempunyai konsekuensi terhadap pembiayaan rumah tangga daerah.
- 7) D. Penyelenggaraan pengelolaan keuangan publik dimaksudkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa, cita-cita reformasi dan *good governance*, dalam rangka pelayanan kepada masyarakat bangsa dan negara.
- 8) B. Reformasi sistem manajemen keuangan daerah tercermin dari Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tes Formatif 2

- 1) D. Bidang-bidang yang dipelajari keuangan negara berdasarkan definisi dari Buchanan meliputi ketiga butir A, B, dan C.
- 2) D. Bidang-bidang yang dipelajari berdasarkan definisi dari Suparmoko, meliputi ketiga butir A, B, dan C.

- 3) D. Kesamaan antara keuangan privat dan keuangan negara, antara lain tertera dalam butir A, B dan C.
- 4) C. Hampir semua proses ekonomi mempunyai timbal balik keuangan.
- 5) B. Menetapkan *budget* defisit merupakan salah satu ciri keuangan negara.
- 6) C. Pada unit ekonomi privat untuk merencanakan kegiatannya dipertimbangkan pemasukannya terlebih dahulu. Jadi, orientasi yang utama adalah penerimaan.
- 7) D. Akibat utang negara yang meningkat meliputi butir A, B, dan C.
- 8) B. Dengan mempertimbangkan pemasukannya terlebih dahulu, kemudian penerimaan maka risiko kerugian yang mengakibatkan defisit atau kerugian bisa dihindari.

Glosarium

Paradigma : pandangan-pandangan baru yang berdasarkan pada perkembangan-perkembangan dan per-geseran-pergeseran terkini (sesuai eranya).

Ruang lingkup : batas-batas cakupan materi.

Akuntabilitas public : tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sentralisasi : pemusatan keuangan pada pemerintah pusat.

Desentralisasi : penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Ahmad Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Aneka Sari Ilmu Administrasi. (1978). Staf Dosen BPA Universitas Gajah Mada.

Deddy Supriady Bratakusumah. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun (2000). *Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)*. Jakarta: Cipta Jaya.

M. Arif Djamaludin. (1977). Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran. Ghalia Indonesia.

M. Suparmoko. (1982). *Asas-asas Ilmu Keuangan Negara*. BPFE Universitas Gajah Mada.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Masgrive, Richard A., Peggy B. (1995). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

MN. Azmy Akhir. (1975). *Masalah Pengurusan Keuangan Negara, Suatu Pengantar Teknis*. Bandung: Yulianti.

R.H.A. Rachman Prawira Amidjaya. (1980). *Keuangan Negara dan Kebijakan Fiskal*. Alumni.

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2002). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2001 tentang, *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002*. (2002). Jakarta: Eko Jaya.

Undang-undang Republik Indonesia tentang, Perubahan Atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (2001). Jakarta: Panca Usaha.



Dasar dan Struktur Penerimaan Negara



PENDAHULUAN

Seperti halnya rumah tangga dalam keluarga, rumah tangga negara dalam hal ini pemerintah juga memerlukan pendapatan/ penerimaan untuk membiayai semua



kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan kewajibannya, baik dalam bidang pemeliharaan pertahanan, keamanan, keadilan, pekerjaan umum, dan lain sebagainya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan pemerintah baik di negara kapitalis maupun sosialis atau di negara maju

maupun di negara berkembang semakin lama semakin meningkat untuk melaksanakan pembangunan dan fungsi pelayanan masyarakat di negaranya masing-masing, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Sebagai konsekuensinya, maka diperlukan pembiayaan-pembiayaan atau pengeluaran pemerintah yang tidak sedikit jumlahnya, sesuai dengan semakin luasnya kegiatan pemerintah. Untuk kepentingan itulah pemerintah memerlukan penerimaan negara.

Pembahasan mengenai dasar-dasar dan struktur penerimaan negara merupakan bahasan yang erat kaitannya dengan bahasan modul-modul terdahulu. Sebab pengeluaran negara atau belanja

negara agar dapat terbiayai diperlukan pendapatan atau penerimaan negara. Pada sisi lain, sumber-sumber penerimaan semakin terbatas. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi sumber-sumber yang ada. Kajian dalam modul ini mengetengahkan dasar penerimaan negara dan struktur penerimaan negara pada tingkat pusat dan penerimaan negara daerah otonom kabupaten dan kota. Pembahasan penerimaan negara akan dilanjutkan pada modul berikutnya, yaitu pembahasan tentang pajak.

Pelaksanaan sistem desentralisasi yang lebih mengedepankan prinsip otonomi daerah menuntut semua pihak untuk melakukan perubahan (*reform*) dan pemahaman tentang tugas dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah (terutama pemerintah daerah) mempunyai kewajiban untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya secara tertib dan transparan (*good governance*) terutama dalam memenuhi pelayanan publik. Perubahan tersebut menuntut adanya perubahan dan pengelolaan keuangan negara terutama dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan. Sumber-sumber pendapatan/penerimaan negara dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu sumber-sumber yang secara umum dimiliki oleh suatu negara dan sumber-sumber dalam pengelolaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sumber-sumber yang secara umum dimiliki oleh suatu negara antara lain.

1. Pajak.
2. Retribusi.
3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara.
4. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Sumbangan masyarakat.
6. Percetakan uang kertas.
7. Hasil dan undian negara.
8. Pinjaman.
9. Hadiah.
10. Hibah.

Jika kita cermati APBN, maka sumber-sumber pendapatan negara meliputi :

1. Penerimaan pajak

- a. Pajak dalam negeri.
- b. Pajak perdagangan internasional.
2. Penerimaan negara bukan pajak
3. Penerimaan hibah

Sumber-sumber pendapatan daerah menurut Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4. Bagian daerah dari penerimaan dan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB).
5. Bagian daerah dari penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
6. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
7. Dana Alokasi Umum.
8. Dana Alokasi Khusus.
9. Pembiayaan Dekonsentrasi.
10. Pembiayaan Tugas Pembangunan.
11. Pinjaman daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, setelah mempelajari modul ini Anda diharapkan dapat menjelaskan masalah-masalah yang berkaitan dengan penerimaan negara. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, diharapkan Anda dapat menjelaskan :

1. sumber-sumber penerimaan negara (pemerintah pusat).
2. sumber-sumber penerimaan daerah.

Berkaitan dengan tujuan tersebut di atas, modul ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan belajar, yaitu :

- a. Kegiatan Belajar 1 membahas tentang dasar dan struktur penerimaan negara
- b. Kegiatan Belajar 2 membahas tentang sumber penerimaan keuangan daerah

Kajian dalam modul ini harus dikuasai dengan baik, terutama tentang dasar-dasar sumber pendapatan negara dan struktur penerimaan negara. Pemahaman ini dibutuhkan sebagai acuan untuk memahami materi kajian dalam modul-modul selanjutnya yaitu tentang pajak, anggaran pendapatan dan belanja negara dan kebijakan-kebijakan pemerintah sektor fiskal dan pinjaman pemerintah. Anda hendaknya memahami betul struktur penerimaan negara sebagai dampak diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah yang menggeser pola penerimaan negara baik untuk tingkat pusat maupun daerah.

Selamat belajar!

Kegiatan Belajar 1

Dasar dan Struktur Penerimaan Negara

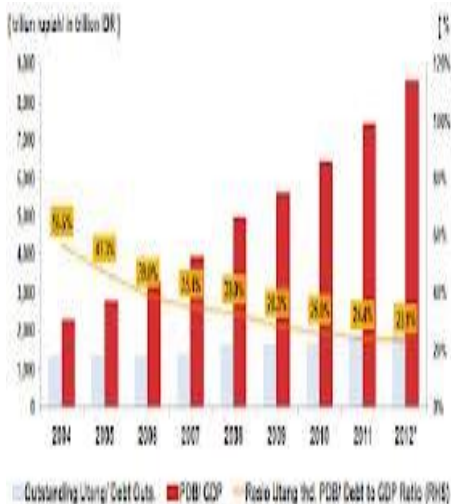
Pendapatan negara adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan lainnya yang diharapkan minimal dapat diterima dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun.



Dengan makin meningkatnya kegiatan pemerintah seiring dengan lajunya pembangunan, dalam upayanya meningkatkan kesejahteraan anggota masyarakatnya, maka dibutuhkan dana guna pembiayaan pelaksanaan pembangunan tersebut. Biaya tersebut tidaklah sedikit melainkan sesuai dengan luasnya kegiatan pemerintah.

Marilah sekarang kita lihat dari mana sumber pembiayaan kegiatan-kegiatan atau penerimaan pemerintah. Namun, sebelum kita membahas sumber-sumber penerimaan negara, akan dibahas terlebih dahulu pengertian dari penerimaan negara itu sendiri. Penerimaan negara akan diartikan sebagai penerimaan dalam arti yang seluas-luasnya, meliputi penerimaan yang diperoleh dari pajak dan dari hasil penjualan barang-barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh negara, pinjaman negara, mencetak uang dan sebagainya. Dalam kenyataannya, kita tidak dapat menarik dengan tegas batas dari macam-macam sumber penerimaan negara itu, tetapi sumber-sumber

penerimaan negara, pada dasarnya dapat kita golongan sebagai berikut.



1. Pajak.
2. Retribusi.
3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara.
4. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah.
5. Sumbangn msyarakat.
6. Percetakn uang kertas.
7. Hasil dari undian negara.
8. Pinjaman.
9. Hadiah.
10. Hibah.

Masing-masing sumber keuangan negara tersebut akan dibahas satu per satu sebagai berikut.

A. PAJAK



Dalam struktur penerimaan negara perpajakan masih merupakan primadona dan komponen terbesar dalam negeri untuk menopang pembiayaan operasional pemerintahan dan pembangunan. Di samping mampu menyediakan sumber dana bagi pembiayaan berbagai proyek penanggulangan dampak

krisis ekonomi, penerimaan perpajakan juga dapat mencegah terjadinya pembengkakan defisit anggaran. Pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja tapi untuk kepentingan negara demi tercapainya kesejahteraan di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan pajak ialah pembayaran iuran oleh rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran iuran di atas adalah antara warga negara dan pemerintah. Jadi, dalam hubungan yang bersifat hukum publik. Oleh karena bersifat hukum publik, maka pungutan tersebut bagi pemerintah paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Harus ditetapkan dengan undang-undang (peraturan lain yang sederajat dengan undang-undang) terlebih dahulu.
2. Dapat dipaksakan, dalam arti bagi orang yang tidak atau belum mau membayar dapat dikenakan upaya pemaksaan atau sanksi, seperti denda, penyitaan, dan penyanderaan.
3. Harus memenuhi persyaratan kepastian hukum, misalkan kapan harus membayar, berapa jumlahnya dan siapa saja yang harus membayar.
4. Dituntut adanya kejujuran dari si pemungut atau si pelaksana. Artinya ada jaminan bahwa pemungutan tersebut akan digunakan oleh pemerintah secara efektif, efisien, dan dikembalikan kepada masyarakat.

Dari uraian di atas dapat ditarik suatu kesimpulan mengenai ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak yang dipungut oleh negara (oleh pemerintah pusat maupun daerah) berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat diikuti oleh pembayaran pajak dan pemerintah.
3. Tujuan pemungutan pajak adalah sumber penerimaan negara.

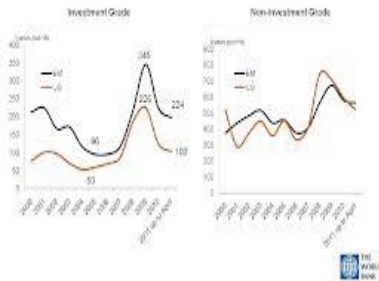
Di negara kita, pajak antara lain meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan.

B. RETRIBUSI



Maksud retribusi adalah suatu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada seseorang (dan/atau badan hukum) yang telah menikmati jasa (dan barang) pemerintah. Jadi dalam retribusi ini, kontra prestasi/balas jasa dapat secara langsung diterima dengan adanya pembayaran pungutan tersebut sehingga dalam retribusi ini berlaku asas pengecualian atau *exclusion principle*. Hal ini berarti bagi yang tidak menikmati jasa atau barang-barang pemerintah dikecualikan dari pungutan tersebut. Contoh retribusi ialah retribusi pasar, retribusi parkir, dan lain-lain.

C. KEUNTUNGAN DARI PERUSAHAAN NEGARA



Penerimaan yang berasal dari sumber ini merupakan penerimaan-penerimaan pemerintah dari keuntungan dalam penjualan barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan negara. Perusahaan negara ini dapat berbentuk persero, perum, dan perjan. Perusahaan negara tersebut dapat didirikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

D. DENDA-DENDA DAN PERAMPASAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH



Denda dan perampasan merupakan pungutan paksaan terhadap seseorang yang melanggar peraturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai badan hukum publik. Sebenarnya pemerintah tidak mengharapkan penerimaan dari sektor denda dan perampasan ini karena apabila di negara tersebut sudah tercapai keamanan, ketertiban dan ketenteraman, serta kesadaran masyarakat untuk bernegara sudah besar. Jadi, denda dan perampasan adalah upaya

[illegible]

pemerintah untuk memaksa masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran.

E. SUMBANGAN MASYARAKAT



Sumbangan masyarakat ini biasanya untuk jasa-jasa yang didirikan oleh pemerintah, seperti pembayaran biaya-biaya perizinan (*lisensi*). Sumbangan masyarakat ini harus dibedakan dengan retribusi dan perbedaan itu terletak pada balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung, yang terdapat dalam retribusi. Di dalam sumbangan masyarakat, balas jasa tidak selalu langsung diperoleh. Artinya, kita telah melakukan pembayaran (menyumbang), namun perizinan atau izin yang kita ajukan belum tentu ke luar pada saat kita membayar.

F. PENCETAKAN UANG KERTAS



Berhubung sifat dan fungsinya, maka pemerintah memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah juga mempunyai kekuasaan untuk mencetak uang kertas sendiri atau meminta kepada Bank Sentral untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah walaupun tanpa suatu deking. Pencetakan uang ini harus dijalankan secara hati-hati oleh pemerintah karena apabila kurang hati-hati percetakan uang kertas ini dapat menimbulkan inflasi.

G. HASIL DARI UNDIAN NEGARA

Dengan undian negara, pemerintah akan dapat menambah penerimaan, yaitu perbedaan antara jumlah penerimaan dari lembaran surat undian yang dapat dijual dengan semua pengeluarannya, termasuk hadiah yang diberikan kepada pemenang undian tersebut. Untuk tidak merugikan rakyat dan agar efek dari adanya undian ini menguntungkan, maka undian negara harus murah harganya sehingga untuk rakyat yang membeli, tetapi tidak memperoleh hadiah tidak merasa terlalu dirugikan, tetapi hasil dari bidang ini adalah relatif kecil.

H. PINJAMAN



Pinjaman ini dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Pinjaman yang berasal dari dalam negeri dan luar negeri dapat bersumber dari para individu dalam masyarakat, sektor perusahaan dan dari bank sentral. Pinjaman ini diperoleh, antara lain dari hasil penjualan obligasi pemerintah kepada individu-individu/lembaga-lembaga. Pinjaman-pinjaman ini bisa negara dengan negara, negara dengan badan internasional, dan antara negara dengan masyarakat dalam dan/atau luar negeri.

I. HADIAH

Sumber dana jenis ini dapat terjadi antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari swasta kepada pemerintah dan dapat pula terjadi dari pemerintah suatu negara kepada negara lain. Penerimaan negara dari sumber ini sifatnya adalah *volunteer* dengan tanpa balas jasa baik langsung maupun tidak langsung.

J. HIBAH



Hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, sumbangan swasta, dan pemerintah luar negeri.

Setelah mengetahui beberapa kemungkinan sumber penerimaan negara, marilah kita lihat sumber-sumber penerimaan negara kita. Menurut APBN, pendapatan negara dibedakan menjadi beberapa sumber seperti berikut ini.

1. Penerimaan perpajakan.
 - a. Pajak dalam negeri.

- b. Pajak perdagangan internasional.
- 2. Penerimaan bukan pajak.
 - a. Penerimaan sumber daya alam.
 - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara.
 - c. Pemerintah negara bukan pajak lainnya
- 3. Penerimaan hibah.
 - a. Sumbangan swasta dalam negeri.
 - b. Sumbangan swasta luar negeri.
 - c. Sumbangan pemerintah luar negeri.

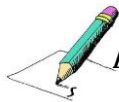
Pelaksanaan sistem desentralisasi yang lebih mengedepankan prinsip otonomi daerah, pengubah sumber-sumber keuangan daerah disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah otonom yang bertambah luas, terutama dalam memenuhi pelayanan publik. Pelaksanaan tugas dan fungsi secara tertib dan transparan (*good governance*) terutama dalam pelayanan publik diperlukan pembiayaan yang memadai. Sumber-sumber pembiayaan keuangan daerah berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut.

- 1. Pajak daerah.
- 2. Retribusi daerah.
- 3. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- 4. Bagian daerah dari penerimaan dan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB).
- 5. Bagian daerah dari penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21.
- 6. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
- 7. Dana Alokasi Umum.
- 8. Dana Alokasi Khusus.
- 9. Pembiayaan Dekonsentrasi.
- 10. Pembiayaan Tugas Pembantuan.
- 11. Pinjaman daerah.

Penjelasan secara terperinci tentang sumber-sumber pendapatan daerah akan dibahas dalam kajian lanjut dari modul ini.

Pemahaman yang diberikan dalam modul ini adalah penerapan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, karena mengubah struktur penerimaan negara. Dengan diberlakukan kedua undang-undang tersebut, penerimaan negara di tingkat pusat banyak yang sumber-sumbernya dilimpahkan ke daerah otonom kabupaten dan kota sehingga sumber-sumber keuangan daerah menjadi lebih luas dibanding dengan masa-masa sebelumnya.

Untuk menambah wawasan Anda yang berkaitan dengan uraian di atas, cobalah Anda cermati UU No 32 dan UU No.33 Tahun 2004 dan [http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_ dan_Belanja_ Negara#Sumber_penerimaan_APB_N](http://id.wikipedia.org/wiki/Anggaran_Pendapatan_dan_Belanja_Negara#Sumber_penerimaan_APB_N)



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan apa yang dimaksud dengan penerimaan negara dan mengapa dibutuhkan penerimaan negara!
- 2) Diskusikan dengan teman belajar Anda, apa perbedaan antara pajak dan retribusi, serta sumbangan masyarakat. Berilah contoh untuk masing-masing jenis tersebut!
- 3) Jelaskan mengapa terjadi pergeseran dalam sumber-sumber penerimaan negara!
- 4) Mengapa dalam mencetak uang kertas pemerintah perlu berhati-hati? Jelaskan!
- 5) Jelaskan struktur penerimaan negara berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ingatlah kembali seluruh penerimaan negara dan untuk apa saja penerimaan tersebut, misalnya untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan melaksanakan pelayanan publik.
- 2) Lihat kembali pengertian-pengertian yang terkandung dalam pajak, retribusi, dan sumbangan masyarakat. Kemudian cobalah cari perbedaan di antara ketiganya. Contoh konkret dari masing-masing jenis dapat Anda lihat dari kegiatan belajar ini atau Anda cari sendiri bacaan-bacaan yang dapat memenuhi masing-masing kriteria di atas.
- 3) Inti dari pertanyaan ini dapat Anda temukan dari pergeseran sistem pemerintahan ke arah sistem desentralisasi yang mengedepankan prinsip otonomi daerah.
- 4) Ingatlah kembali sifat dan fungsi pemerintah yang tidak dimiliki oleh para individu dalam masyarakat, yaitu dalam hal mencetak uang kertas. Apabila pencetakan uang kertas tersebut tidak dilakukan dengan hati-hati dan tanpa batas akan menyebabkan jumlah uang yang beredar makin banyak dan inflasi.
- 5) Lihat kembali Kegiatan Belajar 1, terutama tentang penggolongan sumber penerimaan negara yaitu sumber yang ada pada pemerintah pusat dan sumber-sumber keuangan di daerah.



RANGKUMAN

Dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, terutama pelaksanaan pembangunan di segala bidang diperlukan pendapatan/penerimaan negara untuk membiayai kegiatan yang makin meningkat. Pendapatan/penerimaan negara secara umum dapat digolongkan menjadi berikut ini.

1. Pajak.
2. Retribusi.
3. Keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara.
4. Denda-denda dan perampasan yang dilakukan oleh pemerintah.

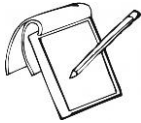
5. Sumbangan masyarakat.
6. Percetakan uang kertas.
7. Hasil dan undian negara.
8. Pinjaman.
9. Hadiah.
10. Hibah.

Di antara berbagai sumber dan melihat sifat masing-masing, penerimaan negara yang terpenting dan terbesar dari pajak. Sumber penerimaan negara kita dapat dikategorikan dalam beberapa kelompok sebagai berikut.

1. Penerimaan perpajakan
 - a. Pajak dalam negeri.
 - b. Pajak perdagangan internasional.
2. Penerimaan bukan pajak
 - a. Penerimaan sumber daya alam.
 - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara.
 - c. Pemerintah negara bukan pajak lainnya.
3. Penerimaan hibah
 - a. Sumbangan swasta dalam negeri.
 - b. Sumbangan swasta luar negeri.
 - c. Sumbangan pemerintah luar negeri.

Sumber-sumber penerimaan daerah meliputi :

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4. Bagian daerah dari penerimaan dan perolehan hak atas tanah dan atau bangunan (BPHTB).
5. Bagian daerah dari penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
6. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
7. Dana Alokasi Umum.
8. Dana Alokasi Khusus.
9. Pembiayaan Dekonsentrasi.
10. Pembiayaan Tugas Pembantuan.
11. Pinjaman daerah.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Paradigma baru keuangan negara memberikan peluang yang lebih luas kepada daerah dalam
 - A. penyelenggaraan pemerintah
 - B. pengelolaan penerimaan daerah
 - C. pengelolaan belanja daerah
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 2) Menurut sifat dan ciri-cirinya sumber penerimaan yang terpenting berasal dari
 - A. denda
 - B. pinjaman
 - C. pajak
 - D. keuntungan dari perusahaan-perusahaan negara
- 3) Menurut sifat-sifatnya, keharusan membayar parkir merupakan pembayaran
 - A. pajak
 - B. retribusi
 - C. sumbangan masyarakat
 - D. denda
- 4) Perbedaan pajak dan retribusi, antara lain disebabkan
 - A. balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk, apabila orang melakukan pembayaran
 - B. adanya *exclusion principle* yang terkandung dalam pajak
 - C. adanya *exclusion principle* yang terkandung dalam retribusi
 - D. jawaban A dan C benar
- 5) Apabila penerimaan negara yang berasal dari denda dan perampasan itu jumlahnya kecil, hal itu menunjukkan bahwa
 - A. kesadaran rakyat untuk menaati peraturan-peraturan pemerintah sudah tinggi
 - B. kemalasan petugas yang menjalankan
 - C. adanya ketenteraman, keamanan dan kesejahteraan yang tinggi di negara tersebut
 - D. jawaban A dan C benar
- 6) Perbedaan sumbangan masyarakat dan retribusi terletak pada

- A. adanya *exclusion principle* yang terkandung dalam retribusi
 - B. adanya *exclusion principle* yang terkandung dalam sumbangan masyarakat
 - C. balas jasa yang diperoleh akibat membayar retribusi otomatis secara langsung diterima
 - D. balas jasa yang diterima akibat membayar sumbangan masyarakat tidak selalu secara otomatis diterima
- 7) Pinjaman luar negeri dapat diperoleh, antara lain dengan cara
- A. menjual obligasi kepada para individu/perorangan di luar negeri
 - B. menjual obligasi pemerintah kepada Bank Sentral
 - C. jawaban A, B, dan C benar
 - D. jawaban A, B, dan C salah
- 8) Ciri-ciri pajak, antara lain
- A. ditetapkan dengan undang-undang
 - B. tidak dapat ditunjukkan adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
 - C. mengenal adanya/mengandung asas pengecualian
 - D. jawaban A dan B benar
- 9) Pembayaran karcis setiap melewati jalan tol, merupakan pembayaran
- A. pajak
 - B. retribusi
 - C. sumbangan masyarakat
 - D. denda
- 10) Penerimaan pemerintah pusat terdiri dari penerimaan
- A. pajak
 - B. bukan pajak
 - C. hibah
 - D. jawaban A, B, an C benar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Sumber Penerimaan Keuangan Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, telah memberikan kesempatan kepada setiap



Daerah di Indonesia untuk mengembangkan sendiri potensi daerah yang dimilikinya. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan ekonomi di daerah, adalah tidak mungkin perekonomian sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi diperlukan adanya peranan pemerintah dalam hal mengatur ekonomi.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa dampak perubahan yang luas dan mendasar terhadap sistem pengelolaan keuangan publik.

Kewenangan pemerintah daerah otonom menyangkut berbagai aspek pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah, mulai dari perencanaan penganggaran, pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pencapaian kinerja yang dibiayai oleh dana anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Keberhasilan pemerintah daerah otonom dalam melaksanakan kewenangan akan terlihat, antara lain dari kemudahan pemberian pelayanan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat daerah. Penganggaran pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mewujudkan keberhasilan tersebut memerlukan sumber-sumber pendanaan di daerah yang representatif.



Pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggalian sumber-sumber keuangan daerah selalu terus dan harus dioptimalkan dengan tetap berpedoman kepada Undang-undang yang mengatur masalah keuangan di daerah. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur sumber-sumber penerimaan keuangan daerah yang dapat diusahakan dan dioptimalkan pengelolaannya.

Sumber-sumber penerimaan keuangan daerah berdasarkan undang-undang tersebut di atas meliputi:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan.
4. Bagian daerah dari penerimaan dan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan (BPHTB).
5. Bagian daerah dari penerimaan PPh orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21.
6. Bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam.
7. Dana Alokasi Umum.
8. Dana Alokasi Khusus.
9. Pembiayaan Dekonsentrasi.
10. Pembiayaan Tugas Pembantuan.
11. Pinjaman daerah.

Untuk memahami masing-masing jenis sumber keuangan pemerintah daerah tersebut, berikut ini akan dijelaskan secara lebih rinci masing-masing sumber sebagai berikut.

A. PAJAK DAERAH



Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah, sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangan dengan menetapkan jenis pajak, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria pajak daerah selain yang ditetapkan undang-undang adalah sebagai berikut.

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah Daerah yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
5. Potensinya memadai.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Pajak Daerah

a. Jenis pajak provinsi

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan di atas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan dan digunakan di atas air.
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air.
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan
Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan

air bawah tanah dan/atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada di perut bumi termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

b. Jenis pajak kabupaten/kota

- 1) *Pajak hotel*, yaitu pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, *kecuali* untuk pertokoan dan perkantoran.
- 2) *Pajak restoran*, yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau *catering*.
- 3) *Pajak hiburan*, yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
- 4) *Pajak reklame* adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, *kecuali* yang dilakukan oleh pemerintah.
- 5) *Pajak penerangan jalan* adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut

tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

- 6) *Pajak pengambilan bahan galian golongan C* adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) *Pajak parkir* adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

B. RETRIBUSI DAERAH



Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Jenis-jenis retribusi

a. Jasa umum :

1) Retribusi pelayanan kesehatan.

Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan dan Rumah Sakit Umum Daerah. Dalam

retribusi pelayanan kesehatan ini, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.

- 2) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi pengambilan, pengangkutan dan pembuangan serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan sampah rumah tangga, dan perdagangan, tidak termasuk pelayanan kebersihan jalan umum dan taman.
- 3) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
Akta catatan sipil meliputi akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.
- 4) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat meliputi pelayanan penguburan/ pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah daerah.
- 5) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ke tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah.
- 6) Retribusi pelayanan pasar
Pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah dan khususnya disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- 7) Retribusi pengujian kendaraan bermotor
Pelayanan pengujian kendaraan bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 8) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran

Pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau perizinan oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Peta adalah peta yang dibuat oleh pemerintah daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik dan peta teknis (struktur).

10) Retribusi pengujian kapal perikanan

Pelayanan pengujian kapal perikanan adalah pengujian terhadap kapal penangkap ikan yang menjadi kewenangan daerah.

Jenis retribusi jasa umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah.

b. Retribusi jasa usaha

1) Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/ alat-alat besar milik daerah. Tidak termasuk dalam pengertian pelayanan pemakaian kekayaan daerah dengan penggunaan tenaga yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, seperti pemancangan tiang listrik, telepon maupun penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

2) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan

Pasar grosir dan/atau pertokoan adalah pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/ diselenggarakan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

3) Retribusi tempat pelelangan

Tempat pelelangan adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan. Termasuk dalam

pengertian tempat pelelangan adalah tempat yang dikontrak oleh pemerintah daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

- 4) Retribusi terminal
Pelayanan terminal adalah tempat pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dengan ketentuan ini, pelayanan peron tidak dipungut retribusi.
- 5) Retribusi tempat khusus parkir
Pelayanan tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- 6) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/vila
Pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila milik daerah adalah penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- 7) Retribusi penyedotan kakus
Pelayanan penyedotan kakus adalah pelayanan penyedotan kakus/ jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
- 8) Retribusi rumah potong hewan
Pelayanan rumah potong hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 9) Retribusi pelayanan pelabuhan kapal
Pelayanan pelabuhan kapal adalah pelayanan pada pelabuhan kapal perikanan dan/atau bukan kapal perikanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan kapal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

10) Retribusi taman rekreasi dan olahraga

Pelayanan tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

11) Retribusi penyeberangan di atas air

Pelayanan penyeberangan di atas air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di atas air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

12) Retribusi pengolahan limbah cair

Pelayanan pengolahan limbah cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang dikelola dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang dikelola oleh badan usaha milik daerah dan pihak swasta.

13) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

Penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah, antara lain, bibit/ benih tanaman, bibit ternak, dan bibit/benih ikan, tidak termasuk penjualan produksi usaha Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah.

c. Retribusi perizinan tertentu

1) Retribusi izin mendirikan bangunan

Izin mendirikan bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, termasuk dalam pemberian izin ini adalah kegiatan peninjauan desain dan pemantapan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang yang berlaku, dengan tetap memperhatikan Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol

Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

3) Retribusi izin gangguan

Izin gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.

4) Retribusi izin trayek

Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan usaha untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu. Pemberian izin oleh pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing daerah.

Dengan peraturan daerah dapat ditetapkan jenis retribusi lainnya sesuai kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang. Jenis retribusi lainnya, misalnya penerimaan negara bukan pajak yang telah diserahkan kepada daerah.

Cobalah Anda tuliskan perbedaan pajak daerah dan retribusi daerah!

.....
.....

C. BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikenakan atas bumi atau bangunan. Subjek pajak dalam PBB adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Objek pajaknya adalah bumi dan/atau bangunan. Pengertian bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan dibagi dengan perimbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah. Bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90% sebagaimana dimaksud di atas dibagi dengan perincian sebagai berikut.

1. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Provinsi.
2. 64,8% (enam puluh empat koma delapan persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening Kas Daerah Kabupaten/Kota.
3. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan dan disalurkan ke rekening Kas Negara dan Kas Daerah.

Selanjutnya 10% (sepuluh persen) dibagikan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran berjalan. Besarnya alokasi pembagian tersebut diatur sebagai berikut.

1. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata dengan porsi yang sama besar kepada seluruh kabupaten/kota.
2. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten/kota yang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor pedesaan dan perkotaan berhasil melampaui

rencana penerimaan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian daerah provinsi sebesar 16,2% dan daerah kabupaten/kota sebesar 64,8% serta bagian pemerintah pusat sebesar 10% yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Biaya pemungutan sebesar 9% dibagikan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan Daerah.

D. BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN BPHTB



Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Tarif pajaknya adalah sebesar 5% dari Dasar Pengenaan Pajak, yaitu Nilai Perolehan Objek Pajak.

Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut adalah hak atas tanah, termasuk pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Hak atas tanah dimaksud adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Milik atas satuan rumah susun, dan hak pengelolaan.

Penerimaan Negara dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

Bagian daerah dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebesar 80% di atas dibagi untuk daerah dengan perincian sebagai berikut.

- a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke rekening kas daerah provinsi.
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten/kota penghasil dan disalurkan ke rekening kas daerah kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian hasil penerimaan BPHTB di atas dan penyalurannya diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah tentang Pembagian Hasil Penerimaan BPHTB antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan keputusan Menteri Keuangan yang menindaklanjuti Peraturan Pemerintah tersebut.

Hasil penerimaan BPHTB bagian daerah dan bagian pemerintah pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten/kota merupakan pendapatan daerah dan sikap tahun anggaran dicantumkan dalam APBD.

E. BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PPH ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PPH PASAL 21



Pajak penghasilan Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dipotong oleh pemberi kerja atas penghasilan yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 21 yang bersifat final dan setoran akhir tahun.

Berdasarkan Pasal 31 C UU Pajak Penghasilan, penerimaan negara dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dipotong oleh pemberi kerja dibagi dengan perimbangan 80% untuk Pemerintah Pusat dan 20% untuk Pemerintah Daerah tempat Wajib Pajak terdaftar.

Bagian penerimaan pemerintah daerah sebesar 20% dibagi antara daerah provinsi dan daerah Kabupaten/Kota dengan perimbangan sebagai berikut.

- 1.40% untuk daerah provinsi.
- 2.60% untuk kabupaten / kota.

Pengalokasian bagian penerimaan Pemerintah Daerah kepada masing-masing daerah kabupaten/kota diatur berdasarkan usulan gubernur dengan pertimbangan faktor-faktor jumlah penduduk, luas wilayah, serta faktor-faktor lainnya yang relevan dalam rangka pemerataan.

Bagian penerimaan Pemerintah Daerah tersebut di atas merupakan Pendapatan Daerah untuk masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dan setiap tahun anggaran dicantumkan dalam APBD.

F. BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN SUMBER DAYA ALAM

Maksud dari bagian daerah dari penerimaan sumber daya alam adalah bagian daerah dari penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam, antara lain di bidang pertambangan umum, pertambangan minyak dan gas alam, kehutanan, dan perikanan.



Penerimaan negara dari sumber daya alam sektor kehutanan, sektor pertambangan umum dan sektor perikanan dibagi dengan perimbangan 20% (dua puluh persen) untuk pemerintah pusat dan 80% (delapan puluh persen) untuk daerah.

Untuk mempermudah pemahaman Anda tentang bagian daerah (dana bagi hasil), perhatikanlah tabel berikut:

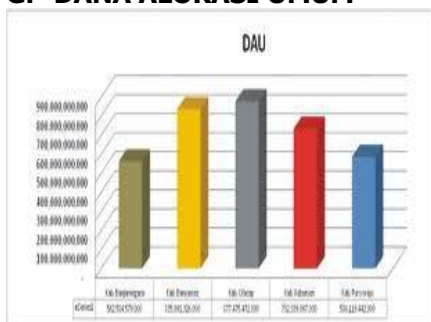
Sumber DBH	Pemerintah Pusat	Provinsi	Kabupaten/Kota	Keterangan
PBB	10 %	16,2%	64,8%	9% biaya pungut
BPHTB	20%	16%	64%	

PPH Ps 25 & 29 wajib pajak orang pribadi dlm negeri & ps 21	80%	8%	12%	
Kehutanan	20%			
a.Iuran HPH		16%	64%	
b.ProvisiSDH		16%	32%	Kab/Kot penghasil
			32%	Kab/Kot lain se- provinsi
c. Dana Reboisasi	60%		40%	

Pertambangan Umum	20%			
a. Landrent		16%	64%	
b. Royalti		16%	32%	Kab/Kot penghasil
			32%	Kab/Kot lain se-provinsi
Perikanan	20%		80%	Seluruh kab/kot
Pertambangan minyak bumi	84,5%	3%	6%	Kab/Kot penghasil
			6%	Kab/Kot lain se-provinsi
		0,1%	0,4%	Utk menambah anggaran pend.dasar
Pertambangan	69,5%	6%	12%	Kab/Kot

Gas bumi		0,1%	12% 0,4%	Penghasil Kab/kot lain se- provinsi Utk menambah anggaran pend.dasar
Pertambangan Panas Bumi	20%	16%	32% 32%	Kab/Kot Penghasil Kab/kot lain se- provinsi

G. DANA ALOKASI UMUM



Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum ini ditetapkan sepenuhnya

nya oleh daerah.

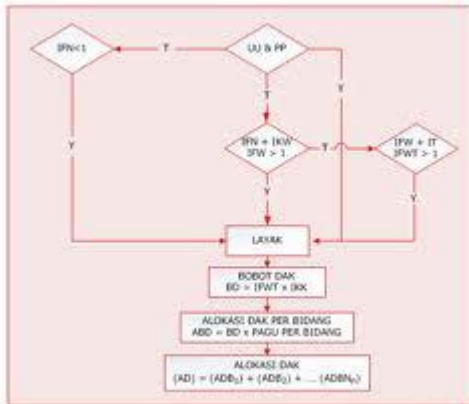
Termasuk di dalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD, harus tetap dalam kerangka pencapaian tujuan pemberian otonom kepada daerah, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Besarnya dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Penerimaan Dalam Negeri yang ditetapkan dalam APBN. Maksud dengan penerimaan dalam negeri adalah penerimaan negara yang berasal dari pajak dan bukan pajak setelah dikurangi dengan penerimaan negara yang dibagihasilkan kepada daerah.

Dana Alokasi Umum ini merupakan seluruh alokasi umum untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Kenaikan Dana Alokasi Umum akan sejalan dengan penyerahan dan pengalihan kewenangan pemerintah dan pengalihan kewenangan pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

H. DANA ALOKASI KHUSUS

Dana alokasi khusus adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu. Dana alokasi khusus merupakan bagian dari dana perimbangan sesuai dengan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.



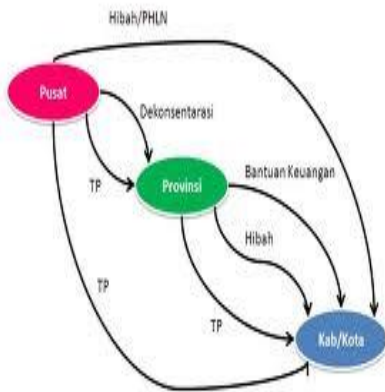
Besaran Alokasi DAK

Pengalokasian Dana Alokasi Khusus memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, berarti bahwa besaran Dana Alokasi Khusus tidak dapat dipastikan setiap tahunnya.

Dana Alokasi Khusus digunakan khusus untuk membiayai investasi pengadaan dan atau peningkatan prasarana dan sarana fisik dengan umur ekonomis yang panjang. Dalam keadaan tertentu Dana Alokasi Khusus dapat membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun.

I. PEMBIAYAAN DEKONSENTRASI

Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Hal yang dimaksudkan sebagai Daerah tertentu adalah daerah-daerah yang mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus.



Dekonsentrasi merupakan salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem pemerintah Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pengertian Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Kewenangan ini harus disertai dengan pembiayaan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan tersebut. Daerah/gubernur mempunyai kewenangan untuk mengelolanya mulai dari pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan standar, norma dan kebijakan pemerintah. Penyelenggaraan wewenang dalam rangka dekonsentrasi dilaksanakan oleh dinas provinsi. Penggunaan asas dekonsentrasi dimaksudkan untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum serta untuk menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta antardaerah.



Contoh alokasi dana dekonsentrasi

Biaya untuk penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada gubernur dan /atau perangkat pusat di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara sesuai besarnya kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan. Penentuan besaran biaya ini dilakukan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri teknis dan/atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen, gubernur dan/atau perangkat pusat di daerah yang mendapat pelimpahan wewenang.

Menteri teknis adalah menteri yang memberikan pelimpahan kepada gubernur dan/atau perangkat pusat di daerah penganggaran dan pengelolaan keuangan dalam penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dilakukan secara terpisah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan kepada gubernur dan/atau perangkat pusat di daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dalam keadaan mendesak untuk keselamatan masyarakat luas dan stabilitas sosial, instansi yang mengemban kewenangan yang dilimpahkan untuk menangani masalah yang dihadapi tidak tersedia biaya yang mencukupi, wajib berkoordinasi dengan gubernur untuk mengatasinya. Keadaan mendesak adalah suatu keadaan dan situasi di lapangan yang memerlukan penanganan secepatnya, seperti terjadinya gangguan, ancaman, akibat benda yang menyebabkan terganggunya keselamatan masyarakat luas dan stabilitas sosial sehingga fungsi pemerintahan tidak dapat dilaksanakan.

Gubernur wajib mengupayakan secepatnya tersedianya biaya yang dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

1. Melaporkan secepatnya kepada pemerintah mengenai keadaan mendesak tersebut dan biaya yang diperlukan untuk dapat disediakan. Sebelum melaporkan kepada pemerintah, gubernur terlebih dahulu melakukan evaluasi untuk menentukan keadaan mendesak melalui koordinasi dengan instansi terkait dan musyawarah pimpinan daerah.
2. Meminjam dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuannya dalam hal biaya dari pemerintah belum tersedia. Sepanjang biaya yang tersedia pada instansi bersangkutan tidak mencukupi, gubernur wajib mengupayakannya, antara lain dapat dilakukan dengan meminjam dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah terlebih dahulu berkonsultasi dengan pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan, Pinjaman ini wajib diganti oleh pemerintah selambat-lambatnya pada tahun anggaran berikutnya.

Untuk menyikapi upaya gubernur di atas, pimpinan DPRD dalam kesempatan pertama mengadakan rapat paripurna khusus untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta mewajibkan gubernur untuk mempertanggungjawabkannya.

Jika dalam pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan menghasilkan penerimaan maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan negara dan wajib disetor ke Kas Negara. Demikian pula jika terdapat saldo lebih anggaran pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan maka saldo tersebut disetor ke Kas Negara.

J. PEMBIAYAAN TUGAS PEMBANTUAN



Tugas pembantuan merupakan salah satu cara dalam penyelenggaraan sistem pemerintah Negara Republik Indonesia. Sesuai dengan Pasal 1 huruf i Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Pengertian Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Jika tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia Pemerintah desa berhak untuk menolak melaksanakan tugas pembantuan. Seperti halnya dalam asas Dekonsentrasi Penggunaan asas Tugas Pembantuan yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan umum.

Penyelenggaraan tugas pembantuan diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001. Dalam penjelasan Umum PP ini dinyatakan bahwa pembagian wilayah administrasi pemerintahan di Indonesia berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 beserta penjelasannya menegaskan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah yang lebih kecil, dengan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.

Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan desa serta penugasan dari provinsi dan kabupaten kepada desa untuk menyelenggarakan urusan

pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas. Tugas ini diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.



Tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada daerah dan desa, meliputi sebagian tugas bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama dan kewenangan bidang lain, yakni kebijaksanaan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarisasi nasional.

Contoh peruntukkan dana tugas pembantuan

Tugas pembantuan yang diberikan oleh provinsi sebagai daerah otonom kepada desa meliputi sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta sebagian

tugas pemerintahan dalam bidang tertentu lainnya, termasuk juga sebagian tugas pemerintahan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota, sedangkan sebagai wilayah administrasi mencakup sebagian tugas dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.

Sekarang, cobalah Anda identifikasi kesamaan dan perbedaan antara dana dekonsentrasi dengan dana tugas pembantuan pada tabel berikut!

Kesamaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	Perbedaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
.....
.....

K. PINJAMAN DAERAH

Timbulnya pinjaman daerah merupakan konsekuensi dari meningkatnya kebutuhan dana (*fiscal needs*) untuk melayani masyarakat yang juga meningkat sebagai alat perkembangan penduduk dan ekonomi. Adanya peningkatan pelayanan tersebut tentu membutuhkan dana, namun tidak dapat diimbangi dengan ketersediaan dana (*fiscal capacity*). Hal ini akan menimbulkan *fiscal gap* yaitu perbedaan antara *fiscal needs* dan *fiscal capacity* tersebut yang harus ditutupi, antara lain melalui pinjaman daerah.



Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang dicatat dan dikelola dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

Dana pinjaman merupakan pelengkap dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada dan ditujukan untuk membiayai pengadaan prasarana daerah atau harta tetap ini yang berkaitan dengan kegiatan yang bersifat meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk mengembalikan pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat. Selain itu, daerah dimungkinkan pula melakukan pinjaman dengan tujuan lain, seperti mengatasi masalah jangka pendek yang berkaitan dengan arus kas daerah.

Pinjaman daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan daerah karena dapat menimbulkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun-tahun berikutnya yang cukup berat sehingga perlu didukung dengan keterampilan perangkat daerah dalam mengelola Pinjaman Daerah.

Selain dari dalam negeri, daerah dapat juga melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat. Mekanisme pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat mengandung pengertian bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi dari berbagai aspek mengenai dapat tidaknya usulan pinjaman daerah untuk diproses lebih lanjut. Dengan demikian, pemrosesan lebih lanjut usulan pinjaman daerah secara tidak langsung sudah mencerminkan persetujuan pemerintah pusat atas usulan termaksud. Pinjaman daerah dari luar negeri ini dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral. Pinjaman bilateral adalah pinjaman yang berasal dari negara tertentu. Sedangkan pinjaman multilateral adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan internasional, seperti *World Bank*, *Asian Development Bank*, *Islamic Development Bank*.

Jika Anda ingin menambah wawasan tentang sumber penerimaan keuangan daerah, Anda dapat mengunjungi <http://www.keuagandaerah.net/>



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Diskusikan dengan kelompok belajar Anda tentang pergeseran penerimaan negara. Bandingkan saat pemerintahan Orde Baru dengan saat dioperasionalisasikan Undang-undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah!
- 2) Diskusikan pula dengan kelompok belajar Anda, mengapa kajian tentang penerimaan negara sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi negara terutama dalam pelayanan publik!
- 3) Mengapa kajian tentang pengelolaan sumber-sumber keuangan perlu dibedakan antara sumber-sumber untuk pemerintah pusat dan sumber-sumber keuangan daerah?Jelaskan!
- 4) Jelaskan macam-macam dan jenis-jenis sumber keuangan daerah kabupaten dan kota!
- 5) Untuk kepentingan apa pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah perlu dioptimalkan?

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Pelajari sumber-sumber keuangan negara saat pemerintahan Orde Baru dan sumber-sumber keuangan negara dan pengelolaannya berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemudian bandingkan antara keduanya.
- 2) Pelajari kembali tugas dan fungsi negara dan dampak penyelenggaraan tugas dan fungsi negara tersebut.

- 3) Untuk menjelaskan perbedaan kajian antara sumber-sumber keuangan di pusat dan di daerah, Anda dapat mencermati esensi pelaksanaan otonomi daerah.
- 4) Pelajari kembali uraian tentang pelaksanaan otonomi daerah yang erlu ditopang dengan sumber-sumber yang memadai.
- 5) Hubungkan penyelenggaraan otonomi di daerah dan dampak finansial dari tugas tersebut.



RANGKUMAN

Sebagai salah satu bagian dari keuangan negara, keuangan Daerah akhir-akhir ini sangat marak dibicarakan dan bahkan cenderung menuju suatu euforia. Hal ini tidak terlepas dari pemberlakuan dua undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kehadiran dua undang-undang tersebut menjadi momentum penting dari era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang saat ini menjadi isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meskipun perlu adanya penyempurnaan atas kedua undang-undang tersebut. Maraknya pelaksanaan otonomi daerah ini juga tidak terlepas dari langkah dan tuntutan *reformasi* di berbagai bidang.

Agar pelaksanaan otonomi daerah dapat direalisasikan, maka perlu ditopang sumber-sumber keuangan dalam rangka pendanaan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi pemerintahan di daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka sumber-sumber keuangan daerah dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Pajak Daerah.
2. Retribusi Daerah.
3. Bagian Daerah dan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Bagian Daerah dari Penerimaan MPHTB.
5. Bagian Daerah dari Penerimaan PPh Orang Pribadi dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

6. Bagian Daerah dari Penerimaan Sumber Daya Alam.
7. Dana Alokasi Umum.
8. Dana Alokasi Khusus.
9. Dana Kontingensi.
10. Pembiayaan Dekonsentrasi.
11. Pembiayaan Tugas Pembantuan.
12. Pinjaman Daerah.



TES FORMATIF 2

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Pajak daerah adalah
 - A. iuran wajib masyarakat kepada negara
 - B. iuran wajib masyarakat yang tanpa imbalan langsung dan seimbang
 - C. iuran paksa masyarakat kepada negara
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 2) Berikut yang termasuk pajak pusat adalah
 - A. bumi dan bangunan
 - B. parkir
 - C. reklame
 - D. hotel
- 3) Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan disebut
 - A. pajak
 - B. retribusi
 - C. bagi hasil
 - D. layanan publik
- 4) Sumber keuangan daerah dibutuhkan karena
 - A. tuntutan *reformasi*
 - B. untuk pendanaan otonomi daerah
 - C. untuk operasionalisasi kepala daerah

- D. untuk membayar gaji pegawai daerah
- 5) Dana alokasi umum adalah dana
- A. yang asalnya dari APBN
 - B. untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi
 - C. yang diupayakan untuk pemerataan kemampuan daerah
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 6) Dana alokasi khusus adalah dana yang
- A. dialokasikan kepada daerah oleh pusat untuk membiayai kebutuhan tertentu
 - B. disyaratkan dalam undang-undang otonomi
 - C. dialokasikan untuk wilayah-wilayah perbatasan
 - D. dialokasikan untuk daerah konflik
- 7) Pembiayaan desentralisasi adalah dana
- A. untuk penyelenggaraan dekonsentrasi
 - B. pusat untuk daerah
 - C. penyelenggaraan tugas-tugas daerah
 - D. penyelenggaraan pemilihan kepala daerah
- 8) Pinjaman daerah adalah
- A. syarat penyelenggaraan otonomi
 - B. pinjaman pemerintah untuk penyelenggaraan pelayanan
 - C. utang pemerintah daerah baik dalam negeri maupun luar negeri
 - D. utang pemerintah RI kepada badan keuangan internasional

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik
70 - 79% = cukup
< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) D. Paradigma baru keuangan publik memberikan peluang yang luas pada penyelenggaraan otonomi daerah mulai dari penyelenggaraan pemerintahan pengelolaan penerimaan dan belanja negara.
- 2) C. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar baik di pusat maupun di daerah.
- 3) B. Kontra prestasi dapat langsung dinikmati oleh yang membayar parkir.
- 4) D. Retribusi mengenal *exclusion principle* dan balas jasanya akibat membayar iuran dapat secara langsung ditunjuk.
- 5) D. Kesadaran rakyat yang tinggi untuk menaati peraturan menciptakan ketenteraman, keamanan dan kesejahteraan yang tinggi di suatu negara. Hal ini berakibat penerimaan negara dari denda dan rampasan menjadi kecil.
- 6) D. Kenyataannya sumbangan masyarakat tidak secara otomatis menerima balas jasa dari pemerintah, seperti pada retribusi
- 7) A. Pinjaman luar negeri, antara lain dapat diperoleh dengan cara menjual obligasi kepada para individu di luar negeri.
- 8) D. Ciri pajak memang, antara lain ditetapkan oleh Undang-undang dan balas jasa/kontra prestasinya tidak dapat langsung ditunjukkan.
- 9) D. Dengan melewati jalan tol, sudah merasakan manfaatnya. (Kontra prestasi terlihat langsung).
- 10) D. penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan hibah, semuanya merupakan jenis sumber penerimaan pemerintah pusat berdasarkan klasifikasi dari APBN.

Tes Formatif 2

- 1) D. Pajak adalah iuran pokok masyarakat kepada negara/pemerintah dengan tanpa balas jasa/imbalan yang langsung dapat ditunjuk.
- 2) A. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat yang hasilnya dibagi antara pusat dan daerah atas dasar Undang-undang No. 33 Tahun 2004.
- 3) B. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa dan/atau izin tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat baik sebagai pribadi atau untuk sebuah badan.
- 4) B. Sumber-sumber keuangan daerah dibutuhkan untuk membiayai pelaksanaan desentralisasi dan diupayakan untuk pemerataan kemampuan daerah.
- 5) D. Dana alokasi umum adalah dana dari APBN untuk membiayai pelaksana desentralisasi dan diupayakan untuk pemerataan kemampuan daerah.
- 6) A. Dana yang dialokasikan oleh pusat kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu.
- 7) A. Pembiayaan dekonsentrasi dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan dekonsentrasi.
- 8) C. Pinjaman daerah adalah pinjaman atau utang yang dilakukan oleh pemerintah daerah baik kepada luar negeri atau utang kepada lembaga atau masyarakat di dalam negeri.

Glosarium

1. *Pajak Daerah* : adalah iuran paksa masyarakat kepada pemerintah (negara) dengan kontra prestasi yang tidak dapat ditunjuk secara langsung yang dilaksanakan di daerah.
2. *Retribusi* : Retribusi adalah iuran masyarakat kepada negara dengan kontra prestasi yang langsung dapat ditunjuk.

Daftar Pustaka

_____. (1984). *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1974/1985 – 1988/1989*. Buku I. Jakarta: Percetakan Negara RI.

Ahmad Yani. (2002). *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Brotodiharjo, Santoso. (1958). *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Fresco NV.

Deddy Supriady Bratakusumah. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2000. (2000). *Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah)*. Jakarta: Cipta Jaya.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Masgrive, Richard A., Peggy B. (1995). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. (2002). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Soetrisno. (1981). *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE, GAMA.

Suhadi M dan J.B. Judono. (1971). *Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: LPEM, FE UI.

Suparmoko. (1984). *Asas-asas Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE GAMA.

Syamsi, Ibnu. (1983). *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2001 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002*. Jakarta: Eko Jaya, Jakarta, 2002.

Undang-undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2001). Jakarta: Panca Usaha.



Kebijakan Keuangan Negara di Indonesia

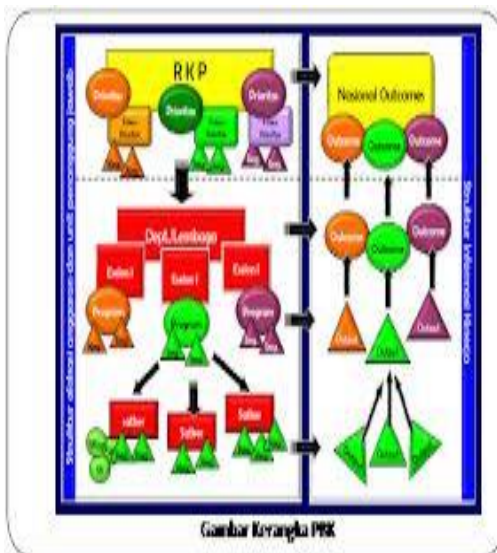


PENDAHULUAN



ekonomi Indonesia diprediksi akan stabil di tengah krisis ekonomi global yang saat ini tengah melanda hampir di

sebagian besar daratan Eropa. Tahun 2012 ini ekonomi Indonesia diyakini bisa tumbuh 6,5%, kalau pemerintah Indonesia mampu mengelola inflasi, menjaga tren peningkatan investasi, dan memproteksi pasar domestik. Meskipun tugas ini sangat berat bagi pemerintah, di tengah penyelenggaraan nega-ra yang sangat syarat dengan praktek korupsi.



Mega korupsi melanda hampir untuk proyek-proyek besar pemerintah, seperti kasus korupsi Wisma Atlet, kasus korupsi Hambalang dan masih banyak lagi. Pertumbuhan dan keberlangsungan ekonomi

Indonesia ditentukan oleh banyak faktor domestik, termasuk faktor birokrasi. Pemerintah harus serius memangkas birokrasi dan mempercepat konektivitas antarwilayah, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan menjaga keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pencairan anggaran tepat waktu yang akan mengurangi ekonomi biaya tinggi, harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Sumber ekonomi biaya tinggi adalah birokrasi, korupsi dan infrastruktur. Rente pelayanan, korupsi dan ekonomi biaya tinggi terjadi hampir di semua tingkatan pemerintahan, dari tingkat pusat sampai di lini-lini pemerintahan. Apabila pemerintah mampu menyelesaikan masalah krusial tersebut di atas pertumbuhan ekonomi akan terjaga.



Prediksi ekonomi Indonesia yang tumbuh membaik juga ditopang oleh tingkat konsumsi domestik. Bahkan sektor konsumsi domestik ini menjadi andalan utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu negeri ini harus mampu menyelesaikan berbagai hambatan yang menggerus daya beli dan kemampuan masyarakat. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan ASEAN Latin Business Forum 2012 mengatakan keyakinannya tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 dan 2013 sebesar 6,5 %.

Proyeksi ini realistis didasarkan pada kenyataan pada kondisi puncak krisis keuangan global 2008 yang pada saat itu ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 4,5 %. Sejak saat itu ekonomi Indonesia terus tumbuh dan meningkat, sedangkan ratio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) berkurang dari 77% di tahun 2001 turun menjadi 24 % di tahun 2012. Statistik ini menyebabkan kenaikan peringkat kredit Indonesia di mata dunia. Bahkan pada tahun 2012 Indonesia mampu meminjamkan dana yang cukup besar kepada IMF

untuk membantu pemulihan ekonomi global khususnya terhadap negara-negara Eropa seperti Yunani.



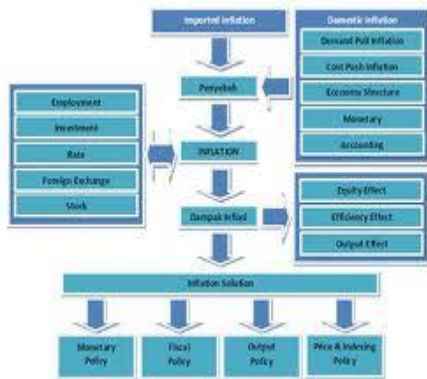
Dalam analisa yang lain posisi Indonesia dikatakan memburuk, dan masuk dalam urutan 63 Indeks Negara Gagal dunia (dipublikasikan di Washington DC Amerika Serikat pada Senin 08 Juni 2012). Dalam analisa itu dikatakan bahwa setelah sempat membaik dalam beberapa tahun terakhir, posisi Indonesia kembali memburuk dalam daftar Indeks Negara Gagal 2012.

Dalam kerangka memperbaiki kinerja perekonomian negara, maka penting diambil kebijakan pemerintah dalam sektor keuangan. Kebijakan-kebijakan itu dimaksudkan untuk mendongkrak kinerja keuangan negara, dan mengembalikan arah kebijakan keuangan untuk berpihak kepada kepentingan publik, kepentingan masyarakat, kepentingan nasional yang tentu saja berbasis pada kondisi lokal Indonesia. Kebijakan-kebijakan keuangan negara diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal Indonesia seiring dengan perkembangan global.

Sebelum Anda lanjutkan, saksikan terlebih dahulu audio visual dengan judul :

1. Indikator ekonomi perlu diubah, yang dikutip dari <http://www.youtube.com/watch?v=B6NNcAYw3do>
2. Perekonomian Indonesia tahun 2012, yang dikutip dari <http://www.youtube.com/watch?v=W4HLoAdbD18>

Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, fungsi pelayanan publik dan usaha-usaha peningkatan kapasitas dan kinerja ekonomi nasional akan terus dilakukan oleh pemerintah. Sebagai konsekuensinya, segala kegiatan, upaya dan aktivitas negara tersebut diperlukan pembiayaan dalam realisasi dan pelaksanaannya. Dalam modul-modul terdahulu telah diuraikan bahwa sumber-sumber pendanaan kegiatan pemerintah berasal dari berbagai sumber, yaitu sumber-sumber dari dalam negeri (pendapatan pajak dan dari sumber daya alam), sumber dari luar negeri dan bentuk devisa yang masuk ke Indonesia sebagai hasil neto kegiatan ekspor-impor barang dan jasa, juga berupa modal asing dalam bentuk pinjaman atau hibah.



Dalam rangka pengelolaan sumber dana tersebut dilakukan berbagai kebijakan, yaitu kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan neraca pembayaran serta kebijakan anggaran. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan secara berimbang dan saling melengkapi satu sama lain.

Oleh karena itu, materi kebijakan keuangan negara meliputi kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan keuangan publik atau *government policy*. Pembahasan materi ini sangat berkaitan dengan kebijakan keuangan negara yang manifestasinya tercermin dalam anggaran pemerintah (*government budget*), dan sangat erat kaitannya dengan materi pengeluaran negara, penerimaan negara serta pengelolaan sumber-sumber keuangan termasuk di dalamnya sistem perpajakan yang semuanya sudah disajikan dalam Modul 1 sampai dengan Modul 8 Administrasi Keuangan Negara.

Kebijakan keuangan negara di Indonesia diarahkan untuk menciptakan stabilisasi keuangan negara melalui berbagai kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan anggaran negara. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan *government budget*

yang manifestasinya berupa pengaturan-pengaturan keuangan negara melalui instrumen-instrumen pajak atau pengeluaran pemerintah (dalam hal ini pengeluaran pembangunan).

Sementara itu, kebijakan fiskal dalam anggaran pemerintah (*government budget*) adalah penerapan berbagai sistem anggaran sesuai kondisi keuangan publik saat itu, *expansionary fiscal policy* di tempat saat kondisi perekonomian lesu. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan pajak tetap atau pengeluaran pemerintah tetap dan pajak diturunkan dan atau pengeluaran pemerintah naik dan pajak diturunkan dengan model anggaran *defisit* (*defisit spending*). Dalam kondisi perekonomian bergairah/tumbuh ditempuh kebijakan *fiscal* ketat (*tight fiscal policy* dan *reduced fiscal policy*) dengan *surplus spending fiscal policy* atau *surplus budget*, yaitu anggaran belanja *surplus* yang ditandai dengan total pendapatan dalam negeri lebih besar dibanding total pengeluaran pemerintah. Strategi yang ditempuh adalah menurunkan jumlah pengeluaran pemerintah dan pajak tetap atau pengeluaran pemerintah tetap dan pajak dinaikkan atau menurunkan pengeluaran pemerintah sekaligus meningkatkan pajak.

Dengan demikian, setelah mempelajari modul ini diharapkan Anda dapat menganalisis masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara dengan tepat. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, Anda diharapkan mampu

1. membedakan macam-macam kebijakan keuangan negara yang biasa dilaksanakan oleh sebagian besar negara.
2. menganalisis kebijakan-kebijakan keuangan negara yang telah dan akan dilaksanakan di Indonesia.

Materi kebijakan keuangan negara harus dikuasai dengan terlebih dahulu menguasai materi-materi yang sudah tersaji dalam Modul 1 sampai dengan Modul 8 yang berkaitan dengan anggaran pemerintah, pengeluaran negara, penerimaan negara dan pengelolaan sumber-sumber keuangan, perpajakan, utang dan prinsip-prinsip yang menyertai masing-masing pokok bahasan.

Berdasarkan tujuan tersebut, modul ini terdiri dari 3 (tiga) kegiatan belajar, yaitu:

- a. Kegiatan belajar 1 membahas tentang kebijakan fiskal

- b. Kegiatan belajar 2 membahas tentang kebijakan moneter
- c. Kegiatan belajar 3 membahas tentang kebijakan keuangan internasional

Selamat belajar!

Kegiatan Belajar 1

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan



pengeluaran negara. Kebijakan fiskal ini dilaksanakan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama. Misalnya, dalam rangka meningkatkan kenyataan yang tercermin dalam Indeks Nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012 yang tidak efisien saat ini, pemerintah perlu mengambil kebijakan fiskal untuk memperbaikinya.

Bermacam-macam kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan diprioritaskan pada program-program yang dapat memperbaiki kinerja APBN, kemudian langkah selanjutnya pemerintah akan menyusun anggarannya.

Institute for Development of Economic and Finance menilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 tidak efisien. Kajian ini didasarkan pada fakta bahwa seperempat anggaran dalam APBN digunakan untuk membayar bunga utang, seperempatnya lagi untuk membayar subsidi BBM (lihat penjelasan APBN 2012), dan sebagian lagi membayar gaji pegawai. Berikut ini bisa kita simak contoh anggaran negara Republik Indonesia tahun 2012, sebagai berikut :

Pendapatan dan Pengeluaran Negara dalam APBN Tahun 2012

Anggaran Pendapatan Negara	
Penerimaan perpajakan	Rp1.032.570.205.000.000,00
Penerimaan negara bukan pajak	Rp277.991.382.880.000,00
Penerimaan hibah	Rp825.091.586.000,00
Anggaran Belanja Negara	
Anggaran belanja Pemerintah Pusat	Rp964.997.261.407.000,00
Anggaran transfer ke daerah	Rp470.409.458.592.000,00

Sumber : UU No 22 tahun 2011 tentang APBN 2012



Berdasarkan analisa terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012 di atas (lihat penjelasan APBN tahun 2012) stimulus fiskal kurang dari 12%, demikian pendapat analis INDEF dalam kajian bertema "RAPBN 2013 Warisan Buruk Untuk Pemerintahan Yang Akan Datang".

Dalam APBN 2012 tersebut selain porsi stimulus fiskal yang kecil, juga tersirat belanja negara yang lebih besar daripada pendapatan. Dalam lima tahun terakhir, rata-rata pendapatan negara hanya meningkat 10,92%, sementara belanja negara meningkat 11, 55%. Pada kurun waktu ini, ironisnya kebijakan defisit anggaran tidak untuk meningkatkan peran stimulus fiskal, tetapi justru habis untuk belanja birokrasi. Pada era ini pemerintah sedang didera oleh berbagai masalah nasional penting terkait dengan merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai dampak dari merajalelanya korupsi yang terjadi hampir di semua departemen dan

di semua tingkatan pemerintahan dari pusat sampai pada lini-lini pemerintahan di daerah. Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan stimulus fiskal dalam kerangka meningkatkan kinerja keuangan publik sangat sulit diimplementasikan. Beberapa kali diluncurkan kebijakan kenaikan BBM, gagal diimplementasikan karena mendapat reaksi keras dari masyarakat. Belanja pemerintah terus melambung, dan rata-rata belanja pemerintah pusat tumbuh 15% sedangkan belanja pegawai tumbuh 19%. APBN 2012 tersandera oleh subsidi BBM yang membengkak dan utang negara yang tidak efisien, kebijakan pencitraan oleh pemerintah saat ini juga ikut menyumbangkan gagalnya kebijakan-kebijakan peningkatan kinerja keuangan dan berakibat melemahnya stimulus fiskal pada periode berjalan. Diprediksikan subsidi BBM pada RAPBN 2013 mencapai Rp. 193,8 triliun atau naik Rp. 56,4 triliun dibanding APBN 2012.



Secara teoritis pengeluaran pemerintah diselenggarakan berdasarkan rencana yang sudah dikaji *benefit and cost* dengan skala prioritas kebutuhan masyarakat bangsa saat itu. Meskipun hukum kecenderungan peningkatan pengeluaran negara berlaku secara general termasuk di Indonesia, namun rancangan pengeluaran tersebut harus didasarkan pada kemungkinan dapat tidaknya negara mengusahakan pendapatannya.

Pengeluaran negara harus sesuai dengan batas-batas kemampuan negara dan bangsa yang bersangkutan. Setelah rencana pengeluaran ditetapkan barulah dipikirkan rencana pemasukan dananya. Oleh karena itu, sering atau dapat dikatakan kebijakan fiskal tercermin pada anggaran negara dan di Indonesia dinamakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar kebijakan fiskal ini adalah bahwa tindakan pemerintah tidak dapat disamakan dengan tindakan individu, dan pengaruh-pengaruh dari tindakan-tindakan tersebut terhadap masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan fiskal ini belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan karena baru sejak tahun 1930-an, yaitu pada saat terjadi *depresi* internasional. Sebelum tahun-tahun tersebut, pengeluaran pemerintah hanya dianggap sebagai alat untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah dan dinilai langsung berdasarkan atas manfaat langsung yang dapat ditimbulkan tanpa melihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional, pajak tidak dilihat pengaruhnya terhadap pendapatan nasional hanya dianggap sebagai sumber pembiayaan pengeluaran negara. Oleh karena itu, pada saat *depresi* terjadi, di mana penerimaan negara menurun, maka pengeluaran pemerintah harus dikurangi pula. Apabila terjadi inflasi ataupun *deflasi*, kebijakan yang dipercayai untuk menanggulangnya adalah kebijakan moneter. Seharusnya apabila penerimaan negara menurun seperti pada saat *depresi* terjadi, pemerintah tidak harus melakukan pengurangan dalam pengeluarannya, yang pada umumnya dilakukan oleh para individu apabila penerimaannya berkurang. Apabila pemerintah mengurangi pengeluarannya, maka justru hal itu akan memperberat perekonomian karena menurunnya pengeluaran pemerintah akan berarti menurunnya pendapatan sebagian besar anggota masyarakat yang merupakan objek pajak dan selanjutnya memperkecil penerimaan pemerintah lagi, demikian seterusnya. Di samping itu, pada saat *depresi* banyak dana masyarakat (swasta) menganggur sehingga peningkatan pengeluaran pemerintah tidak akan mengurangi investasi sektor swasta. *Depresi* yang terjadi pada tahun 1930-an ini membuktikan bahwa kebijakan moneter tidak mampu untuk menanggulangnya. Pada tahun 1936 muncul teori Keynes yang terkenal, yaitu *General Theory of employment, interest and money* yang merupakan dasar dari kebijakan fiskal dan menyebabkan peranan pemerintah dalam perekonomian semakin menonjol. Pada awal pemunculannya, kebijakan fiskal terutama dimaksudkan untuk mengatasi masalah pengangguran, baru sesudah Perang Dunia II kebijakan fiskal mulai diarahkan untuk mengatasi masalah inflasi.

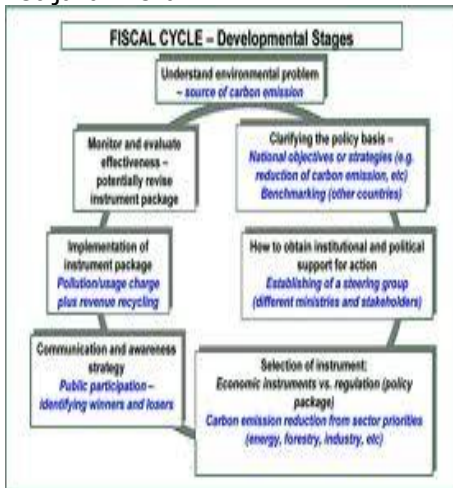
Kondisi yang terilustrasikan seperti di atas sepertinya terulang kembali dengan kasus yang serupa saat ini, di mana tingkat pengangguran yang tinggi terjadi pada hampir semua angkatan kerja. Kondisi ini di barengi dengan kebijakan subsidi BBM yang memakan porsi sebesar 11,7% dari total belanja negara. Sangat disayangkan keminiman diversifikasi energi yang membuat Indonesia bergantung dengan BBM. Pada hal setiap kenaikan ICP 1 dolar AS per barrel, maka akan terjadi penambahan subsidi BBM sebanyak Rp. 2 triliun. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tanah air Indonesia sangat kaya sumber energi lain seperti gas dan batubara yang justru dijual murah ke luar negeri. Utang Indonesia yang *out standing*-nya pada akhir Juni 2012 sebesar Rp 1.938.6 triliun akan terus bertambah seiring besarnya defisit. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terbukti dengan masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan yang semakin melebar yaitu 0,41. Ratio realisasi pembayaran bunga utang terhadap penerimaan pajak mencapai 13,3%, yang berarti hampir seperempat pajak masyarakat habis digunakan untuk membayar cicilan utang dan bunganya.



Pada sisi lain, secara teoritik kebijakan fiskal pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian yang mantap, tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat dan ketidakstabilan harga-harga kebutuhan masyarakat.

Jadi, tujuan kebijakan fiskal adalah peningkatan secara terus-menerus pendapatan nasional riil pada laju faktor-faktor produksi dengan tetap mempertahankan kestabilan harga-harga umum.

Kestabilan ekonomi tidak berarti kestabilan untuk semua sektor perekonomian karena perubahan harga relatif sangat diperlukan bagi penyesuaian dalam perubahan teknologi, *preferensi* masyarakat dan tersedianya dalam perubahan teknologi, *preferensi* masyarakat dan tersedianya faktor produksi agar penggunaan optimum dari semua sumber daya ekonomi dapat terealisasi. Keadaan ini harus diperjuangkan dalam pemerintahan saat ini, dan harus segera direalisasikan dalam rencana-rencana kebijakan keuangan khususnya kebijakan fiskal.



Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam atas dasar berikut ini.

- Pembiayaan fungsional (*functional finance*).
- Pengelolaan anggaran (*the managed budget approach*)
- Stabilitas anggaran otomatis (*the stabilizing budget*)
- Anggaran belanja seimbang (*balance approach*)

Untuk memperjelas masing-masing kebijakan fiskal tersebut, cermatilah uraian berikut.

A. PEMBIAYAAN FUNGSIONAL



Kebijakan pembiayaan fungsional dirumuskan oleh A.P Lerner, bahwa pengeluaran pemerintah ditentukan oleh akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional terutama untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Di lain pihak, pajak berfungsi untuk mengatur pengeluaran masyarakat, disamping untuk meningkatkan penerimaan pemerintah sehingga pada saat terjadinya pengangguran pajak sama sekali tidak diperlukan. Kemudian, pinjaman digunakan sebagai alat untuk menekan inflasi lewat pengurangan dana yang ada dalam masyarakat. Apabila dirasa bahwa pajak maupun pinjaman tidak tepat untuk mengatasi masalah kesempatan kerja barulah ditempuh pencetakan uang. Jadi, di sini pengeluaran pemerintah dan perpajakan dipertimbangkan sebagai suatu hal yang terpisah, namun demikian ada kekhawatiran bahwa tanpa adanya hubungan yang langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan akan ada bahayanya karena kemungkinan pengeluaran pemerintah semakin berlebihan.

B. PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengelolaan dan penetapan anggaran di Indonesia didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam regulasi sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

12. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
15. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
16. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
18. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
19. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

21. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
23. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

APBN Tahun Anggaran 2012 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012, serta kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2012



sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama dalam pembahasan rancangan APBN tahun anggaran 2012 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Selain itu, APBN tahun anggaran 2012 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan

ditempuh dalam tahun 2012.

Dengan memperhatikan perkembangan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2012 diperkirakan mencapai sekitar 6,7% (enam koma tujuh persen). Seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian global, Pemerintah optimis target pertumbuhan ekonomi tersebut dapat tercapai, melalui pertumbuhan konsumsi masyarakat yang diperkirakan masih cukup tinggi, iklim investasi yang semakin kondusif, dan kinerja ekspor yang semakin meningkat. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri. Di samping itu, kondisi makro ekonomi juga diperkirakan membaik dan stabil. Melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp8.800,00 (delapan ribu delapan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2012 dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2012, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah dan terjaminnya pasokan serta lancarnya arus distribusi kebutuhan bahan pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada tingkat 5,3% (lima koma tiga persen). Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai 6,0% (enam koma nol persen). Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang mulai meningkat seiring dengan pemulihan perekonomian dunia, rata-rata harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia Crude Price/ICP*) di pasar internasional dalam tahun 2012 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$90,0 (sembilan puluh koma nol dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan mencapai sekitar 950 (sembilan ratus lima puluh) ribu barel per hari. Strategi pelaksanaan pembangunan Indonesia didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.

Pelaksanaan strategi RPJPN dibagi ke dalam empat tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di mana tiap-tiap tahap memuat rencana dan strategi pembangunan untuk lima tahun yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah. Selanjutnya, Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun. RPJMN tahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, dan tahun 2012 merupakan tahun ketiga dalam agenda RPJMN tahap kedua. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004 – 2009), RPJMN ke-2 (2010 – 2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam RPJMN tahap kedua (2010 – 2014), kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu: (a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) tiap-tiap tahun.

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 disusun berdasarkan tema “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” dan diterjemahkan ke dalam 11 (sebelas) prioritas nasional dan tiga prioritas nasional lainnya. Sebelas prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu:

- a. reformasi birokrasi dan tata kelola;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. penanggulangan kemiskinan;
- e. ketahanan pangan;
- f. infrastruktur;
- g. iklim investasi dan iklim usaha;
- h. energi;
- i. lingkungan hidup dan pengelolaan bencana;
- j. daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; serta
- k. kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya meliputi :

- a. bidang politik, hukum, dan keamanan;
- b. bidang perekonomian; dan
- c. bidang kesejahteraan rakyat.

Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah di tahun 2012.

Kebijakan fiskal yang didasarkan pada pendekatan pengelolaan anggaran lebih disukai daripada yang didasarkan pada pendekatan fungsional karena dalam pendekatan pengelolaan anggaran, pengeluaran pemerintah, perpajakan dan pinjaman dimaksudkan untuk mencapai kestabilan ekonomi yang mantap, sasaran-sasaran dan prioritas pembangunan nasional. Pendekatan yang dipelopori oleh Alvin Hansen ini menghendaki hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan, tetapi penyesuaian dalam anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat terjadi *defisit* maupun *surplus*. Untuk mengatasi masalah pengangguran dalam masa *depresi*, pendekatan ini menyarankan untuk mengadakan

peningkatan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk jangka panjang hendaknya digunakan anggaran seimbang dengan catatan bahwa anggaran *defisit* hendaknya digunakan untuk mengatasi masa *depresi* dan pada saat terjadi inflasi hendaknya digunakan anggaran yang *surplus* agar kestabilan ekonomi dapat terjamin. Dalam perkembangan lebih lanjut, untuk mengatasi masa *depresi*, peningkatan pengeluaran pemerintah akan diimbangi pula dengan penerimaan pajak yang meningkat pula, asalkan tidak sampai menimbulkan keadaan *deflasi*. Sebaliknya, pada masa inflasi pajak akan digunakan untuk mencegah timbulnya akibat inflasi yang tidak diinginkan. Kebijakan ini dilaksanakan dalam usaha untuk mempertahankan adanya anggaran yang seimbang tanpa *defisit* anggaran belanja dalam jangka panjang. Kebaikan dari pendekatan ini adalah bahwa pinjaman negara tidak akan meningkat, tetapi sektor swasta dan masyarakat menjadi kurang bersemangat karena kurang percaya pada diri sendiri.

C. STABILITAS ANGGARAN OTOMATIS



Pada dasarnya, pemerintah lebih menyukai dan mempercayai mekanisme kebijakan fiskal otomatis. Dengan pendekatan ini, akan terjadi penyesuaian secara otomatis terhadap penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang akan menyebabkan perekonomian stabil tanpa adanya campur tangan pemerintah.

Pengeluaran pemerintah akan ditentukan berdasarkan pada perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai program, sedangkan pajak akan ditentukan sehingga dapat menimbulkan *surplus* dalam periode kesempatan kerja penuh. Apabila terjadi kemunduran dalam kegiatan dunia usaha, maka program pengeluaran pemerintah dalam perpajakan tidak akan berubah, namun akan ada penurunan dalam penerimaan pajak terutama dari pajak pendapatan. Di lain pihak, akan ada peningkatan dalam pengeluaran pemerintah terutama yang dikaitkan dengan bantuan sosial, gaji, pensiun, dan sebagainya.

Dengan adanya *defisit* dalam anggaran belanja pemerintah diharapkan akan mendorong perkembangan sektor swasta sehingga dapat kembali mencapai kesempatan kerja penuh. Sebaliknya dalam keadaan inflasi, akan diusahakan kenaikan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak pendapatan dan tunjangan untuk bantuan sosial, seperti tunjangan pengangguran dikurangi sehingga akan tercapai *surplus* dalam anggaran belanja pemerintah. Peranan stabilitas anggaran yang otomatis ini dapat ditingkatkan dengan penambahan pengeluaran pemerintah dalam proyek-proyek pekerjaan umum.

D. ANGGARAN BELANJA SEIMBANG



Dalam pendekatan ini, dikehendaki adanya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah sehingga terjadi kestabilan dalam perekonomian. Keseimbangan dalam anggaran belanja pemerintah ini akan berusaha dipertahankan tanpa adanya *defisit* atau *surplus* anggaran belanja sehingga dalam masa *depresi*, pengeluaran pemerintah akan ditingkatkan selaras dengan peningkatan dalam penerimaan pemerintah yang berasal dari pajak, asal tidak mengarah pada keadaan *deflasi*. Untuk mengatasi keadaan inflasi akan digunakan pajak sebaik-baiknya

Menurut Musgrave, ada 3 fungsi utama dari kebijakan fiskal sebagai berikut.

1. Fungsi Alokasi

Kebijakan fiskal dikatakan mempunyai fungsi alokasi karena dapat berfungsi untuk mengadakan alokasi yang optimal terhadap sumber-sumber daya ekonomi di dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih ditingkatkan.

Dengan tercapainya optimalisasi dalam penggunaan sumber-sumber daya ekonomi, akan menyebabkan tercapainya efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber daya ekonomi. Alokasi sumber-sumber daya ekonomi yang ada dalam masyarakat dapat dilakukan melalui kebijakan perpajakan yang selektif dalam pengenaan tarif pajak terhadap barang-barang dan masyarakat (wajib pajak). Di samping itu, dilakukan seleksi tarif pengenaan pajak terhadap barang yang akan masuk dan ke luar dari wilayah negara. Apabila pemerintah tidak menghendaki beredarnya suatu barang tertentu dalam masyarakat, pemerintah dapat menetapkan tarif pajak yang tinggi terhadap barang tersebut. Dengan pengenaan pajak yang tinggi terhadap barang tersebut diharapkan masyarakat akan mengubah produksi barang-barang tersebut ataupun menggantikan pengimporan barang-barang yang dikenakan pungutan tinggi tersebut. Sebaliknya, terhadap barang-barang yang dikehendaki peredarannya dalam pasaran, pemerintah dapat mengenakan pungutan pajak yang relatif rendah/kecil dan diharapkan produsen akan berpindah meningkatkan produksi barang yang hanya dikenai pajak yang kecil tersebut. Demikian juga importir, akan berusaha memasukkan barang-barang yang dikenai pajak yang rendah. Di samping itu, pemerintah dapat juga melaksanakan kebijakan fiskal untuk mengalihkan alokasi sumber-sumber dengan cara pemberian pembebasan pajak yang bersifat sementara (*tax holiday*) dan keringanan-keringanan lainnya diberikan pada sektor-sektor yang perlu digalakkan keberadaannya. Pemerintah dapat juga menetapkan sektor-sektor yang menjadi sumber-sumber usaha para penanam modal asing dan penanaman modal dalam negeri, serta daerah-daerah mana yang boleh atau dilarang untuk melaksanakan kegiatan usahanya melalui kebijakan fiskal dengan cara pemberian *tax holiday* serta pemberian keringanan-keringanan lain. Hal ini diharapkan dapat menjadi perangsang bagi para investor baik yang berasal dari luar negeri maupun berasal dari dalam negeri sendiri. Dengan adanya ketentuan alokasi terhadap usaha yang boleh dilakukan para investor di suatu lokasi tertentu, maka hal ini akan mengakibatkan usaha-usaha pemerataan pembangunan yang diupayakan pemerintah di seluruh negara. Dalam rangka perlindungan terhadap barang-barang produksi dalam negeri

terhadap barang-barang sejenis yang berasal dari ekspor dan pada umumnya mempunyai kualitas yang lebih tinggi, pemerintah dapat menggunakan bea masuk yang tinggi terhadap barang tersebut sehingga akan menyebabkan tingginya harga barang tersebut, dan pada akhirnya tidak akan terjangkau dengan daya beli sebagian besar masyarakat yang memerlukannya. Hal ini akan menyebabkan importir mengurangi jumlah barang tersebut sehingga produksi barang sejenis di dalam negeri dapat berkembang dengan baik. Pelaksanaan realokasi sumber-sumber daya ekonomi yang ada dapat pula dilaksanakan melalui kebijakan fiskal lain, yaitu dengan cara memberikan subsidi atau melakukan pembelian terhadap produksi barang-barang tertentu yang ingin digalakkan pemerintah. Hal ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan aktivitas masyarakat yang menghasilkan barang-barang tertentu kepada aktivitas menghasilkan barang yang diinginkan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sebagian besar warga negaranya.

2. Fungsi Distribusi

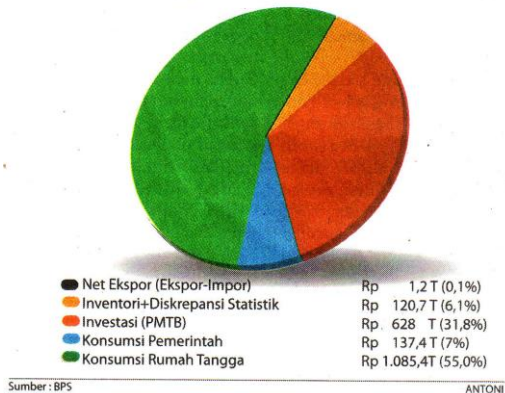
Kebijakan fiskal dikatakan mempunyai fungsi distribusi karena pemerintah dapat melakukan distribusi pendapatan yang lebih merata dalam masyarakat. Usaha pendistribusian pendapatan yang lebih merata ini dilakukan pemerintah dalam rangka lebih menjamin tercapainya keadilan dalam masyarakat.

Dalam distribusi pendapatan yang lebih merata ini terkandung pula pengertian bahwa kepada setiap warga negara akan diberikan haknya sesuai dengan kontra prestasi masing-masing/ kemampuan masing-masing individu. Pada kenyataannya, kemampuan masing-masing individu itu dalam suatu masyarakat tidaklah sama, artinya ada orang/golongan yang kaya dan miskin, ada pula yang mempunyai kepandaian tinggi dan rendah, serta ada golongan orang yang mempunyai kemampuan tinggi untuk bekerja karena mereka kebetulan sehat jasmani dan rohaninya, tetapi ada pula golongan penduduk yang tidak mempunyai kemampuan tinggi untuk bekerja karena mereka kebetulan cacat jasmaninya dan sebagainya. Dengan

adanya kenyataan-kenyataan ini, diperlukan peran pemerintah dalam mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata agar jurang pemisah antara golongan kaya dan miskin tidak terlalu lebar. Dalam hal ini, diperlukan fungsi pemerintah yang bertugas melindungi golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan-kemampuan lemah. Menurut Bank Dunia, ada beberapa kriteria distribusi pendapatan dalam masyarakat sebagai dampak pengaruh pajak terhadap perekonomian, yaitu sebagai berikut.

Apabila 40% dari jumlah keluarga di suatu masyarakat menerima > 17% dari PDB, maka derajat ketidakmerataan di dalam masyarakat tersebut rendah. Apabila 40% dari seluruh jumlah keluarga yang ada dalam masyarakat memperoleh 14%-17% PDB, ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan masyarakat dikatakan berada dalam keadaan di tengah-tengah/cukup. Sedangkan apabila 40% dari jumlah keluarga dalam masyarakat tersebut memperoleh 12%-14% dari PDB, maka derajat ketidakmerataan pendapatan di masyarakat tersebut adalah tinggi. Derajat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dalam masyarakat dikatakan sangat tinggi apabila 40% dari seluruh jumlah keluarga memperoleh <12% PDB. Untuk mencapai derajat ketidakmerataan dalam pembagian pendapatan yang rendah, pemerintah dapat melakukannya melalui penarikan pajak dan penerimaan lainnya terhadap masyarakat sebagai wajib pajak. Berikut ini gambaran PDB Indonesia tahun 2012 :

**Struktur PDB Indonesia
Menurut Penggunaan Kuartal I Tahun 2012**



Kita perlu pula menyadari bahwa untuk menarik pajak terhadap masyarakat harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu sebagai berikut.

- Untuk menentukan besarnya/mekanisme penarikan pajak harus ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- Pemungutan harus berdasarkan kemampuan rakyat.
- Harus mencerminkan keadilan.
- Pemungutan pajak hendaknya dipergunakan untuk keperluan peningkatan kemakmuran rakyat, yang dapat dilaksanakan melalui pengeluaran-pengeluaran negara.

Untuk mencapai tujuan pemungutan yang memenuhi rasa keadilan sehingga distribusi pendapatan lebih merata hendaknya digunakan sistem pajak yang bersifat *progresif*. Dengan sistem pajak yang progresif, golongan yang mempunyai *taxable capacity* tinggi akan dibebani pajak yang lebih besar daripada golongan yang mempunyai *taxable capacity* lebih rendah. Di samping itu, untuk golongan penduduk yang tidak mampu tidak akan dikenai pajak dengan adanya pendapatan bebas pajak. Dengan cara demikian, diharapkan distribusi pendapatan akan lebih merata. Untuk mereka yang mempunyai kemampuan yang rendah, seperti golongan-golongan tuna karya, yatim piatu, fakir miskin, serta para pensiunan,

pemerintah mempergunakan kebijakan fiskal dalam bentuk *transfer payment* melalui pengeluarannya. Tindakan pemerintah yang demikian itu, disebut dengan tindakan redistribusi pendapatan, dengan tujuan untuk lebih pemeratakan pembagian pendapatan yang ada dalam masyarakat. Penerimaan, antara lain bersumber dari pajak, pemerintah melakukan pula pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk subsidi/ bantuan pada daerah-daerah yang masih terbelakang agar daerah-daerah tersebut dapat melaksanakan proyek-proyek pembangunan di daerahnya. Dengan adanya pembangunan proyek-proyek pembangunan di daerah-daerah tersebut diharapkan akan menimbulkan tambahan pendapatan dan tambahan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar proyek-proyek tersebut. Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan di atas, diharapkan pendapatan lebih merata dan sekaligus dapat meningkatkan optimum alokasi dari sumber-sumber daya ekonomi yang ada dalam masyarakat.

3. Fungsi Stabilisasi

Kebijakan fiskal dikatakan mempunyai fungsi stabilisasi karena kebijakan fiskal dilaksanakan untuk mencapai kestabilan yang mantap dalam bidang ekonomi dan akan berakibat kestabilan dalam bidang-bidang lainnya.

Kestabilan ekonomi yang mantap berarti tetap mempertahankan selalu adanya kesempatan kerja dan kelangsungan produksi, meningkatkan stabilitas harga-harga yang rasional, menjaga keseimbangan neraca pembayaran luar negeri dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang layak. Dengan perkataan lain, kestabilan dalam perekonomian berarti adanya peningkatan dalam pendapatan nasional riil yang terus-menerus pada laju yang dimungkinkan pada perubahan teknologi dan tersedianya faktor-faktor produksi dengan tetap memperhatikan kestabilan harga-harga umum. Namun, kestabilan ekonomi tidak berarti kestabilan untuk semua sektor perekonomian secara serentak karena perubahan dalam harga relatif diperlukan untuk penyesuaian dalam perubahan teknologi, *preferensi* konsumen dan tersedianya faktor produksi agar penggunaan optimum dari semua sumber daya ekonomi dapat terealisasi. Fungsi kestabilan dari kebijakan fiskal yang dijalankan, misalnya dengan menambah

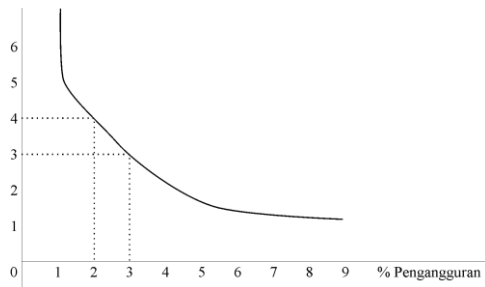
pengeluaran negara pada saat terjadi *deflasi*. Untuk itu, pada saat terjadi *deflasi* hendaknya pemerintah menggunakan anggaran belanja yang *defisit* agar kelesuan ekonomi dapat teratasi. Jika terdapat kecenderungan meningkatnya harga-harga umum yang akan dapat menyebabkan inflasi, hendaknya pemerintah dapat melaksanakan anggaran belanja yang *surplus*. Usaha ini hendaknya didukung dengan mengadakan penarikan-penarikan pajak yang lebih tinggi, terutama terhadap pajak pendapatan dan pajak barang-barang mewah. Dengan tindakan-tindakan ini, diharapkan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi dapat direalisasikan. Sebenarnya di bidang anggaran, stabilitas perekonomian akan lebih mudah dipertahankan apabila pemerintah menggunakan anggaran yang berimbang. Berikut ini gambaran pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 :



Dalam usaha mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, sering kali dijumpai berbagai permasalahan sesuai dengan tahapannya. Pada tingkat permulaan, masalah stabilisasi pada umumnya berkenaan dengan pencapaian *full employment*. Pada tahap pertumbuhan ekonomi nasional lebih lanjut, stabilitas dan pertumbuhan ditujukan untuk menghadapi masalah inflasi dan peningkatan pertumbuhan *output* yang potensial. Setelah *employment* mencapai tingkat yang cukup tinggi, masalah yang dihadapi berikutnya adalah bagaimana caranya untuk dapat

membatasi tingkat inflasi tanpa mengurangi tingkat *full employment* yang telah tercapai itu.

Dalam usaha mencapai tujuan stabilitas harga-harga yang umum terjadi dan tujuan mencapai kesempatan kerja penuh, sering terjadi keragu-raguan akan keberhasilannya. Untuk mengoptimalkan tujuan stabilitas harga, terdapat akibat sampingan yang bersifat mengurangi kesempatan kerja atau bahkan dapat menciptakan pengangguran. Sebaliknya usaha untuk mengurangi pengangguran sering kali disertai dengan adanya laju inflasi yang semakin meningkat. Hubungan dua alternatif tujuan ini dapat digambarkan dengan menggunakan kurva Philips, sebagai berikut.



Gambar 9.1.
Kurva Philips

Sumbu vertikal dalam gambar di atas menunjukkan kenaikan harga, sedangkan sumbu horizontal menggambarkan persentase pengangguran, yang biasanya dihitung dari jumlah angkatan kerja. Dengan demikian, kurva Philips menunjukkan hubungan antara tingginya laju inflasi atau kenaikan harga dan tingginya tingkat pengangguran. Dalam gambar di atas tampak bahwa pada laju inflasi setinggi 4%/tahun, tingkat pengangguran yang ada dalam masyarakat setinggi 2%/tahun, dan pada laju inflasi setinggi 3%/tahun, tingkat pengangguran dalam masyarakat setinggi 3%/tahun. Dengan mencermati gambar 9.1, terlihat bahwa terdapat konflik

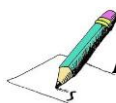
antara tujuan untuk mencapai kesempatan kerja yang tinggi dengan tujuan untuk mencapai kestabilan dalam harga-harga umum.

Ketiga fungsi kebijakan fiskal di atas tercermin pula dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Untuk menambah wawasan Anda tentang kebijakan fiskal, silahkan Anda saksikan audio visual (CD) dengan judul :

1. Kementerian Keuangan akan canangkan kebijakan fiskal green economy, yang dikutip dari <http://www.youtube.com/watch?v=Uyd1Jqbhc30>
2. Kementerian ESDM diminta kendalikan konsumsi BBM bersubsidi, yang dikutip dari <http://www.youtube.com/watch?v=JOInQbOAlfc>
3. Kebijakan Bank Sentral AS atas perlambatan pertumbuhan ekonomi, yang dikutip dari http://www.youtube.com/watch?v=39Uu7_MBhMA

Identifikasilah bentuk “kebijakan fiskal” dari masing-masing judul audio visual tersebut!



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Mengapa sering dikatakan bahwa kebijakan fiskal tercermin pula dalam anggaran pendapatan dan belanja suatu negara? Jelaskan jawaban Anda dan berikan contohnya!
- 2) Renungkanlah kembali perkembangan kebijakan fiskal yang ada pada awal kegiatan belajar ini, kemudian jelaskan apa yang

dimaksud dengan *The stabilizing budget* itu dan jelaskan pula kebaikan-kebaikannya dibandingkan dengan *functional finance*!

- 3) Jelaskanlah fungsi alokasi dari kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave, dan berikan contoh-contohnya!
- 4) Diskusikanlah dengan teman-teman belajar Anda tentang hubungan kebijakan fiskal yang dianut/ dijalankan pemerintah kita dengan 3 fungsi kebijakan fiskal dari Musgrave (terutama kebijakan fiskal pada Repelita IV)!
- 5) Jelaskan hubungan antara kebijakan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah pada Repelita IV dengan kebijakan fiskal yang telah dijalankan pemerintah pada masa Pelita III!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Ingat kembali apa yang dimaksud dengan kebijakan fiskal itu. Kemudian, untuk memperjelas jawaban Anda tunjukkanlah contoh-contoh penyusunan APBN, baik dari segi penerimaan negara maupun pengeluaran negara.
- 2) Diharapkan Anda mengingat kembali apa yang dimaksud dengan *The stabilizing budget* dan apa yang dimaksud dengan *Functional Finance*. Selanjutnya cobalah lihat dan analisis perbedaan-perbedaan antara keduanya dan lihat kebaikan dari *The stabilizing budget* itu apabila dibandingkan dengan *functional finance*.
- 3) Anda harus mengingat kembali apa yang dimaksud dengan alokasi itu, baik untuk alokasi hasil pembangunan maupun alokasi faktor-faktor produksi dalam pembangunan. Untuk memperjelas jawaban Anda sertakanlah contoh masing-masing!
- 4) Diharapkan Anda membaca kembali kebijakan-kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah pada Repelita IV yang sudah dijelaskan dalam kegiatan belajar ini. Kemudian, ingatlah dan hubungkanlah kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan itu dengan 3 fungsi utama kebijakan fiskal dari Musgrave. Apakah kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan 3 fungsi utama kebijakan fiskal dari Musgrave?
- 5) Baca kembali uraian materi mengenai kebijakan-kebijakan fiskal yang dijalankan pemerintah kita pada saat Pelita III dan Repelita

IV. Kemudian, Anda diharapkan dapat melihat adanya hubungan antara keduanya, terutama lihatlah dari fungsi masing-masing.



RANGKUMAN

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dapat dikatakan tercermin dalam APBN. Kebijakan fiskal yang belum lama muncul dalam dunia ilmu pengetahuan ini (baru muncul setelah terjadi *depresi* internasional pada tahun 1930-an), pada umumnya bertujuan untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian yang mantap, artinya tetap mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi yang layak tanpa adanya pengangguran yang berarti di satu pihak dan adanya kestabilan harga-harga umum di lain pihak.

Dalam perkembangannya, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 4 macam, atas dasar berikut ini.

1. Pembiayaan fungsional (*functional finance*).
2. Pengelolaan anggaran (*the managed budget approach*).
3. Stabilisasi anggaran otomatis (*the stabilizing approach*).
4. Anggaran belanja seimbang (*balance budget approach*).

Pada dasarnya kebijakan fiskal itu mempunyai 3 fungsi utama, sebagaimana dikemukakan oleh Musgrave sebagai berikut.

1. Fungsi alokasi.
2. Fungsi distribusi.
3. Fungsi stabilisasi.

Tiga fungsi kebijakan fiskal yang utama tersebut, telah tercermin dalam kebijakan pembangunan di Indonesia, sejak Pelita I dan dalam Trilogi Pembangunan sebagai landasan bagi pembangunan di negara kita. Untuk itu, kebijakan anggaran yang seimbang dan dinamis selalu dipergunakan oleh pemerintah Orde Baru sehingga upaya untuk mencapai kestabilan dalam perekonomian dapat tercapai, yang akan mempunyai dampak

negatif dalam bidang-bidang yang lain. Hal ini terbukti dari makin meningkatnya tabungan pemerintah sejak awal Pelita sebagai sumber dana pembangunan, dan semakin mengecilnya proporsi dana bantuan luar negeri, sebagai pelengkap dari dana pembangunan di negara kita. Kebijakan fiskal yang dijalankan dalam Pelita III sejalan dengan 3 fungsi utama kebijakan fiskal yang dikemukakan oleh Musgrave, antara lain berupa usaha untuk menyediakan dana sebesar-besarnya bagi pembangunan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat, mendorong pemakaian produksi dalam negeri. Demikian pula pada Repelita IV, pemerintah lebih menyempurnakan kebijakan-kebijakan yang telah dilaksanakan pada Pelita III, dan masih berlandaskan pada Trilogi Pembangunan yang sesuai dengan 3 fungsi utama kebijakan fiskal dari Musgrave, yaitu pemerataan dalam distribusi pendapatan dan pembangunan, *allocation of resources*, dan kestabilan dalam perekonomian.

Kebijakan-kebijakan fiskal itu tercermin pula dalam pengawasan pelaksanaannya.



TES FORMATIF 1

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Dasar dari kebijakan fiskal, yaitu
 - A. tindakan pemerintah dalam mengelola anggarannya seharusnya tidak seperti para individu dalam mengelola anggarannya masing-masing
 - B. tindakan pemerintah dalam mengelola anggarannya hendaklah sama dengan para individu dalam masyarakat tersebut
 - C. pembuatan pengeluaran pemerintah hendaknya berdasarkan pada penerimaan, seperti yang dilaksanakan individu
 - D. penerimaan Negara sama dengan pengeluaran negara
- 2) Alvin Hansen merupakan pelopor dari

- A. *functional finance*
 - B. *the managed budget approach*
 - C. *the stabilizing budget*
 - D. *balanced budget approach*
- 3) Kebijakan fiskal dikatakan mempunyai fungsi alokasi karena merupakan alat untuk
- A. mengalokasikan sumber-sumber dana bagi pembangunan
 - B. mengalokasikan distribusi pendapatan dan redistribusi pendapatan
 - C. mengalokasikan pembangunan di seluruh negara
 - D. mengadakan *optimum allocation of resources* baik dalam mengadakan alokasi sumber daya ataupun realokasinya, baik antarsektor maupun antardaerah di seluruh negara
- 4) Untuk dapat memenuhi tugasnya sebagai alat untuk meratakan distribusi pendapatan yang ada dalam masyarakat, seharusnya pajak yang diterapkan bersifat
- A. *regresif*
 - B. *proporsional*
 - C. *progresif*
 - D. *regresif-regresif*
- 5) Fungsi stabilisasi dari kebijakan fiskal adalah
- A. adanya kestabilan yang serentak antara berbagai kegiatan ekonomi, misalnya kestabilan dalam harga-harga umum, kesempatan kerja
 - B. dalam masyarakat terjadi kesempatan kerja yang tinggi (*full employment*)
 - C. kesempatan kerja di masyarakat rendah, namun tidak ada gejolak dalam harga-harga umum (tidak ada inflasi dan *deflasi* dalam masyarakat)
 - D. terdapat gejolak harga umum yang relative naik
- 6) Untuk dapat menggalakkan produksi dalam negeri, pemerintah dapat melaksanakan kebijakan fiskal dengan cara....
- A. memberikan subsidi pada pengusaha-pengusaha golongan ekonomi lemah

- B. memberikan kebebasan untuk mengimpor barang-barang modal dengan jalan menekan bea masuk dari barang modal tersebut
 - C. mengutamakan membeli barang-barang produksi dalam negeri dalam rangka pembelian saran pemerintahannya
 - D. menggunakan pajak berganda
- 7) Dalam usaha untuk mencukupi distribusi dan redistribusi pendapatan yang makin merata, cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain....
- A. memberikan subsidi pada daerah-daerah terpencil
 - B. memberikan dana bantuan desa, untuk setiap desa di seluruh tanah air
 - C. memberikan proyek-proyek Inpres pada daerah-daerah di seluruh negara, seperti pendirian SD Inpres, Puskesmas
 - D. jawaban A, B, dan C salah
- 8) Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri, upaya yang dilakukan pemerintah pada Repelita IV, antara lain dengan
- A. penerbitan undang-undang PBB, Undang-undang Bea Meterai, menggalakkan ekspor nonmigas
 - B. menerbitkan Undang-undang Pajak Penghasilan, Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Undang-undang Pajak atas Barang Mewah, UU Bea Meterai, Penggalakan ekspor nonmigas
 - C. pencairan tambahan utang dari luar negeri
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 9) Kebijakan fiskal dalam negeri dan pengeluaran rutin yang dijalankan pemerintah dalam Repelita IV, antara lain
- A. mengadakan penghematan di semua segi pengeluaran rutin
 - B. pengurangan subsidi terhadap pangan dan subsidi BBM
 - C. pengendalian sistem pengadaan dan pembelian barang-barang kebutuhan pemerintah
 - D. jawaban A, B, dan C benar

- 10) Untuk menunjang keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan fiskal yang dilaksanakan pemerintah pada Repelita IV, antara lain dilakukan usaha-usaha
- A. penilaian mutu pelayanan dan jasa yang diberikan pada masyarakat oleh aparatur pemerintah
 - B. pengendalian dan pengawasan yang teratur dan ketat dari pelaksanaan kebijakan fiskal
 - C. melakukan monitoring dan meningkatkan monitoring dari pelaksanaan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan
 - D. jawaban A, B, dan C benar

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 2

Kebijakan Moneter

*K*ebijakan moneter adalah kebijakan yang mengatur pengendalian peredaran keuangan.



Kebijakan moneter merupakan tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, yang berkenaan dengan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Tindakan pemerintah dalam bidang moneter haruslah dalam kerangka upaya menjaga keseimbangan jumlah uang yang beredar dalam masyarakat.

Keseimbangan yang dimaksudkan di sini dalam arti dinamis, maksudnya keseimbangan yang meningkat terus, jumlah masing-masing selalu bertambah terus, namun tetap dalam keadaan yang berimbang jumlahnya. Apabila terjadi *disequilibrium*, hal ini akan mengganggu stabilitas sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. *Disequilibrium* dalam moneter dapat berarti jumlah barang yang beredar di dalam masyarakat lebih besar dari pada jumlah barang dan jasa sehingga akan berakibat naiknya harga barang-barang. Dalam keadaan demikian, diharapkan pemerintah bertindak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat sehingga kenaikan harga-harga umum itu dapat ditekan. *Disequilibrium* dalam moneter dapat berupa jumlah barang dan jasa yang beredar di dalam masyarakat lebih besar apabila dibandingkan dengan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat, hal ini cenderung akan menyebabkan turunnya harga-harga umum yang ada di dalam masyarakat, yang pada akhirnya dapat berakibat pada kelesuan perekonomian, di mana keadaan semacam ini biasa disebut dengan

deflasi. Untuk mengatasinya, pemerintah diharapkan untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Dalam pelaksanaannya kebijakan moneter ini biasanya ditunjang pula oleh kebijakan fiskal dan kebijakan ekonomi internasional. Ketiga kebijakan ini biasanya memang saling mendukung dalam upaya mencapai kestabilan dalam keadaan perekonomian.



Adapun tujuan kebijakan moneter secara umum adalah berikut ini.

1. Menyesuaikan dan menggalakkan uang yang beredar dalam masyarakat.
2. Mendorong dan menggalakkan kegiatan perekonomian dalam masyarakat, dengan jalan memberikan kemudahan dalam memperoleh *kredit* dengan bunga yang relatif cukup rendah, terhadap para pengusaha terutama untuk para pengusaha golongan ekonomi lemah.
3. Mengarahkan penggunaan uang dan *kredit* sedemikian rupa sehingga kestabilan nilai uang dapat dipertahankan dan dimantapkan.
4. Mengusahakan pe-

	<p>laksanaan kebijakan moneter tidak menimbulkan beban yang berat terhadap masyarakat maupun bagi keuangan pemerintah sendiri.</p> <p>5. Mempertahankan dan meningkatkan tingkat <i>employment</i> yang telah tercapai.</p>
--	---

Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan dari kebijakan moneter tersebut, dapat dipergunakan kebijakan-kebijakan moneter, seperti berikut ini.

A. KEBIJAKAN DALAM MENETAPKAN *CASH RATIO*



Kebijakan penetapan *cash ratio* adalah suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan perbandingan persentase cadangan minimum yang ada di bank dengan jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat. Jadi, besarnya cadangan uang yang beredar yang harus dimiliki oleh bank ditetapkan terlebih dahulu, tindakan yang demikian, disebut dengan *reserve requirement*.

Besarnya persentase perbandingan antara jumlah cadangan yang harus dimiliki bank dapat diubah oleh Bank Sentral (di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia) dan tergantung dari kebijakan moneter yang akan ditempuh oleh Bank Sentral, apakah ingin menambah jumlah uang yang beredar atau sebaliknya. Apabila pemerintah ingin mengurangi jumlah uang yang beredar di dalam

masyarakat, maka pemerintah melalui Bank Sentral dapat menaikkan persentase cadangan atau jika ingin menambah jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat lewat bank sentral, pemerintah akan memperkecil persentase perdagangan dari jumlah uang yang beredar tersebut. Penetapan besarnya jumlah cadangan yang harus tersedia dalam bank komersial, akan mempengaruhi pula besarnya jumlah uang yang beredar dalam masyarakat melalui *Multiplier deposit effect*-nya. Besarnya MD (*Multiplier deposits*) adalah berikut ini.

$$MD = \frac{1}{PR}$$

Di mana PR adalah *reserve requirement*

Misalnya, pemerintah melalui bank sentral menetapkan besarnya cadangan (*reserve requirement*) sebesar 25% yang harus dipunyai oleh bank-bank komersial/umum, maka penciptaan dan pelipatgandaan uang yang beredar dilakukan oleh bank-bank umum adalah sebagai berikut.

Bank Kebangsaan

-Mempunyai uang tunai Rp.10.000,00
 $25\% \times \text{Rp}10.000,00$ Rp 2.500,00
 yang dioperasikan Rp 7.500,00
 (misal pinjaman oleh Tuti, dan disimpan di Bank Mawar)

Bank Nusa

-Mempunyai uang tunai Rp.7.500,00 (sebagai giro Tuti)
 $25\% \times 7.500,00$ Rp.1.875,00
 -Dioperasikan Rp.5.625,00
 (dipinjam Budi dan disimpan di Bank Melati)

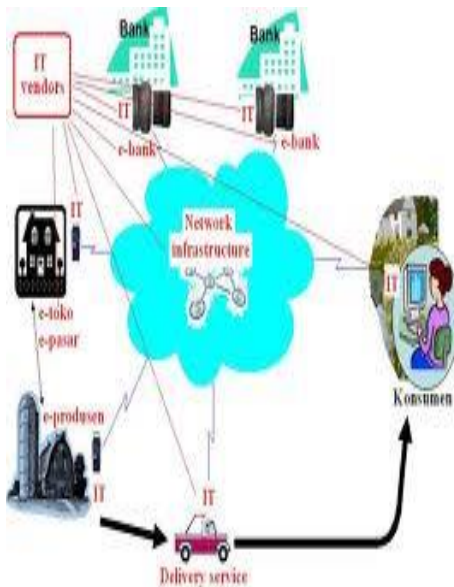
Bank Bangsa

-Mempunyai uang tunai Rp5.625,00 (giro Budi)
 $-25\% \times \text{Rp}5.625,00$ Rp.1.406,25
 -Dioperasikan Rp.4.218,75
 (dipinjam Susi dan disimpan di Bank Reformasi dan seterusnya).

Apabila PR dari bank yang satu dijumlah dengan PR di bank-bank lain ditambah dengan pokok yang dicadangkan, maka jumlah uang yang ada menjadi sebesar Rp40.000,00, padahal semula hanya sebesar Rp10.000,00 saja. Hal ini berarti *multiplier deposit effect*-nya sebesar 4 kali atau efek dari penciptaan dan pelipatgandaannya menjadi 4 kali besar uang pokoknya. Namun, apabila seorang peminjam uang dari bank itu, misalnya Budi tidak mempergunakan pinjaman itu untuk disimpan kembali dalam bank yang lain, melainkan hanya menyimpannya di rumah, maka proses pelipatgandaan uang yang beredar di dalam masyarakat akan berhenti. Hal ini merupakan kebocoran dari kebijakan moneter tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan dalam menciptakan uang dan melipatgandakan uang ditentukan oleh hal-hal berikut ini.

1. Besar *reserve requirement* yang ditetapkan oleh bank sentral.
2. *Banking habit* masyarakat.
3. Rasio antara uang kartal (*currencies*) dan uang giral (*demand deposit*) yang beredar di dalam masyarakat.

B. KEBIJAKAN PASAR TERBUKA (*OPEN MARKET POLICY*)



Kebijakan pasar terbuka hakekatnya adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan mendasarkan pada mekanisme pasar. Kebijakan-kebijakan pembangunan masyarakat diselaraskan dengan perkembangan global, seiring dengan perjanjian-perjanjian internasional tentang *Free Trade* seperti AFTA, CAFTA yang sudah diratifikasi pemerintah Indonesia dengan berbagai negara baik secara sendiri maupun secara berkelompok.

Kebijakan pasar terbuka dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat memiliki kesejajaran dengan masyarakat internasional. Dunia ibarat satu perkampungan besar, sehingga perubahan yang terjadi pada satu negara berdampak sangat cepat pada negara-negara di sekitarnya. Intervensi pemerintah diminimalisir dalam sistem ini. Sistem perdagangan sangat ditentukan oleh mekanisme pasar. Kebijakan seperti ini berdampak pada kehidupan masyarakat Indonesia secara nasional, dan memacu agar sektor-sektor masyarakat mampu bersaing dalam pasar global. Kebijakan pasar terbuka juga dilakukan pemerintah dalam usahanya mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, berkaitan dengan perdagangan surat-surat berharga yang dilakukan oleh Bank Sentral melalui bank-bank umum. Apabila pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar dalam masyarakat dibatasi, pemerintah dapat melaksanakan *tight money policy* atau suatu kebijakan keuangan yang ketat. Dengan kebijakan ini, pemerintah akan menjual efek-efek yang dimilikinya melalui Bank Sentral kepada bank-bank umum. Kemudian, bank-bank umum akan menjualnya kepada masyarakat. Dengan adanya penjualan surat-surat berharga

yang dilakukan pemerintah lewat bank sentral, hal ini berarti uang yang beredar di dalam masyarakat akan tersedot ke bank sentral sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang. Sebaliknya, apabila pemerintah menghendaki jumlah uang yang beredar dalam masyarakat bertambah, maka pemerintah akan melaksanakan kebijakan *easy money policy*, yaitu kelonggaran dalam kebijakan keuangan yang dijalankan oleh bank sentral, dengan jalan membeli surat-surat berharga yang beredar dalam masyarakat sehingga jumlah uang yang beredar dalam masyarakat akan bertambah besar. Tempat-tempat yang memperdagangkan surat-surat berharga disebut *bursa efek* atau *pasar modal*. Sebenarnya terdapat banyak surat berharga, di antaranya adalah obligasi dan saham.

1. Obligasi



Contoh Obligasi

Obligasi merupakan surat berharga yang dapat dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan-perusahaan. *Obligasi* juga merupakan surat tanda berutang dari pihak-pihak yang mengeluarkan kepada pembelinya. Oleh karena itu, pembeli obligasi tersebut akan diberi bunga yang jumlahnya sudah ditetapkan pada saat terjadinya transaksi jual beli.

Jika suatu perusahaan akan menerbitkan obligasi, maka harus mempunyai jaminan-jaminan yang dapat meyakinkan para pembelinya bahwa pada saat yang ditentukan perusahaan tersebut dapat mengembalikan utang-utangnya. Perubahan nilai dari obligasi yang terjadi di pasar modal, dapat disebabkan oleh berbagai perubahan, baik yang menyangkut perubahan-perubahan dalam kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran surat-surat berharga atau obligasi yang bersangkutan, maupun oleh perubahan-perubahan faktor-faktor sehubungan dengan keadaan pasar umumnya dapat

mempengaruhi nilai-nilai kekayaan yang mendasari surat-surat berharga yang bersangkutan.

2. Saham



Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan perusahaan-perusahaan, baik yang berbentuk CV ataupun PT. Saham juga merupakan surat tanda ikut memiliki perusahaan tersebut. Oleh karena itu, pemegangnya akan diberi dividen yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut.

Contoh Saham

Berdasarkan hasil yang dapat diperoleh, saham dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

a. *Saham biasa (common stock)*

Hasil yang diperoleh saham biasa disebut dividen, yang besarnya tergantung dari jumlahnya keuntungan dan keputusan para pemegang saham mengenai besarnya persentase untuk ditahan kembali dan persentase yang dipergunakan dividen.

b. *Saham preferensi*

Para pemegang saham selain memperoleh dividen juga mempunyai hak *preferensi*.

Pada dasarnya keinginan seseorang untuk membeli surat-surat berharga dipengaruhi oleh faktor sebagai berikut.

- a. Sistem perpajakan berikut beban pajak. Apabila obligasi dikenai pajak, dan pajak terhadap bunga obligasi dinaikkan pemerintah, maka orang akan mempertimbangkan kembali untuk membeli, mempertahankan ataupun menjual surat-surat berharga yang dimilikinya.

- b. Besarnya tingkat bunga obligasi. Jika besarnya tingkat bunga cukup baik, orang akan mempertimbangkan untuk membeli obligasi, demikian juga sebaliknya.
- c. Keselamatan modal yang ditanamkan. Dalam hal ini para pembeli akan berusaha mencari surat-surat berharga yang dapat menjamin bahwa modal pokoknya tidak akan berkurang, tetapi justru akan bertambah karena pembeli akan berusaha mencari efek yang bebas dari risiko pasar misalnya.
- d. Mudah atau tidaknya surat-surat berharga tersebut untuk dijual kembali atau untuk dapat dengan mudah dijadikan jaminan *kredit*.
- e. Tidak adanya pengamatan secara terus-menerus oleh pihak bank terhadap surat-surat berharga tersebut karena surat berharga tersebut dapat dipertanggungjawabkan, dan lain-lain.

C. KEBIJAKAN SUKU BUNGA KREDIT



Kebijakan ini dapat dilakukan pemerintah melalui bank sentral dan bank-bank umum untuk mengubah tingkat persentase bunga kredit. Hal ini dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi jumlah uang yang beredar di dalam masyarakat.

Misalnya, pemerintah mempunyai kebijakan untuk menambah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga kredit sehingga akan mendorong masyarakat untuk memperoleh kredit dan akan mendorong masyarakat untuk memperoleh kredit uang yang diharapkan dapat menunjang kegiatan ekonomi dalam negara tersebut. Contohnya, antara lain pemberian kredit atau investasi bagi golongan ekonomi lemah, yakni KIK (Kredit Investasi Kecil). Sedangkan untuk kebutuhan modalnya disediakan Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP). Dengan penurunan tingkat bunga kredit, pemerintah ingin menggalakkan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Untuk itu, prioritas peminjaman

ditujukan pada para pengusaha yang memiliki izin usaha di bidang yang sesuai dengan tujuan kredit dikeluarkan.

D. KEBIJAKAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN DAERAH



1. masih lemahnya koordinasi antar level pemerintahan (di pusat, pusat dan daerah, propinsi dan kabupaten/kota, serta antar daerah).
2. Pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah belum menampakkan perubahan secara signifikan terhadap kuantitas dan kualitas pelayanan publik.
3. Lemahnya kapasitas dalam perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan.
4. melonjaknya biaya rutin dan misalokasi anggaran (RPJMD Kabupaten dan kota).

Berkenaan dengan manajemen perencanaan dan penganggaran daerah, dalam kerangka otonomi daerah, desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Sayangnya, kualitas perencanaan dan penganggaran daerah yang dilaksanakan masih relatif lemah. Lemahnya perencanaan anggaran juga diikuti dengan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan. Sementara itu, pengeluaran daerah terus meningkat secara dinamis, sehingga hal tersebut meningkatkan *fiscal gap*. Keadaan tersebut pada akhirnya memunculkan kemungkinan *underfinancing* atau *overfinancing* yang

dapat mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektifitas unit-unit kerja perangkat daerah

Reformasi anggaran tidak hanya pada aspek perubahan struktur APBD, namun juga diikuti dengan perubahan proses penyusunan. APBD merupakan kebijaksanaan keuangan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemerataan, pengkajian dan evaluasi anggaran pendapatan daerah mudah dilakukan. Berbagai perubahan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik. Prinsip manajemen keuangan daerah yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah tersebut adalah akuntabilitas, *value for money*, transparansi dan pengendalian

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program kegiatan beserta pagu anggarannya. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu, penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja- SKPD) Dinas Kabupaten dan Kota Tahun 2012 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten/kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten/kota Tahun 2008-2012. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

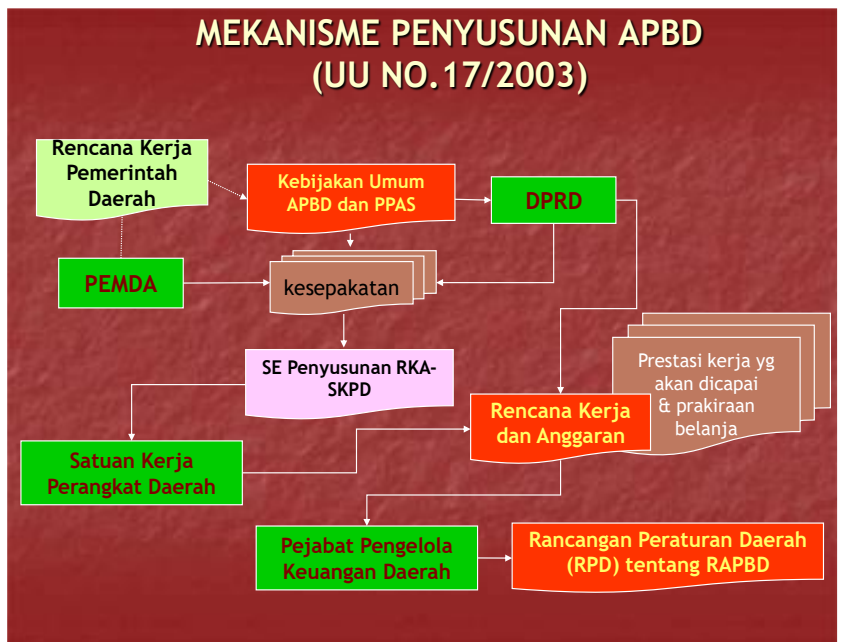
Nasional, bahwa RPJMD dijadikan dasar bagi penyusunan (Renja-SKPD) sebagai program pembangunan tahunan. RPJMD kabupaten Brebes tahun 2008 – 2012 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tanggal 14 April 2008 mengindikasikan beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2012

Setelah dokumen Renja SKPD disahkan, maka selanjutnya masuk pada ranah penganggaran daerah yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, memberikan implikasi yang cukup bermakna bagi Pemerintah Daerah terutama dalam hal proses penyusunan penganggaran daerah hingga ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Propinsi maupun Kabupaten/ Kota.

Di dalam Permendagri tersebut disebutkan bahwa setelah SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja), maka SKPD dapat menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang merupakan rencana anggaran program kegiatan yang disusun dan diusulkan oleh Dinas/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada dalam kewenangannya, dengan berpedoman pada dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang sebelumnya telah dibahas bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang ditandatangani bersama oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD. Selanjutnya KUA-PPAS di tingkat kabupaten tersebut menjadi acuan dalam penyusunan RKA yang diselaraskan dengan Rencana Kerja (Renja) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Kemudian usulan RKA program kegiatan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah /Dinas tersebut sebagai dasar penyusunan RAPBD yang dibahas di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kabupaten /kota oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari pihak eksekutif untuk diadakan revisi-revisi disesuaikan dengan skala prioritas dari SKPD yang sudah ditetapkan. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) di Kabupaten / kota terdiri dari Dinas Pendapatan

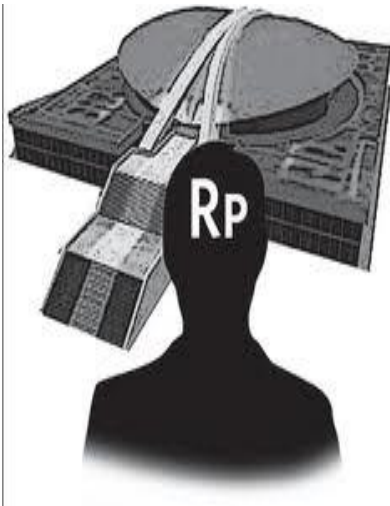
Pengelolaan Keuangan (DPPK), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Inspektorat, dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes serta Tim Badan Anggaran (Banggar) yang disebut Badan Anggaran DPRD terdiri dari Pimpinan DPRD dan satu wakil dari setiap komisi dan utusan fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota (Perda Nomor 02 Tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten /kota). Di dalam Badan Anggaran ini yang pada tahun belakangan saat tulisan ini dibuat sering terjadi tawar menawar kepentingan yang mengakibatkan korupsi pada berbagai proyek pemerintah daerah. Berikut ini bagan mekanisme proses penyusunan APBD seperti ilustrasi diatas :



Kebijakan penyusunan APBD dalam kerangka keuangan otonomi daerah model di atas secara teoritik memang sangatlah demokratis dan ideal, tetapi dalam pelaksanaan hampir di semua daerah di Indonesia terjadi praktek eksploitasi dan tawar menawar dalam Badan Anggaran DPRD (legislatif) dan eksekutif yang potensial

menimbulkan praktek korupsi. Sepanjang tahun 2012 banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah Kabupaten dan Kota yang berujung pada banyaknya Kepala Daerah yang diadili dan dipenjarakan. Meskipun harus diakui praktek ini hanyalah merupakan praktek oknum yang secara konsep dan sistem keuangan daerah tidak pernah ditolerir apalagi diakomodasi sebagai sistem (praktek) yang benar.

E. KEBIJAKAN DAN PENGANGGARAN KEUANGAN NEGARA DALAM APBN



Kondisi riil ekonomi Indonesia saat ini lebih baik dibanding dengan kondisi ekonomi global yang melemah terutama untuk negara-negara yang diterpa krisis ekonomi seperti Yunani, Italia dan Spanyol, dan negara-negara sedang dilanda bencana alam hebat seperti Amerika Serikat yang diterjang badai super Sandy yang meluluh-lantakkan sebagian besar *social overhead capital* dan sendi kehidupan masyarakat.

Meski kondisi lebih baik, tapi saat sekarang ini pemerintah Indonesia sedang didera oleh berbagai masalah nasional penting terkait merosotnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tawuran warga di berbagai daerah, korupsi yang merajalela terjadi hampir di semua departemen dari tingkat pusat sampai pada lini-lini pemerintahan, yang berakibat kebijakan-kebijakan pemerintah untuk meningkatkan stimulus fiskal dalam kerangka peningkatan kinerja keuangan negara sangat sulit diimplementasikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai alat pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal, tercermin dalam berbagai program yang menjadi prioritas saat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diimplementasikan. Arah kebijakan nasional terlihat pada program yang paling prioritas dibiayai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang berjalan. Pada tahun 2012 Presiden terpilih beserta anggota kabinet yang membantunya akan menuangkan visi, misi, dan rencana kerja pemerintahan untuk menjawab tantangan dan permasalahan aktual, dan sekaligus untuk mencapai sasaran-sasaran rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang yang telah disusun. RPJMN tahap pertama telah selesai dengan berakhirnya masa kerja Kabinet Indonesia Bersatu, dan tahun 2012 merupakan tahun ketiga dalam agenda RPJMN tahap kedua.

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai kelanjutan dari RPJMN ke-1 (2004 – 2009), RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian. Sementara itu, dalam RPJMN tahap kedua (2010 – 2014), kegiatan pembangunan akan diarahkan untuk beberapa tujuan, yaitu: (a) memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia, (b) meningkatkan kualitas sumber daya manusia, (c) membangun kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan (d) memperkuat daya saing perekonomian. Upaya pencapaian tujuan-tujuan tersebut akan diimplementasikan melalui pencapaian sasaran pembangunan di tiap tahun dengan fokus yang berbeda, sesuai dengan tantangan dan kondisi yang ada. Fokus kegiatan tersebut diterjemahkan dalam rencana kerja Pemerintah (RKP) di tiap-tiap tahun. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2012 disusun berdasarkan tema “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” yang di gariskan dalam 11 (sebelas) prioritas nasional dan tiga prioritas nasional lainnya. Sebelas prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu: (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal,

terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Sedangkan tiga prioritas nasional lainnya meliputi (a) bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) bidang perekonomian; dan (c) bidang kesejahteraan rakyat. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

Prioritas-prioritas nasional tersebut diatas menuntun pemerintah dalam meletakkan arah kebijakan nasionalnya. Idialnya prioritas nasional yang 11 (sebelas) ditambah 3 (tiga) prioritas politik, hukum, keamanan dan perekonomian serta kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan secara terpadu dengan satu kegiatan besar yang berdampak terhadap semua prioritas yang telah diketengahkan diatas. Kalau kita cermati prioritas-prioritas nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang berjalan, maka kebijakan negara dan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dengan berjalan lebih terfokus pada usaha untuk menciptakan stabilitas nasional. Hal ini tercermin dari baerbagai program dan kebijakan yang menjadi prioritas dan mendapatkan porsi terbesar dalam anggaran nasional, yaitu : (a) subsidi, dan (b) untuk menutup biaya rutin birokrasi dan (c) pembayaran bunga dan utang. Diprediksikan tahun 2013 arah kebijakan akan bergeser. Pergeseran itu akan terlihat dalam analisa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013. Didalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 memiliki nuansa khusus bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Desain babak akhir dari arah kebijakan dan pembangunan ekonomi pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2010–2014 mulai digambarkan. Kebutuhan dana untuk persiapan Pemilihan Umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2014 pun mulai dianggarkan dalam RAPBN 2013. Di lain pihak, tuntutan dan harapan masyarakat terhadap keberhasilan pembangunan dan hasil-hasilnya agar dapat dirasakan dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat juga menjadi semakin meluas dan membesar. Peranan dan kontribusi RAPBN yang

dicerminkan dari alokasi kegiatan dan program dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi sangat krusial. Kuncinya terletak pada bagaimana sumber daya yang terbatas dapat dikelola sedemikian rupa untuk dapat memenuhi kebutuhan yang kompleks dengan hasil yang berkualitas tinggi. Dengan kerangka pikir ini, kemampuan melihat, menganalisis, mempertimbangkan, dan merespon perkembangan ekonomi global dan domestik, permasalahan-permasalahan dan tantangan-tantangan yang dihadapi, menjadi unsur utama dalam penyusunan RAPBN 2013. Hal-hal tersebut akan bermuara pada kualitas dari kebijakan, rencana program dan alokasi anggaran, dan hasil pelaksanaan RAPBN 2013, meskipun kondisi ekonomi makro dan respon positif masyarakat juga merupakan faktor penentu penting. Postur RAPBN tahun 2013 disusun dengan kaidah ekonomi publik dalam rangka optimalisasi sumber sumber penerimaan negara disertai dengan pelaksanaan efisiensi dan efektivitas di bidang belanja negara dan ketersediaan pembiayaan anggaran. Selain mempertimbangkan asumsi dasar ekonomi makro, penetapan berbagai besaran postur RAPBN tahun 2013 juga memperhatikan kebutuhan untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik, kebijakan yang akan dilakukan ke depan, serta perkembangan realisasi APBN pada periode-periode sebelumnya. Selama periode 2007–2011, realisasi APBN mencatat defisit anggaran yang fluktuatif, sejalan perkembangan realisasi pendapatan negara dan belanja negara yang terjadi pada periode tersebut. Pada periode 2007–2011, realisasi pendapatan negara dan hibah berada pada kisaran 15,1 hingga 19,8 persen terhadap PDB, realisasi belanja negara pada kisaran 16,2 sampai 19,9 persen, dan realisasi defisit berada pada kisaran 0,1 persen sampai dengan 1,6 persen terhadap PDB.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal, postur RAPBN 2013 akan meliputi pokok-pokok besaran sebagai berikut:

- a. Pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.507,7 triliun, terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.178,9 triliun, PNPB Rp324,3 triliun, dan penerimaan hibah Rp4,5 triliun.

- b. Belanja negara direncanakan sebesar Rp1.657,9 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.139,0 triliun dan transfer ke daerah Rp518,9 triliun.
- c. Defisit anggaran diperkirakan sebesar Rp150,2 triliun (1,62 persen terhadap PDB).
- d. Pembiayaan defisit RAPBN 2013 direncanakan berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp169,6 triliun, dan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19,5 triliun.

F. KEBIJAKAN SUKU BUNGA DEPOSITO

SUKU BUNGA DEPOSITO RUPIAH (%)			
JANGKA WAKTU	0 - 100 JT	100 JT - 1 TR	1 TR - 10 TR
1 BULAN	5,25	5,25	5,25
3 BULAN	5,25	5,25	5,25
6 BULAN	5,25	5,25	5,25
12 BULAN	5,25	5,25	5,25
24 BULAN	5,25	5,25	5,25

B. TABUNGAN MANDIRI			
1 BULAN	5,25	5,25	5,25
3 BULAN	5,25	5,25	5,25
6 BULAN	5,25	5,25	5,25
12 BULAN	5,25	5,25	5,25
24 BULAN	5,25	5,25	5,25

C. SUKU BUNGA DEPOSITO US DOLLAR (%)			
JANGKA WAKTU	0 - 100 JT	100 JT - 1 TR	1 TR - 10 TR
1 BULAN	5,25	5,25	5,25
3 BULAN	5,25	5,25	5,25
6 BULAN	5,25	5,25	5,25
12 BULAN	5,25	5,25	5,25
24 BULAN	5,25	5,25	5,25

Kebijakan suku bunga deposito ini ialah kebijakan pemerintah dalam menetapkan besarnya suku bunga deposito (tabungan ke bank). Apabila pemerintah menghendaki volume uang yang beredar dalam masyarakat berkurang, maka suku bunga deposito akan diturunkan.

Kebijakan deposito merupakan kebalikan dari kebijakan perkreditan karena kebijakan perkreditan mendorong penam-bahan jumlah uang yang beredar secara terarah, dengan harapan diikuti dengan jumlah barang yang bertambah banyak. Sedangkan kebijakan deposito mendorong semakin berkurang-nya jumlah uang yang beredar dan tindakan-tindakan ini saling mendukung antara yang satu dengan yang lainnya. Penyedotan uang, hanya bersifat sementara dan menunggu kesempatan yang tepat untuk dapat disalurkan secara produktif kembali.

Kebijakan-kebijakan di atas (di dalam bidang moneter), dilaksanakan oleh para penguasa di bidang moneter, antara lain

Dewan Ekonomi dan Stabilisasi, Dewan Moneter, Bank Indonesia, Departemen Keuangan. Indonesia telah mengalami berbagai kebijakan moneter sejak kemerdekaan. Pada awal tahun 1950-an kebijakan moneter yang dilaksanakan cenderung bersifat konservatif (jumlah uang yang beredar dan tumbuh dengan mantap, tetapi terkendalikan dengan laju 22 persen per tahun antara tahun 1951-1956). Pada tahun-tahun terakhir dasawarsa 50-an jumlah uang yang beredar tumbuh dengan lebih cepat dengan laju pertumbuhan sebesar 37 persen per tahun antara 1956-1960. Kemudian, pada tahun-tahun di awal dasawarsa 60-an terdapat usaha-usaha untuk mengendalikan moneter, tetapi sejak tahun 1963 usaha-usaha semacam ini tidak lagi dilaksanakan dan jumlah uang yang beredar tumbuh tak terkendali. Hal ini mengakibatkan inflasi yang parah pada awal tahun 1966 (indeks harga untuk Jakarta meningkat dengan 1.500 persen antara pertengahan tahun 1965 dan pertengahan tahun 1966). Sesudah memasuki zaman pemerintahan Orde Baru, terjadi perubahan drastis dalam gaya pengelolaan ekonomi dan moneter, dan dalam waktu yang pendek sektor moneter dapat terkendalikan dan harga-harga menuju kestabilan, yaitu pada periode tahun 1969-1971, Indonesia mengalami laju inflasi di bawah 10% per tahun. Stabilitas ini berlangsung sampai triwulan terakhir tahun 1972. Sesudah itu, terjadi lagi inflasi yang cukup tinggi meskipun pemerintah tetap menggunakan kebijakan yang sama. Menjelang akhir tahun 1976, stabilitas dapat dipulihkan kembali dan laju inflasi mencapai laju yang sedikit lebih tinggi dari 10% per tahun. Kondisi seperti ini dapat dipertahankan sampai tahun 1978, namun kebijakan *devaluasi* pada tahun 1978, bulan November menghidupkan kembali inflasi pada tahun 1979. Pemerintah telah pula melaksanakan serangkaian kebijakan moneter yang dilakukan untuk menyempurnakan kebijakan-kebijakan moneter pada periode sebelumnya, meliputi usaha peningkatan pemupukan tabungan masyarakat, pengarahannya pemberian kredit untuk menunjang pengembangan dunia usaha, terutama usaha golongan ekonomi lemah, serta lebih menyempurnakan dan meningkatkan efisiensi dan peranan lewat lembaga-lembaga keuangan dalam mencapai sistem kelembagaan yang lebih sehat dan lengkap. Dalam usaha untuk

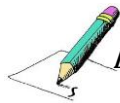
meningkatkan pemupukan tabungan masyarakat, kebijakan yang ditempuh adalah mendorong masyarakat untuk bisa menabung dalam bentuk deposito/tabungan, sertifikat, deposito serta pembelian surat-surat obligasi dan saham. Untuk meningkatkan pinjaman dalam bentuk deposito, pemerintah menetapkan penghapusan pajak atas bunga, dividen, dan *royalty* bagi deposito valuta asing di bank-bank. Dalam usaha meningkatkan peranan golongan ekonomi lemah, pemerintah menyediakan kredit investasi dalam bentuk KIK (Kredit Investasi Kecil), KMKP (Kredit Modal Kecil Permanen), Kredit mini, KCK (Kredit Candak-Kulak), Kredit Bimas dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Saudara, sasaran-sasaran kebijakan moneter adalah berikut .

1. Melanjutkan usaha pemerataan pembangunan dengan meningkatkan jumlah kredit yang berprioritas tinggi, terutama yang menunjang kegiatan golongan ekonomi lemah, mendorong perluasan kesempatan kerja, serta menunjang produksi barang ekspor.
2. Meningkatkan usaha mobilisasi tabungan masyarakat melalui lembaga keuangan bank dan bukan bank termasuk pasar modal.
3. Memelihara dan meningkatkan ekonomi yang stabil, khususnya harga-harga barang dan jasa yang mempengaruhi kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
4. Melanjutkan usaha peningkatan efisiensi, perbaikan manajemen dan administrasi lembaga keuangan tersebut lebih efektif dalam mobilisasi dana-dana masyarakat serta menyalurkan pada kegiatan pembangunan.

Untuk memantapkan pemahaman Anda tentang kebijakan moneter, silahkan Anda saksikan audio visual dengan judul : " Permintaan uang, tingkat bunga equilibrium kebijakan moneter- Case Fair ch 26", yang dikutip dari <http://www.youtube.com/watch?v=nyz0OBHepcs>.

Identifikasilah bentuk kebijakan moneter dari audio visual yang Anda saksikan tersebut!



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Jelaskan apa yang disebut dengan kebijakan moneter berikut tujuan -tujuan yang ingin dicapainya!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan *cash ratio* itu dan jelaskanlah pula bagaimana *cash ratio* dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat melalui *multiplier deposits effect*-nya!
3. Jelaskanlah perbedaan antara kebijakan suku bunga kredit dan kebijakan suku bunga deposito, terangkanlah pula dengan contohnya!
4. Jelaskanlah pula apa perbedaan antara saham dan obligasi itu!
5. Terangkanlah dan jelaskanlah hubungan antara kebijakan moneter yang dilaksanakan pemerintah pada pemerintah Orde Baru dengan Trilogi Pembangunan kita!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Hendaknya Anda mengingat kembali definisi dari kebijakan moneter itu, kemudian ingatlah pula 4 macam tujuan dasar dari kebijakan moneter itu.
- 2) Anda harus ingat apa yang disebut dengan *cash ratio* itu, kemudian jelaskan pula apa yang dimaksud dengan *multiplier deposits effect* itu. Untuk melengkapi jawaban ini Anda

hendaknya menerangkan dengan contoh proses pelipatan peredaran uang itu.

- 3) Ingat kembali apa arti dan tujuan dari kebijakan suku bunga kredit dan kebijakan suku bunga deposito. Kemudian, lihatlah perbedaan di antara keduanya.
- 4) Tentu saja Anda harus ingat kembali arti dan pelaksanaan antara hasil yang diperoleh dari masing-masing jenis, apabila Anda ingin menjawab pertanyaan nomor ini.
- 5) Diharapkan Anda mengingat apa pengertian dari kebijakan-kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian, hubungkanlah apa pelaksanaan kebijakan moneter itu tetap bersasaran dan berdasarkan kepada ketentuan dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional.



RANGKUMAN

Kebijakan moneter ialah kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Sedangkan tujuan dari kebijaksanaan moneter ini pada dasarnya ialah mengadakan stabilisasi perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengadakan pemerataan pendapatan dengan cara mendorong terus peningkatan peranan usaha golongan ekonomi lemah dan pemerataan fasilitas perkreditan bagi seluruh masyarakat terutama untuk peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pelayanan fasilitas kredit untuk seluruh masyarakat di seluruh tanah air. Peralatan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter itu ialah dengan kebijakan cash ratio, pasar terbuka, suku bunga kredit dan suku bunga deposito. Pada pemerintahan Pada zaman Orde Lama pemerintah sudah melaksanakan kebijakan moneter, namun kegagalan banyak dijumpai dengan terbukti adanya gejala inflasi yang tinggi, yang mengganggu kestabilan ekonomi dan sosial. Pada saat pemerintah Orde Baru, kebijakan moneter dilaksanakan dengan sasaran yang

diutamakan untuk mencapai hasil pembangunan yang berdasar pada Trilogi Pembangunan. Pada masa Repelita IV, pemerintah terus melaksanakan dan menyempurnakan kebijakan-kebijakan moneter yang terbukti berhasil mencapai sasaran yang ditetapkan, yaitu yang dapat mengamalkan Trilogi Pembangunan.

Periode pasca reformasi rencana kerja pemerintah tahun 2012 disusun berdasarkan keebijakan “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” yang digariskan dalam 11 (sebelas) prioritas nasional dan tiga prioritas nasional lainnya. Sebelas prioritas pembangunan nasional tersebut, yaitu: (a) reformasi birokrasi dan tata kelola; (b) pendidikan; (c) kesehatan; (d) penanggulangan kemiskinan; (e) ketahanan pangan; (f) infrastruktur; (g) iklim investasi dan iklim usaha; (h) energi; (i) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana; (j) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik; serta (k) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi. Tiga prioritas nasional lainnya memperkuat 11 prioritas di atas meliputi (a) bidang politik, hukum, dan keamanan; (b) bidang perekonomian; dan (c) bidang kesejahteraan rakyat. Pencapaian prioritas sasaran pembangunan nasional dan prioritas nasional lainnya tersebut akan diterjemahkan melalui program-program kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan

Prioritas-prioritas nasional tersebut di atas menuntun pemerintah dalam meletakkan arah kebijakan nasionalnya. Idealnya, prioritas nasional yang 11 (sebelas) ditambah 3 (tiga) prioritas politik, hukum, keamanan dan perekonomian serta kesejahteraan rakyat bisa dilaksanakan secara terpadu dengan satu kegiatan besar yang berdampak terhadap semua prioritas yang telah diketengahkan di atas. Kalau kita cermati prioritas-prioritas nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang berjalan, maka kebijakan negara dan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dengan berjalan lebih terfokus pada usaha untuk menciptakan stabilitas nasional.



Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Salah satu tujuan kebijakan moneter ialah
 - A. memberi kredit sebesar-besarnya pada pengusaha kuat
 - B. mencapai stabilisasi dalam perekonomian
 - C. meningkatkan *unemployment*
 - D. meningkatkan suku bunga kredit

- 2) Reserve requirement berarti
 - A. cadangan sebagai jaminan likuiditas suatu bank
 - B. suku bunga yang diberikan oleh suatu bank
 - C. persentase cadangan yang harus dipunyai suatu
 - D. jawaban A, B, dan C benar

- 3) Apabila RR ditetapkan sebesar 20 %, maka *multiplier deposit*-nya sebesar
 - A. 25
 - B. 20
 - C. 5
 - D. 4

- 4) Peralatan moneter yang bertujuan mencapai kestabilan perekonomian dan dilaksanakan dengan menjual surat-surat berharga disebut
 - A. *cash ratio*
 - B. *open market policy*
 - C. kebijakan suku bunga kredit
 - D. jawaban A, B, dan C benar

- 5) Perbedaan obligasi dan saham, antara lain terletak pada
 - A. hasil yang diperoleh
 - B. badan yang mengeluarkan
 - C. peranan yang pemegangnya
 - D. jawaban A, B, dan C benar

- 6) Berikut ini adalah termasuk kredit dengan prioritas tinggi yang dilaksanakan di Indonesia, *kecuali*
- kredit Bimas
 - kredit pemilikan rumah
 - kredit investasi di atas Rp75 juta
 - KIK/KMKP
- 7) Kebijakan moneter yang dilaksanakan dengan menetapkan suku bunga kredit yang dipinjam disebut
- cash ratio*
 - open market policy*
 - kebijakan suku bunga kredit
 - kebijakan suku bunga deposito
- 8) Suatu usaha untuk meningkatkan tabungan pemerintah dilaksanakan dengan cara berikut, *kecuali*
- meniadakan suku bunga deposito
 - menaikkan suku bunga deposito
 - menghilangkan pajak atas bunga dividen
 - meningkatkan jumlah saldo tabungan yang memperoleh bunga tinggi
- 9) Perbedaan antara saham *preferensi* dan saham biasa, terletak pada
- hasil yang diperoleh pemegang
 - lembaga yang mengeluarkan
 - suku bunga yang ditetapkan
 - jawaban A, B, dan C salah
- 10) Pembebasan *pagu* kredit dilaksanakan di Indonesia sejak
- tahun 1966
 - tahun 1979/1980
 - tahun 1984/1985
 - 1 Juni 1983

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 3. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kegiatan Belajar 3

Kebijakan Keuangan Internasional

Seperti telah diuraikan di depan bahwa kebijakan moneter dan kebijakan fiskal tidak terlepas dari kebijakan keuangan internasional.



Ketiganya saling mendukung untuk memantapkan keuangan negara, yang sangat diperlukan untuk pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dalam rangka mencapai kemakmuran dan keadilan bagi seluruh warga negaranya. Kebijakan keuangan internasional ini, meliputi juga kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan transaksi pembayaran antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, beserta pengawasannya. Jadi, kebijakan ini menyangkut masalah lalu-lintas devisa, baik yang diterima hasil perniagaan internasional maupun dari penanaman modal jangka panjang dan lain-lain.

Pada dasarnya bantuan luar negeri baik yang berupa *grant*, maupun *loan* (pinjaman luar negeri), tidak boleh merugikan negara penerima, baik secara politik, ekonomi, kebudayaan maupun bidang-bidang yang lain. Sedangkan dalam kebijakan neraca pembayaran hendaknya diusahakan adanya keseimbangan antara transaksi *debet* dan transaksi kredit. Transaksi *debet* adalah transaksi yang menimbulkan kewajiban melakukan pembayaran terhadap negara lain. Sangat menguntungkan bagi suatu negara apabila neraca pembayarannya

surplus sehingga kelebihan ini dapat digunakan pula sebagai modal untuk melaksanakan pembangunan. Pada umumnya kebijakan internasional yang mencakup kebijakan neraca pembayaran dan kebijakan bantuan luar negeri, ditujukan untuk mendorong pembangunan di suatu negara, terutama untuk negara-negara berkembang, yang sangat terbatas kemampuannya untuk mengadakan pembangunan. Untuk itu, perlu diusahakan agar dana yang terdapat/dimiliki dapat meningkatkan *surplus* neraca pembayaran. Selain itu, diusahakan pula sebagai pelengkap dana pembangunan adalah bantuan luar negeri yang tidak mempunyai syarat-syarat mengikat, dan tidak mengandung syarat-syarat pengembalian yang memberatkan negara penerima. Namun, lebih baik apabila negara berkembang berswasembada dalam melaksanakan pembangunan di negaranya. Dengan *surplus* neraca pembayaran, berarti negara akan mempunyai cadangan devisa yang lebih besar. Keadaan ini akan mendukung *likuiditas* dan *solvabilitas* internasional suatu negara. Hal ini berarti, apabila cadangan devisa menurun akan dianggap sebagai pertanda kegagalan dari kebijakan yang dijalankan pemerintah sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan pelarian modal ke luar negeri, menurunnya atau bahkan terhentinya aliran modal jangka panjang yang masuk dari luar negeri, dan keengganan negara pendonor untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan bantuannya. Di samping dapat memperkuat kepercayaan masyarakat di dalam dan di luar negeri terhadap perekonomian suatu negara, besarnya *surplus* neraca pembayaran juga dapat digunakan sebagai penyerap fluktuasi jangka pendek dalam berbagai macam pos neraca pembayaran dan dapat memberikan tenggang waktu bagi pemerintah untuk dapat mengadakan penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang dilaksanakannya. Cadangan devisa yang diperoleh dari adanya *surplus* neraca pembayaran akan dapat merupakan jaminan bagi kemampuan negara untuk membayar kembali semua bentuk pinjaman yang dilakukannya tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Jadi, cadangan devisa yang diperoleh dari adanya *surplus* neraca pembayaran akan meningkatkan *likuiditas* dan *solvabilitas* internasional suatu negara.



Indonesia juga telah melaksanakan kebijakan dalam keuangan internasional sejak kemerdekaannya. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai usaha untuk mendorong aliran modal masuk guna meningkatkan impornya sejak kemerdekaannya. Namun selama 15 tahun pertama, pemerintah Indonesia kurang memperhatikan implikasi yang timbul dari meningkatnya kewajiban ini tanpa merusak kesediaan para kreditornya untuk tetap memberikan bantuannya.

Misalnya, pemerintah melakukan *konsolidasi kredit* perdagangan yang harus dibayar kepada Jepang dalam tahun 1964 dan berhasilnya membatalkan semua utangnya kepada Jepang dari persetujuan pampasan perang tahun 1948. Sebelumnya, pada tahun 1963 berhasil mendapatkan persetujuan dari pemerintah Uni Soviet untuk menggunakan pembayaran utangnya. Kemudian, pada tahun 1967, pemerintah Indonesia menghapuskan semua utang-utangnya kepada pemerintah Belanda dan sebagainya. Sejak tahun 1966, dengan mulainya pemerintah Orde Baru, keadaan telah berubah, sektor swasta dan sektor pemerintah telah berkembang ke arah hubungan yang makin erat dengan pasar modal internasional sehingga tindakan penghapusan utang secara sepihak akan berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di dalam negeri. Tahun 1966 adalah tahun transisi. Perundingan mengenai utang untuk tahun tersebut dimulai dan selanjutnya mulai timbul berbagai tawaran bantuan baru dari beberapa negara kreditor. Pada tahun tersebut pula dilakukan pencabutan pembatasan-pembatasan atas lalu-lintas devisa dan sekaligus dilakukan *devaluasi* terhadap rupiah. Di samping itu, pada tahun tersebut kurs devisa akan diambangkan dan pemerintah mengumumkan politik pintu terbuka bagi modal swasta asing untuk berusaha di Indonesia. Undang-undang tentang Penanaman Modal

Asing (PMA), dikeluarkan pada awal tahun 1967, sedangkan UU PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) baru dikeluarkan pada tahun 1968. Kedua undang-undang tersebut memberikan rangsangan khusus dan keringanan cukup besar bagi penanam modal dari luar negeri. Setelah tahun 1967 bantuan luar negeri meningkat. Di samping itu, harga satuan ekspor Indonesia yang merosot pada tahun 1968, telah meningkat kembali pada tahun 1971 dengan tingkat yang dicapai pada tahun 1966, sedangkan harga satuan impor selama periode ini justru menunjukkan penurunan. Volume ekspor maupun impor meningkat dua kali lipat. Hal ini disebabkan oleh dua hal, yaitu ekspor minyak mentah meningkat dengan mantap, di lain pihak impor yang dibiayai dengan bantuan luar negeri, penanaman modal langsung dan *repatriasi* modal juga meningkat. Akibat-akibat dari dilaksanakan kebijakan keuangan luar negeri yang didukung oleh kebijakan moneter dan fiskal pada tahun terakhir dari dekade 60-an dan awal tahun 1971, devisa Indonesia untuk pertama kalinya selama 12 tahun mulai mengalami peningkatan cadangan devisa. Hal ini tidak disebabkan oleh membaiknya rekening lancar (baik ekspor maupun impor meningkat 39%), tetapi adanya perubahan aliran modal swasta yang masuk. Pada tahun 1972, untuk pertama kalinya penanam modal langsung luar negeri masuk dalam bentuk uang tunai, kemudian dirupiahkan guna pembiayaan pembangunan proyek-proyek tersebut. Di samping itu, dalam tahun 1972 dan 1973 aliran modal jangka pendek luar negeri mencapai jumlah yang cukup besar karena ada biaya pasar devisa bebas, prospek neraca pembayaran yang mantap dan karena adanya tingkat bunga yang sangat tinggi di dalam negeri bagi simpanan-simpanan pada bank-bank di Indonesia.

Pada Repelita III (1979/1980-1983/1984), perkembangan neraca pembayaran dan perdagangan luar negeri berpangkal tolak dari landasan kuat yang diletakkan oleh kebijakan 5 November 1978, yang mempunyai sasaran untuk menaikkan daya saing barang-barang ekspor Indonesia di pasaran internasional. Pada bulan Januari 1982, pemerintah menempuh kebijakan ekspor baru yang menyangkut langkah-langkah menyeluruh di bidang lalu-lintas devisa, tata cara pembayaran, penyederhanaan prosedur perkreditan dan jaminan kredit ekspor, asuransi ekspor, perpajakan angkutan luar. Untuk

mengurangi tekanan pada neraca pembayaran dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikaitkan oleh resesi dunia yang berlarut-larut dan disertai dengan kemerosotan komoditi primer serta minyak bumi internasional, maka pada periode Pelita III diambil kebijakan untuk menahapkan kembali sejumlah proyek besar yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri dan mempunyai komponen impor tinggi. Sasaran dari kebijakan tersebut adalah untuk mengurangi *defisit* dari transaksi berjalan pada neraca pembayaran melalui penghematan penggunaan devisa untuk impor dan utang-utang yang bersangkutan, serta mengerahkan sumber-sumber dana dalam negeri untuk pembiayaan proyek pembangunan. Selama Pelita III, kebijakan diversifikasi ekspor terus dilanjutkan melalui usaha-usaha peningkatan tahap pengolahan, pengembangan produk-produk ekspor baru dan perluasan pasaran di luar negeri. Untuk mendukung kebijakan tersebut, salah satu cara, yaitu diadakan pembatasan ekspor kayu bulat secara bertahap dilaksanakan sehingga pada tahun 1985 ekspor kayu bulat tidak lagi diizinkan. Di bidang impor, kebijakan ditujukan untuk menunjang usaha-usaha pengadaan pangan, bahan baku, bahan modal, dalam rangka stabilisasi harga dan meningkatkan daya saing hasil produksi dalam negeri di pasaran internasional. Dalam Pelita III, dilakukan pula usaha-usaha untuk meningkatkan penghasilan dan penghematan devisa, berupa kegiatan pelaksanaan pengembangan industri pariwisata, pemberian fasilitas perjalanan bagi wisatawan luar negeri, pemberian/penunjukan perusahaan pelayaran nasional untuk mengangkut barang-barang ekspor dan impor milik pemerintah maupun milik badan usaha milik negara, serta pembatasan perjalanan luar negeri melalui sistem perpajakan. Sedangkan pinjaman dan penanaman modal luar negeri tetap dipergunakan dan dimanfaatkan sebagai pelengkap sumber dana dalam negeri untuk membiayai pembangunan. Oleh karena itu, pedoman pinjaman luar negeri harus sesuai dengan rencana pembangunan dan tidak menimbulkan ikatan politik, tidak memberatkan pelunasannya, serta tidak menyebabkan ketergantungan secara terus-menerus. Dari kebijakan yang telah dijalankan, neraca pembayaran berkembang dengan baik pada saat Pelita III. Hal itu, terlihat dari transaksi berjalan yang untuk pertama

kalinya mengalami *surplus*, sehingga cadangan devisa untuk 2 tahun di awal Pelita III menjadi sebesar US\$-juta. Pada pertengahan Pelita III akibat memburuknya harga minyak bumi dan disebabkan adanya dampak dari resesi dunia yang mulai dirasakan, menyebabkan *defisit* dalam neraca pembayaran kita. Namun, hal ini dapat diatasi kembali sehingga pada akhir Pelita III, terdapat kenaikan kembali pada cadangan devisa kita, yang diperkirakan mencapai US\$ 5135 juta pada akhir tahun 1983/1984 sehingga pada awal tahun dari Repelita IV, tersedia cukup cadangan devisa yang dapat dipakai untuk membiayai impor-impor di luar sektor minyak dan gas bumi untuk rata-rata 4,3 bulan.

Dalam Repelita IV, pemerintah tetap menjalankan kebijakan neraca pembayaran yang berlandaskan pada Trilogi Pembangunan. Dengan demikian, di samping dapat menunjang perubahan struktural dalam ekspor (menggeser sektor pertanian dengan sektor industri), dapat pula meningkatkan laju pembangunan dan stabilitas ekonomi. Di samping itu, diharapkan pula kebijakan neraca pembayaran dapat mendukung pula tercapainya sasaran-sasaran perluasan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, penyebaran kegiatan-kegiatan produksi ke daerah-daerah serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Kebijakan neraca pembayaran diharapkan pula dapat meningkatkan dan memantapkan pelaksanaan pembangunan melalui langkah yang tepat untuk menghadapi setiap kemungkinan dan perkembangan gejolak ekonomi dunia.

Untuk itu dalam Repelita IV, diambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut.

a. Di bidang ekspor, dilaksanakan kebijakan-kebijakan perluasan pasaran ekspor melalui kegiatan promosi dan kerja sama bilateral, regional maupun multilateral dan dalam rangka meningkatkan daya saing barang-barang ekspor akan ditingkatkan usaha-usaha perbaikan kualitas melalui penyempurnaan dan pengawasan mutu barang-barang ekspor yang dilakukan oleh laboratorium pengawasan mutu baik yang sudah ada maupun akan dibangun di daerah-daerah produksi barang-barang ekspor. Juga akan disempurnakan dan ditingkatkan sistem angkutan untuk ekspor sehingga dapat menekan

biaya ekspor yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing barang ekspor kita.

b. Di bidang impor, kebijakan akan ditujukan untuk menunjang kemantapan kegiatan pembangunan dan mendorong perkembangan industri yang diharapkan akan mencapai laju pertumbuhan sebesar 9,5%. Kebijakan impor juga diarahkan untuk mengadakan penghematan dan penggunaan devisa yang lebih terarah dari jumlah devisa yang tersedia sebagai dana pembiayaan investasi. Untuk itu, di bidang impor akan dilaksanakan langkah-langkah, antara lain penghematan penggunaan devisa untuk impor barang di sektor pangan yang sudah cukup dihasilkan di dalam negeri, juga akan ditingkatkan peranan sektor jasa, seperti pengembangan sektor pariwisata, pengembangan ekspor jasa-jasa *contracting* dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, peningkatan peranan armada niaga nasional dalam pengangkutan barang-barang ekspor dan impor sendiri.

c. Di bidang pinjaman luar negeri, akan terus diusahakan hanya sebagai pelengkap dan investasi yang dibutuhkan dan pinjaman harus diusahakan berdasarkan pedoman tidak ada ikatan politik, tidak akan memberatkan dalam batas-batas kemampuan untuk membayar kembali dan penggunaannya haruslah untuk proyek yang produktif dan bermanfaat bagi negara dan masyarakat. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut akan dilaksanakan langkah-langkah penyempurnaan pola daya guna pinjaman luar negeri yang akan berguna untuk menjaga pemeliharaan perbandingan perluasan angsuran dan pembayaran bunga pinjaman terhadap penghasilan devisa ekspor pada tingkat yang cukup aman.

d. Di bidang penanaman modal, akan tetap dimanfaatkan potensi-potensi modal asing, teknologi dan keahlian dari luar negeri tanpa mengakibatkan ketergantungan yang terus menerus serta sesuai dengan kepentingan nasional. Untuk itu, penanaman modal asing akan diarahkan ke sektor yang menghasilkan barang kebutuhan masyarakat umum, dapat memperluas ekspor dan memerlukan modal investasi yang besar dan teknologi yang cukup tinggi.

e. Di bidang hubungan ekonomi luar negeri, terus ditingkatkan untuk usaha menggaling dan memupuk solidaritas dan kesatuan

sikap serta langkah-langkah untuk lebih mengembangkan kerja sama di antara negara berkembang. Usaha ini dilakukan dalam rangka mewujudkan Tata Ekonomi Dunia Baru. Salah satu langkah yang akan dilaksanakan adalah mengembangkan dan memperluas kerja sama dengan negara-negara ASEAN.



Dari kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan ada kemantapan perkembangan neraca pembayaran yang didukung oleh kebijakan devisa yang dapat menggairahkan ekspor, memperlancar lalu-lintas pembayaran dengan luar negeri dan menjaga kestabilan pasaran dan kurs valuta asing. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan cadangan devisa kita.

Jumlah cadangan devisa yang memadai akan dapat meningkatkan kemampuan untuk menghadapi berbagai kemungkinan keguncangan baik dalam penghasilan devisa maupun dalam kebutuhan penggunaan devisa.

Untuk memantapkan wawasan Anda tentang kebijakan keuangan internasional, saksikanlah audio visual dengan judul :

1. Pasar cermati arah kebijakan ECB, yang dikutip dari <http://www.youtube.com/watch?v=5-faa1er2SM>
2. Pasar cermati arah kebijakan BOE, yang dikutip dari <http://www.youtube.com/watch?v=8MDgLtpxFOM>

Kemudian Anda analisislah dengan menggunakan konsep kebijakan keuangan internasional



LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

1. Coba jelaskan, apakah yang dimaksud dengan kebijakan keuangan internasional dan mencakup kebijakan apa saja?
2. Cobalah jelaskan, apa yang disebut dengan *surplus* neraca pembayaran dan tujuan utama dari adanya *surplus* neraca pembayaran tersebut!
3. Diskusikanlah dengan teman-teman belajar Anda mengapa *surplus* neraca pembayaran dikatakan dapat mendukung *likuiditas* dan *solvabilitas* internasional suatu negara!
4. Cobalah ceritakan dan jelaskan kebijakan-kebijakan keuangan internasional yang telah dilakukan oleh pemerintah Orde Lama!
5. Setelah Anda mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Orde Lama, bandingkan pula dengan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru!

Petunjuk Jawaban Latihan

- 1) Anda diharapkan mengingat kembali pengertian dari kebijakan keuangan internasional. Kemudian, dari pengertian di atas cobalah mengingat kembali kebijakan apa saja yang termasuk di dalamnya.
- 2) Ingat kembali pengertian neraca pembayaran. Tariklah kesimpulan, apa yang disebut *surplus* neraca pembayaran tersebut. Setelah itu, ingat dan analisis apa kegunaannya.
- 3) Anda diharapkan mengerti terlebih dahulu apa yang disebut dengan *likuiditas* dan *solvabilitas* itu. Kemudian, hubungan dengan kedudukan *surplus* neraca pembayaran terhadap negara.

- 4)Ingat kembali kebijakan apa saja yang telah dijalankan pemerintah pada saat Orde Lama dalam bidang keuangan internasional.
- 5)Ingat kembali kebijakan-kebijakan keuangan internasional pada masa Orde Baru. Kemudian, bandingkanlah/bedakanlah dengan jawaban Anda pada nomor 4.



RANGKUMAN

Kebijakan keuangan internasional adalah kebijakan di bidang keuangan dalam hubungannya dengan dunia internasional. Oleh karena itu, termasuk dalam kebijakan ini adalah kebijakan neraca pembayaran dan kebijakan bantuan luar negeri. Tujuan dari kebijakan internasional, pada umumnya untuk mendorong pembangunan di suatu negara, terutama untuk negara yang sedang berkembang. Untuk itu, harus diusahakan adanya *surplus* neraca pembayaran sehingga mengakibatkan adanya cadangan devisa yang berguna sebagai pelengkap dana untuk investasi bagi negara yang bersangkutan. Di samping itu, cadangan devisa dapat pula bermanfaat untuk mendukung kondisi *likuiditas* dan *solvabilitas* internasional suatu negara. Indonesia telah melaksanakan kebijakan keuangan internasional sejak kemerdekaannya, dengan jalan mencari bantuan, memperhitungkan dampak dari pembayarannya kembali sehingga pada akhir pemerintahan Orde Lama, Indonesia mengalami kesulitan-kesulitan dalam pembayarannya. Pada zaman Orde Baru, kebijakan keuangan internasional dilaksanakan dengan berlandaskan pada Trilogi Pembangunan.



TES FORMATIF 3

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Kebijakan keuangan internasional, mencakup hal-hal sebagai berikut, *kecuali* kebijakan
 - A. perniagaan internasional
 - B. dalam lalu-lintas devisa
 - C. bantuan luar negeri
 - D. perpajakan

- 2) Kebijakan neraca pembayaran mencakup hal-hal berikut, *kecuali*
 - A. persetujuan perniagaan internasional
 - B. persetujuan lalu-lintas devisa
 - C. kebijakan impor dan ekspor
 - D. kebijakan fiskal yang menyangkut subsidi untuk menggalakkan produksi ekspor

- 3) Kebijakan bantuan luar negeri mencakup langkah-langkah berikut, *kecuali* persetujuan
 - A. lalu-lintas devisa
 - B. penerimaan *grant*
 - C. penerimaan bantuan teknologi
 - D. penerimaan keahlian dari luar negeri

- 4) Salah satu usaha yang harus dicapai dalam kebijakan keuangan internasional adalah
 - A. meningkatkan *defisit* neraca pembayaran
 - B. meningkatkan *surplus* neraca pembayaran
 - C. menimbulkan ketergantungan dengan negara donor
 - D. jawaban A, B, dan C salah

- 5) *Surplus* neraca perdagangan yang dapat menyebabkan meningkatnya cadangan devisa suatu negara, dikatakan dapat menimbulkan *likuiditas* internasional suatu negara. Hal ini berarti
 - A. negara tidak dapat membayar utang pada waktunya
 - B. rakyat akan lebih meningkatkan penanaman modal di luar negeri

- C. negara dapat mengadakan penyesuaian keadaan bila luar negeri gejalak ekonomi dunia, tanpa menimbulkan gangguan stabilitas di dalam negeri
 - D. jawaban A, B, dan C benar
- 6) *Surplus* neraca pembayaran terjadi apabila transaksi
- A. *debet* sama dengan kredit
 - B. *debet* lebih besar dari pada transaksi kredit
 - C. hak untuk menerima bayaran lebih besar dari transaksi kewajiban membayar
 - D. hak menerima bayaran lebih kecil dari transaksi kewajiban membayar
- 7) Transaksi *debet* dalam neraca pembayaran memuat
- A. kewajiban membayar utang
 - B. transaksi hak menerima pembayaran
 - C. transaksi membayar kewajiban membayar utang
 - D. jawaban A, B, dan C salah
- 8) Pinjaman luar negeri yang diperoleh Indonesia harus memenuhi syarat-syarat berikut, *kecuali*....
- A. tidak adanya ikatan politik
 - B. tidak memberatkan beban pembayaran kembali
 - C. tidak menimbulkan ketergantungan yang terus-menerus
 - D. dapat menimbulkan ketergantungan yang terus-menerus
- 9) *Devaluasi* yang pertama kali dilakukan pemerintah Orde Baru terjadi pada tahun
- A. 1965
 - B. 1966
 - C. 1967
 - D. 1968
- 10) UU PMA, dikeluarkan pertama kali oleh pemerintah Orde Baru pada tahun
- A. 1965
 - B. 1966
 - C. 1967

D. 1968

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 3 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 3.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). **SELAMAT!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 3, terutama bagian yang belum dikuasai.

Kunci Jawaban Tes Formatif

Tes Formatif 1

- 1) A. Sebab kebijakan fiskal memang pengelolaannya harus dibedakan dengan pengelolaan keuangan individu.
- 2) B. Memang Alvin Hansen merupakan pelopor dari *the managed approach*
- 3) D. Kebijakan fiskal memang merupakan alat untuk mengadakan *optimum allocation of resources*/berfungsi alokasi.
- 4) C. Memang pajak progresif dapat berfungsi pemeratakan pendapatan.
- 5) D. Memang fungsi stabilisasi mencakup A, B dan C.
- 6) D. Kebijakan fiskal yang bertujuan untuk menggalakkan produksi dalam negeri meliputi A, B dan C.
- 7) D. Bertujuan untuk mencapai distribusi pendapatan yang lebih merata.
- 8) A. Memang UU PBB, UU Bea Meterai dan menggalakkan ekspor non migas merupakan upaya meningkatkan penerimaan negara.
- 9) D. Merupakan kebijakan fiskal di segi pengeluaran.
- 10) D. Jawaban A, B dan C merupakan usaha yang menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan fiskal.

Tes Formatif 2

- 1) B. Salah satu tujuan kebijakan moneter adalah mencapai stabilisasi dalam perekonomian.
- 2) A. *Reserve requirement* berarti cadangan sebagai jaminan likuiditas suatu bank.
- 3) C. *Multiplier deposits* sebesar 5, apabila RR ditetapkan 20%.
- 4) B. *Open market policy*, adalah peralatan moneter dengan menjual surat-surat berharga.
- 5) D. Merupakan perbedaan saham obligasi.
- 6) C. *Kredit* investasi di atas Rp75 juta, tidak termasuk *kredit* berprioritas tinggi .

- 7) C. Kebijakan suku bunga *kredit* yang dipinjam, merupakan kebijakan moneter yang menetapkan suku bunga *kredit*.
- 8) C. Merupakan usaha untuk meningkatkan tabungan pemerintah.
- 9) A. Perbedaan saham biasa dan saham *preferensi* terletak pada hasil yang diperoleh pemegang.
- 10) D. Pembebasan *pagu kredit* mulai dilaksanakan 1 Juni 1983.

Tes Formatif 3

- 1) D. Kebijakan keuangan internasional tidak mencakup kebijakan perpajakan.
- 2) D. Kebijakan neraca pembayaran tidak mencakup kebijakan fiskal yang menyangkut subsidi produksi ekspor.
- 3) A. Kebijakan bantuan luar negeri tidak mencakup persetujuan lalu-lintas devisa.
- 4) B. Merupakan salah satu usaha yang harus dicapai dalam kebijakan keuangan internasional.
- 5) C. Merupakan arti dari *likuiditas* internasional yang dimiliki oleh cadangan devisa.
- 6) C. *Surplus* neraca pembayaran adalah seperti yang tertera pada poin C.
- 7) C. Transaksi *debet* merupakan transaksi kewajiban membayar utang.
- 8) D. Merupakan pengecualian dari syarat-syarat pinjaman luar negeri di Indonesia.
- 9) B. Pemerintah Orde Baru pertama kali mengadakan *devaluasi* pada tahun 1966.
- 10) C. Tahun 1967 UU PMA pertama kali dikeluarkan oleh pemerintah Orde Baru.

Glosarium

1. *Kebijakan fiskal* : kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan anggaran pemerintah dan pengaturan keuangan publik.
2. *Kebijakan Keuangan Internasional*: tindakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang keuangan internasional (dalam hubungannya dengan dunia internasional).

Daftar Pustaka

_____. (1984). *Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat 1974/1985-1988.1989*, Buku I. Jakarta: Percetakan Negara RI.

Ahmad Yani. (2002). Hubungan Keuangan Antara - Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Arifin P Soeria Atmaja.(2009). Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Kritik, dan Praktik, Jakarta: Rajawali Pers

Brotodiharjo, Santoso. (1958). *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*. Bandung: Fresco.

Deddy Supriady Bratakusumah. (2002). *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.

_____. (2000). Himpunan Peraturan Pemerintahan Daerah Tahun 2000, Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah). Jakarta: Cipta Jaya.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.

Masgrave, Richard A., Peggy B. (1995). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.

_____. (2002). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Ritonga, Taufiq. (2009). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pascasarjana UGM

Soetrisno PH. (1981). *Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE, GAMA.

Suhadi M dan J.B. Judono. (1971). *Prospek Perekonomian Indonesia*. Jakarta: LPEM, FE UI.

Suparmoko. (1984). *Asas-asas Keuangan Negara*. Yogyakarta: BPFE GAMA.

Syamsi, Ibnu. (1983). *Dasar-dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.

_____. (2002). Undang-undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2001 tentang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2002. Jakarta: Eko Jaya.

_____. (2001). Undang-undang Republik Indonesia tentang, Perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Panca Usaha.

_____. (2011) Undang Undang Republik Indonesia No 22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2012